



**LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2016**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kekuatannya sehingga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Lampung Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.

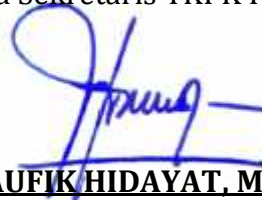
Laporan ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan berisi hasil evaluasi dari pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung yang dikoordinasikan bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

Selain itu laporan ini juga menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan di tahun berikutnya.

Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung masih sangat memerlukan peran dari seluruh stakeholder agar Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung dapat lebih baik lagi di masa mendatang,

Bandar Lampung, November 2016

Kepala Bappeda  
selaku Sekretaris TKPK Provinsi Lampung,



**Ir. TAUFIK/HIDAYAT, MM., MEP.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601009 198503 1 011

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Jarak antara Ibukota Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 2015.....	9
Tabel 2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2015.....	10
Tabel 3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung 2014-2015.....	14
Tabel 4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2014-2015.....	16
Tabel 5	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Feb 2014-Feb 2016.....	19
Tabel 6	Pengangguran Terbuka menurut Daerah Kota-Desa Provinsi Lampung, Februari 2015 - Februari 2016.....	21
Tabel 7	Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung, Februari 2015 - Februari 2016.....	21
Tabel 8	Komposisi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari 2015 - Februari 2016 (Persen).....	22
Tabel 9	Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu di Provinsi Lampung, Februari 2015 - Februari 2016 (Ribu).....	23
Tabel 10	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Februari 2014 - Februari 2016 (Ribuan).....	24
Tabel 11	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Kota-Desa di Provinsi Lampung, Februari 2016....	26
Tabel 12	Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Februari 2014 - Februari 2015.....	27
Tabel 13	TPT&TPAK Kab/Kota 2015.....	28
Tabel 14	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung, 2011-2015.....	30
Tabel 15	Angka Kesakitan dan Jumlah Kasus DBD, 2004 - 2015.....	51
Tabel 16	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Ketersediaan Listrik PLN dan Non-PLN, 2015.....	56
Tabel 17	Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Subsektor dan Perubahannya Maret 2015 s.d. April 2015.....	57
Tabel 18	Rasio ketersediaan pangan terhadap konsumsi normatif sereal dan umbian Provinsi Lampung Tahun 2015.....	60
Table 19	Data Produksi Ternak Provinsi Lampung Th. 2014-2015.....	61
Table 20	Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten / Kota.....	62
Tabel 21	Kinerja Produksi Tanaman Pangan Provinsi Lampung dari Tahun 2011 - 2015.....	64
Tabel 22	Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga, dan Rumah Tangga (Klaster I), 2015.....	72
Tabel 23	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas,	

	(Klaster 2).....	74
Tabel 24	Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil.....	75
Tabel 25	APBD Lampung menurut Pendapatan.....	77
Tabel 26	Komponen Pendapatan Asli Daerah Lampung.....	79
Tabel 27	Kapasitas Fiskal APBD Provinsi Lampung, 2015.....	79
Tabel 28	Kapasitas Fiskal APBN Provinsi Lampung, 2015.....	80
Tabel 29	Belanja menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015.....	11
Gambar 2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, 2010 – 2015.....	12
Gambar 3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional s.d Triwulan-III 2015.....	13
Gambar 4	Tingkat Inflasi Lampung dan Indonesia, 2009 – 2015.....	13
Gambar 5	Persentase Penduduk miskin menurut Wilayah se- Provinsi Lampung 2011-2015.....	15
Gambar 6	Laju Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Lampung dan Indonesia, 2011-2015.....	18
Gambar 7	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung, Februari 2014 - Februari 2016.....	19
Gambar 8	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional, Februari 2014 - Februari 2016.....	20
Gambar 9	Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2015-Februari 2016.....	22
Gambar 10	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Lampung, Februari 2016.....	24
Gambar 11	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Februari 2014 – Februari 2016.....	25
Gambar 12	Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah, 2010 – 2014.....	31
Gambar 13	APS menurut Kabupaten/kota,tahun 2015.....	32
Gambar 14	Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2010 – 2015.....	33
Gambar 15	APK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2015.....	34
Gambar 16	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, 2010 – 2015.....	35
Gambar 17	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan kab/kota, 2015.....	36
Gambar 18	Angka Buta Huruf 15+, 2011 – 2015.....	37
Gambar 19	Angka Buta Huruf 15+Kabupaten Kota, 2015.....	37
Gambar 20	Angka Melek Huruf Umur 15-24 Tahun Provinsi dan Nasional, 2014-2015.....	38
Gambar 21	Perbandingan usia harapan hidup Kabupaten/Kota 2010-2015.....	39
Gambar 22	Perbandingan Angka Kematian Bayi Lampung dan Indonesia, 2010-2015.....	40

Gambar 23	Angka Kematian Balita, 2010 – 2015.....	41
Gambar 24	Tren Kasus Kematian Ibu, 2011 – 2015.....	42
Gambar 25	Kasus Kematian Ibu menurut Wilayah, 2015.....	43
Gambar 26	Persentase Penyebab Kasus Kematian Ibu.....	43
Gambar 27	Persentase Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung, 2014-2015.....	45
Gambar 28	Persentase Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih per Kabupaten/Kota, 2015.....	46
Gambar 29	Tren Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk, 2011 – 2015..	47
Gambar 30	Distribusi Kasus Gizi Buruk menurut Kabupaten/Kota, 2015.....	47
Gambar 31	Jumlah Kumulatif Kasus HIV dan AIDS di Provinsi Lampung, 2011-2015.....	48
Gambar 32	Distribusi Kasus HIV/AIDS per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2015.....	49
Gambar 33	Penggunaan Kondom pada Populasi Beresiko, 2011-2015.....	50
Gambar 34	Persentase Penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS 2011-2015.....	50
Gambar 35	Jumlah Kasus Komulatif HIV/AIDs yang Terlaporkan, 2008 – 2015.....	50
Gambar 36	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung, 2009-2015.....	52
Gambar 37	Kasus DBD per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015.....	52
Gambar 38	Akses Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015.....	54
Gambar 39	Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015.....	55
Gambar 40	Akses Sanitasi Layak menurut Daerah Tinggal per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015.....	55
Gambar 41	Ketersediaan Pangan di Kab/Kota.....	66
Gambar 42	Akses Pangan di Kab/Kota.....	67
Gambar 43	Pemanfaatan Pangan di Kab/Kota.....	68
Gambar 44	Rata-rata Harga Beras, 2011 – 2015.....	69
Gambar 45	Produksi Tanaman Pangan (Kuintal/Ha), 2010 – 2015.....	69

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Landasan Hukum.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	8
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	8
2.2 Kondisi Kemiskinan Daerah.....	14
2.2.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	14
2.2.2. Dimensi Pendidikan.....	29
2.2.3. Dimensi Kesehatan.....	39
2.2.4. Dimensi Prasarana Dasar.....	53
2.2.5. Dimensi Ketahanan Pangan.....	57
BAB 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	71
3.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.....	71
3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.....	71
3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	76
3.3.1. Analisis Pendapatan Daerah.....	76
3.3.2. Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung.....	79
3.3.3. Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan .....	80
BAB 4 KELEMBAGAAN PENANGGULANAGAN KEMISKINAN.....	85
4.1 Kelembagaan TKPK.....	85
4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....	88
4.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan.....	101
4.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.....	101
4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	103
BAB 5 PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Rekomendasi.....	104

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 13,53 persen atau 1,100,68 ribu jiwa. Menurun dari data Maret 2015 yang 14,35 persen atau 1,163,49 ribu jiwa. Pengurangan jumlah penduduk miskin ini menyebabkan perubahan ranking provinsi termiskin di Sumatera. Yang tadinya ranking tiga, sekarang jadi ranking empat. Hal tersebut menjadi acuan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategi, energi masyarakat dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi tersebut merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan di Provinsi Lampung dalam periode tahun 2015-2019 dengan visi “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”.

Masalah yang terjadi adalah pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 62,81 ribu jiwa atau 5,74 persen dengan angka kemiskinan per September 2015 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka penduduk miskin nasional yang 11,13 persen. Posisi Lampung sebagai provinsi termiskin ketiga di Sumatera digantikan Sumatera Selatan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin terbanyak ada di pedesaan yakni 902,74 ribu jiwa. Sementara diperkotaan capai 197,94 ribu jiwa. Per September 2015, penduduk miskinnya berkurang 35,33 ribu jiwa diperkotaan dan berkurang 27,48 ribu jiwa dipedesaan. Pada sisi lain, kemiskinan memiliki korelasi linier dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya semakin tinggi kualitas manusia di suatu daerah maka seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dengan meningkatnya IPM berarti memberikan gambaran bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita semakin membaik. Dengan metode hitung baru, IPM Lampung tahun 2015 mencapai angka 66,95 persen. Garis Kemiskinan (P0) Provinsi Lampung Tahun 2015 sebesar 13,53 , Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang terkecil di tahun 2014



adalah Kabupaten Mesuji sebesar 0,77 dan di tahun 2015 Kabupaten Mesuji sebesar 1,04. Indeks Keparahan Kemiskinan terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebesar 0,98 di tahun 2014 dan meningkat menjadi 1,14 pada tahun 2015. Indeks keparahan terkecil dialami oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan indeks 0,14 (tahun 2014) menjadi 0,36 di tahun 2015. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung adalah sebesar 65,6 persen pertahun dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,14 persen pertahun. Dalam dunia pendidikan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Dinilai dari angka pendapatan, garis kemiskinan Provinsi Lampung Rp356.771 per kapita per bulan. Naik dibandingkan Maret 2015, secara garis kemiskinan naik tapi jumlah penduduk miskin turun. Garis kemiskinan naik dikelompok makanan. Terutama beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras. Orang miskin dikota lebih banyak merokok dibandingkan orang miskin didesa.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki regulasi daerah tentang penanggulangan kemiskinan, tetapi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung. Program unggulan Provinsi Lampung adalah dengan adanya program Gerakan Membangun Desa yang diperuntukan untuk desa-desa tertinggal di Provinsi Lampung dan telah dimulai pada tahun 2015. Alokasi pendanaan yang telah diberikan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp. 22.488.790.000,-.

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Kesekretariatan TKPK Provinsi Lampung membentuk Sekretariat TKPK yang berlokasi di kompleks Kantor Bappeda Provinsi Lampung. Tim TKPK Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Koordinasi TKPK se-Provinsi

Lampung sebanyak 6 kali. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2015 sebanyak 6 kali. Dengan program unggulan Pelaksanaan Program Gerakan membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung nomor 37.a Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

Untuk menuntaskan kemiskinan secara perlahan di Provinsi Lampung maka perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD-SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendirinya yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin berdampingan tidak merupakan problema sosial sampai saatnya perdagangan berkembang pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan di terapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat. Kemiskinan mulai muncul sebagai problema sosial pada saat orang sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu mengatakan apakah dirinya miskin atau kaya, dan perbedaan kedudukan ekonomi ditetapkan secara tegas oleh warga masyarakat.

Pada masyarakat yang masih sederhana susunan dan organisasinya, kemiskinan bukan merupakan problema sosial karena mereka menganggap semuanya sudah ditakdirkan sehingga usaha-usaha untuk mengatasinya mereka tidak terlalu memperhatikan keadaan tersebut kecuali apabila mereka merasa menderita, sedangkan pada masyarakat modern yang kompleks, kemiskinan menjadi problema sosial seorang merasa miskin bukan karena kurang makan, pakaian atau perumahan tapi harta miliknya dianggap kurang cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.

Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, infrastruktur yang belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sistem serta sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan.

Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Penanggulangan kemiskinan pada era ini masih tetap mendapat perhatian, hal ini dapat dimaklumi mengingat koridor penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Wujud nyata peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan periode 2015-2019 telah dituangkan ke dalam sembilan agenda (nawacita), yaitu: (1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan nawacita tersebut di atas dan juga dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas maka disusunlah RPJMN 2015-2019 yang sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Dalam Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategi, energi masyarakat dan

identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi tersebut merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan di Provinsi Lampung dalam periode tahun 2015-2019 dengan visi “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama merupakan Misi Provinsi Lampung dalam upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang. Pengembangan sumberdaya manusia berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), pelayanan kesehatan di setiap siklus kehidupan dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Menurunnya persentase angka kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2015 dari 14,21 menjadi 13,53 merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab isu yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dengan target penurunan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 7,0-8,0%. Kinerja tersebut dapat tercapai di bawah kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/078/II.02/HK/2014 untuk mengatur mekanisme kerja TKPK di daerah. Kelembagaan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai kinerja dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dalam melaksanakan

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, yaitu: (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil capaian program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah:

- a. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2015;
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan kebijakan (program, anggaran, dan regulasi) yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. Mengoptimalkan kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung melalui perbaikan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan agar fokus target dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

## **1.3 Landasan Hukum**

Dasar penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- o. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/078/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung.

## 1.4 Sistem Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah:

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

*Bab 1 Pendahuluan*

Bab ini berisi latar belakang penyusunan laporan (penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan di daerah, isu strategis penanggulangan kemiskinan daerah, dan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan); maksud dan tujuan penyusunan laporan; landasan hukum yang digunakan; serta sistematika penulisan laporan.

*Bab 2 Profil Kemiskinan Daerah*

Bab ini berisi kondisi umum daerah (dari sisi geografis, demografis, dan administratif) dan kondisi kemiskinan daerah (melalui dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan ketahanan pangan).

*Bab 3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*

Bab ini berisi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui regulasi daerah yang telah dibuat; pelaksanaan dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah yang bertumpu pada tiga klaster yaitu klaster 1 (program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga, dan rumah tangga), klaster 2 (program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas), dan klaster 3 (program pemberdayaan berbasis usaha mikro dan kecil); dan evaluasi APBD untuk penanggulangan kemiskinan yaitu kebijakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk



penanggulangan kemiskinan melalui analisis pendapatan daerah dan analisis belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

#### *Bab 4 Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan*

Bab ini berisi tentang kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung secara menyeluruh dengan melihat kelembagaannya; upaya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan; dan pengendalian penanggulangan kemiskinan yang mencakup pengawasan dan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengaduan masyarakat.

#### *Bab 5 Penutup*

Bab ini berisi tentang hasil akhir analisis secara menyeluruh atas permasalahan penanggulangan kemiskinan serta rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

## **BAB 2**

# **PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

### **2.1 Kondisi Umum Daerah**

Secara geografis Lampung terletak pada 103<sup>o</sup>40' – 105<sup>o</sup>50' bujur timur (BT) dan 6<sup>o</sup>45' – 3<sup>o</sup>45' lintang selatan (LS). Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara, di Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah Timur dibatasi Laut Jawa, dan di Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Lampung memiliki luas wilayah yaitu 51.991 km<sup>2</sup>, termasuk wilayah daratan yang mencapai 35.228,35 km<sup>2</sup>.

Topografi Lampung terutama di bagian barat merupakan daerah topografi berbukit sampai bergunung. Sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan hutan lindung yang meliputi 30,43% dari total wilayah Lampung, hal ini menyebabkan sebaran penduduk yang mengelompok di wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya wilayah Barat Lampung yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, dan sebagian Tanggamus menghadapi kesulitan mengembangkan wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas wilayah. Kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam semakin membatasi akses penduduk, baik terhadap pusat-pusat perekonomian maupun terhadap pelayanan dasar lainnya. Kondisi ini menyebabkan penduduk tidak dapat memanfaatkan sumber daya dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara optimal.

Selain itu terdapat 69 buah pulau besar dan kecil yang sebagian besar terletak di Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, dan hal ini menyebabkan distribusi barang dan jasa wilayah kepulauan menjadi mahal karena terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antarpulau terhadap pusat perekonomian. Potensi-potensi ekonomi yang ada di pulau sulit untuk berkembang sehingga biaya hidup masyarakat wilayah kepulauan menjadi lebih tinggi. Dari segi pelaksanaan pembangunan untuk wilayah kepulauan menyebabkan biaya tinggi untuk menyediakan bahan baku yang tidak ada di pulau tersebut.

Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 merupakan Karesidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.

Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota yang terdiri atas 227 kecamatan dan 2.643 desa/kelurahan. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Nama Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Jarak antara Ibukota Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	Nama Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak ke Ibukota Provinsi (km)
Lampung Barat	Liwa	15	136	241
Tanggamus	Kota Agung	20	302	81
Lampung Selatan	Kalianda	17	260	59
Lampung Timur	Sukadana	24	264	80
Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	314	58
Lampung Utara	Kotabumi	23	247	115
Way Kanan	Blambangan Umpu	14	227	209
Tulang Bawang	Menggala	15	151	119
Pesawaran	Gedong Tataan	11	144	26
Pringsewu	Pringsewu	9	131	41
Mesuji	Mesuji	7	105	204
Tulang Bawang Barat	Panaragan	8	96	140
Pesisir Barat	Krui	11	118	231
Bandar Lampung	Bandar Lampung	20	126	-
Metro	Metro	5	22	52
<b>Jumlah</b>		<b>227</b>	<b>2.643</b>	

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

Berdasarkan data BPS (September 2015), jumlah penduduk di Provinsi Lampung sebanyak 8.117.268 jiwa (Tabel 2), meningkat 91.077 jiwa dari 8.026.191 jiwa (tahun 2014). Peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2010 (7.634.005 jiwa) sebanyak 483.263 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 6,33 persen dalam periode 2010-2015.

Gambar 1 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Lampung tahun 2014-2015 menurut kabupaten dan kota, dengan laju pertumbuhan terendah di Kabupaten Lampung Utara (3,43 persen) dan tertinggi di Kota Bandar Lampung sebesar 10,61 persen atau jauh diatas rata-rata provinsi (6,33 persen).

Pada tahun 2015 penduduk Lampung berjumlah 8.117.268 orang dengan rincian 4.162.437 orang laki-laki dan 3.954.831 orang perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Lampung Tengah yaitu 1.239.096 orang dan paling sedikit ada di Metro sebesar 158.415 orang.

Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2015

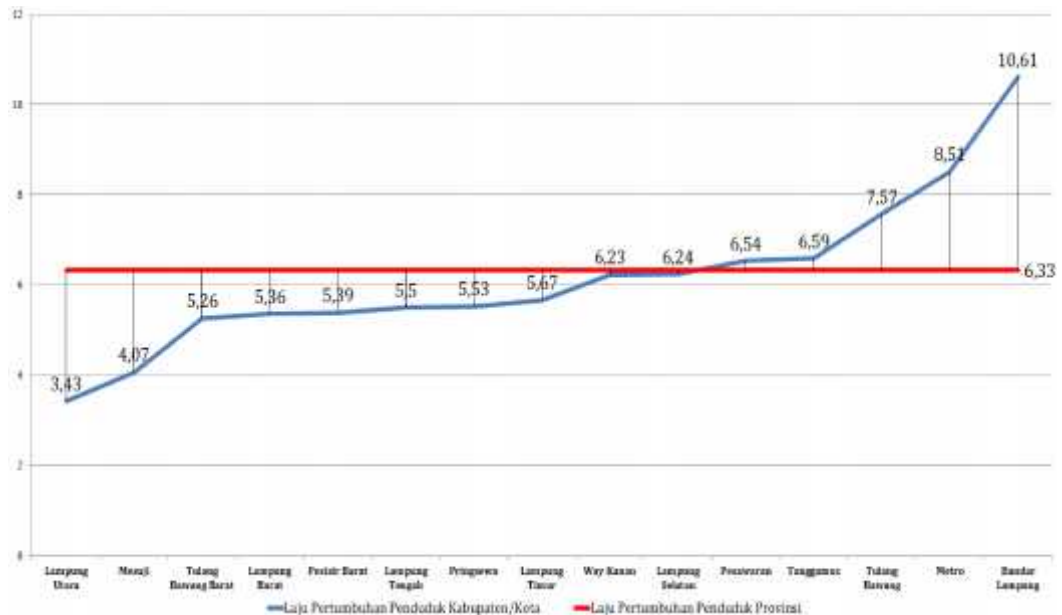
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Laki-laki)	Jumlah Penduduk (Perempuan)	Total Jumlah Penduduk
Lampung Barat	155 804	137 301	293 105
Tanggamus	299 214	274 690	573904
Lampung Selatan	499 385	473 194	972579
Lampung Timur	516 079	492 718	1 008 797
Lampung Tengah	630962	608134	1 239096
Lampung Utara	308 083	298009	606092
Way Kanan	223 116	209 798	432 914
Tulang Bawang	222 380	207 135	429 515
Pesawaran	219 587	206 802	426 389
Pringsewu	198 304	188 587	386 891
Mesuji	102 417	93 265	195 682
Tulang Bawang Barat	135 811	128 901	264 712
Pesisir Barat	78 693	71 197	149 890
Bandar Lampung	493 411	485 876	979 287
Metro	79 191	79 224	158 415
<b>Jumlah</b>	<b>4 162 437</b>	<b>3 954 831</b>	<b>8 117268</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2010 – 2035

Penduduk Lampung pada waktu Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 masing-masing sebanyak 2.775.695, 4.624.785, 6.015.803, 6.659.869, dan 7.608.405 orang. Laju pertumbuhan penduduk Lampung terus mengalami penurunan sejak 1971-1980 hingga 2000-2010. Meskipun pada periode 1971-1980 dan 1980-1990 laju pertumbuhannya di atas nasional, namun angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 1,24

persen dan berada di bawah level nasional pada periode 2001-2010 yaitu sebesar 1,49 persen.

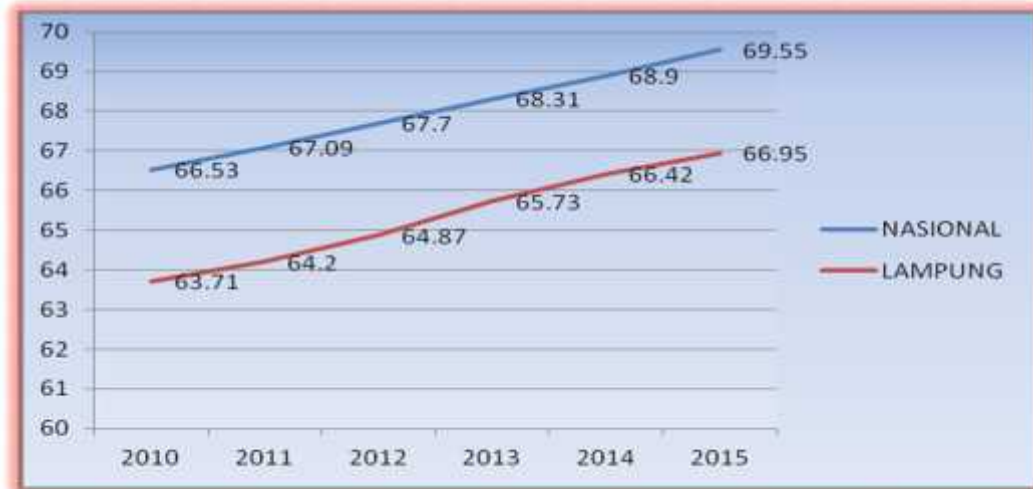
Gambar 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

Pada sisi lain, kemiskinan memiliki korelasi linier dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya semakin tinggi kualitas manusia di suatu daerah maka seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dengan meningkatnya IPM berarti memberikan gambaran bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita semakin membaik. Dengan metode hitung baru, IPM Lampung tahun 2015 mencapai angka 66,95 persen. Meski secara gradual mengalami peningkatan sejak tahun 2011 yang mencapai 64,20 persen, namun kenaikan pada tahun 2015 hanya mampu naik sebesar 0,53 persen. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, 2010-2015



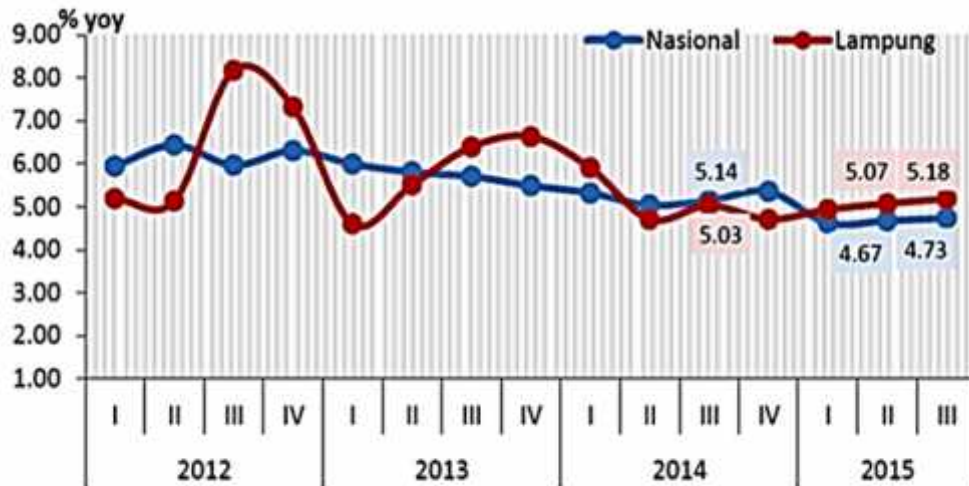
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mendongkrak angka IPM adalah dengan mengurangi tingkat kemiskinan, karena dengan berkurangnya kemiskinan akan memberikan nilai tambah untuk kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (komposit IPM).

Kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen dari 14,28 persen pada Maret 2014 menjadi 14,35 pada Maret 2015. Kenaikan kemiskinan disumbang oleh kemiskinan di wilayah perdesaan yang mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen, sedangkan di wilayah perkotaan justru mengalami penurunan sebesar 0,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan data yang tersedia lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 4,73 persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi se-Sumatera yang rata-rata mencapai 5,09 persen. Ekonomi Lampung tahun 2015 tumbuh sebesar 5,18 persen menguat dibanding tahun 2014 sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 11,67 persen, sektor Informasi dan Komunikasi 10,84 persen, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 9,79 persen.

Gambar 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional s.d Triwulan III 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

\*Pertumbuhan pada triwulan I 2012-triwulan II 2015 menggunakan tahun dasar 2010 = 100

Inflasi yang mencerminkan kestabilan ekonomi, kondisinya di Lampung selama ini cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi Indonesia. Sejak tahun 2010 inflasi Lampung selalu berada di atas Indonesia, namun pada tahun 2012 besar inflasinya sama dengan angka nasional yaitu 4,30. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 7,56, tetapi lebih rendah dibanding Indonesia yang mencapai 8,38. Perhitungan inflasi Lampung sejak tahun 2014 diwakili oleh dua kota yaitu Bandar Lampung dan Metro sehingga memiliki angka sama yaitu 8,36, sedangkan pada tahun 2015 inflasi Lampung sebesar 8,04 untuk Bandar Lampung dan 5,90 untuk kota Metro.

Gambar 4 Tingkat Inflasi Lampung dan Indonesia, 2009 - 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

## 2.2 Kondisi Kemiskinan Daerah

### 2.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

#### *Kondisi Ekonomi*

Kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan sering kali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karenanya konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Tabel 3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung 2014-2015

Uraian	Tahun	
	2014*	2015*
Jumlah Penduduk (Ribuan)	8.026,19	8.117,26
Garis Kemiskinan (Rp)	318.822	337.996
Perkotaan	336.927	386.728
Perdesaan	295.931	326.283
Penduduk Miskin (Ribuan)	1.143,93	1.100,68
Penduduk Miskin (%)	14,21	13,53
Perkotaan	10,68	9,25
Perdesaan	15,46	15,05
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,296	2,095
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,531	0,588

\* kondisi per-September (*year-on-year*)

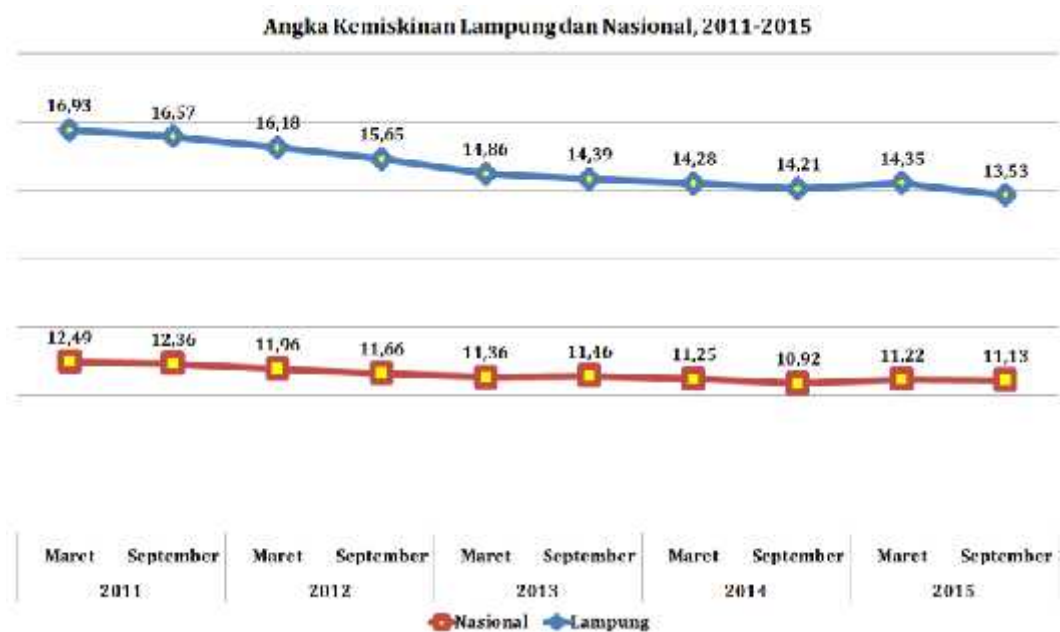
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada September 2015 kembali mengalami penurunan. Data terbaru diketahui angka kemiskinan Lampung sebesar 13,53 persen atau sebanyak 1.100,68 ribu jiwa (tabel3). Dibandingkan September 2014, telah terjadi pengurangan jumlah penduduk



miskin sekitar 43,25 ribu jiwa atau 0,68 persen namun angka kemiskinan Lampung saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 11,13 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan per tahun yang dialami Provinsi Lampung sejak 2011 cukup tinggi yaitu sekitar 0.68 persen, dimana rata-rata Nasional hanya sekitar 0.27 persen yang mengindikasikan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung lebih cepat dibandingkan nasional dan mempersempit gap kesenjangan antara kemiskinan nasional dengan Lampung.

Gambar 5 Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah se-Provinsi Lampung, 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan data diatas nampak bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi, walaupun sudah mengalami penurunan dari Maret sampai dengan tahun 2015. Penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dinilai sangat menghambat kinerja ekonomi suatu daerah sedangkan bila kinerja ekonomi mengalami tren yang positif, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan indikasi berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pendidikan, angkatan kerja,

kesehatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung perlu diketahui faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

Tabel 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2014-2015

Nama Kab/Kota	2014			2015		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2
Lampung Barat	13.70	1.82	0.36	14.18	2.37	0.56
Tanggamus	14.95	2.39	0.60	14.26	1.98	0.46
Lampung Selatan	16.77	2.14	0.47	16.27	2.66	0.71
Lampung Timur	17.05	2.87	0.72	16.91	2.51	0.63
Lampung Tengah	13.13	1.85	0.41	13.30	2.41	0.59
Lampung Utara	23.32	3.71	0.98	23.20	4.08	1.14
Way Kanan	15.03	2.03	0.42	14.61	2.18	0.49
Tulangbawang	8.66	1.61	0.46	10.25	1.84	0.51
Pesawaran	17.51	2.56	0.64	17.61	3.12	0.75
Pringsewu	9.83	1.15	0.21	11.80	1.40	0.25
Mesuji	6.57	0.77	0.17	8.20	1.04	0.24
Tulang Bawang Barat	7.12	0.74	0.14	8.23	1.48	0.36
Pesisir Barat	-	-	-	15.81	2.52	0.64
Kota Bandar Lampung	10.60	1.53	0.38	10.33	1.26	0.24
Kota Metro	10.82	1.74	0.46	10.29	1.54	0.37

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas maka persentase penduduk miskin yang paling tinggi adalah di Kabupaten Lampung Utara yaitu sebesar 23,32% pada tahun 2014 dan menurun di tahun 2015 menjadi 23,20%, hal ini kemungkinan besar dikarenakan penduduk miskin di daerah perkotaan yang belum dapat sepenuhnya mandiri dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan presentase penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Mesuji pada tahun 2014 sebesar 6,57 naik menjadi 8,20 pada tahun 2015 karena program pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji sudah berjalan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan mengenai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode 2014-2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan kecenderungan naik dari 2,23 di tahun 2014 menjadi 2,36 di tahun 2015. Ini artinya bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam usaha mengurangi kemiskinan belum cukup berhasil, walaupun secara nominal penduduk miskin masih berada di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan nilai P1 terbesar di Provinsi Lampung pada tahun 2014-2015 dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,71 di tahun 2014 dan 4,08 di tahun 2015, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang terkecil di tahun 2014 adalah Kabupaten Mesuji sebesar 0,77 dan di tahun 2015 Kabupaten Mesuji sebesar 1,04.

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara umum Indeks Kearifan Kemiskinan di Lampung cenderung menurun dari tahun 2014 dengan angka 0,53 menjadi 0,59 di tahun 2015. Kabupaten Lampung Utara memiliki Indeks Kearifan Kemiskinan terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebesar 0,98 di tahun 2014 dan meningkat menjadi 1,14 pada tahun 2015. Indeks kearifan terkecil dialami oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan indeks 0,14 (tahun 2014) menjadi 0,36 di tahun 2015.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Lampung tahun 2015 sebesar 31,2 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2015 mencapai 253,2 triliun rupiah.

Gambar 6 Laju Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Lampung dan Indonesia, 2011-2015



\*Angka sementara menggunakan System of National Accounts (SNA) 2008  
 Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

### **Kondisi Ketenagakerjaan**

Kondisi makro ketenagakerjaan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5, dimana jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari 5.759,2 ribu orang (tahun 2014) menjadi 5.842 ribu orang di tahun 2015, dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja maupun yang menganggur mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, 2014-2015

No	Uraian	2014		2015	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Penduduk 15+ (000)	5711.3	5759.2	5805.1	5842
2	Angkatan kerja (000)	4029.1	3857.9	4060.7	3832.1
	Bekerja	3824.2	3673.2	3921.1	3635.3
	Menganggur	204.8	184.8	139.5	196.9
3	Bukan Angkatan Kerja	1682.3	1901.2	1744.4	2009.9
	Sekolah	459.4	495.8	459.2	469.3
	Mengurus Rumah Tangga	1033.3	1187.3	1088.4	1318.6
	Lainnya	189.5	218.2	196.9	222
4	TPAK (%)	70.55	66.99	69.95	65.6
5	TPT (%)	5.08	4.79	3.44	5.14
6	Setelah Menganggur (000)	1456.2	1371.8	1411.2	1379.6
	SP Terpaksa	342.1	273.3	321.1	297.4
	SP Sukarela/Paruh Waktu	1114.1	1098.5	1089.9	1082.1

Sumber BPS Provinsi Lampung, 2016

Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja dalam setahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun dari 66,99 persen menjadi 65,60 persen. Turunnya TPAK ini merupakan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja, selain itu juga adanya kenaikan jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja. Dari dekomposisi penduduk usia kerja seperti ditunjukkan pada Tabel 5 di atas kenaikan jumlah terjadi pada aktivitas Bukan Angkatan Kerja yakni Mengurus Rumahtangga. Selama setahun terakhir penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga naik 131,3 ribu orang.

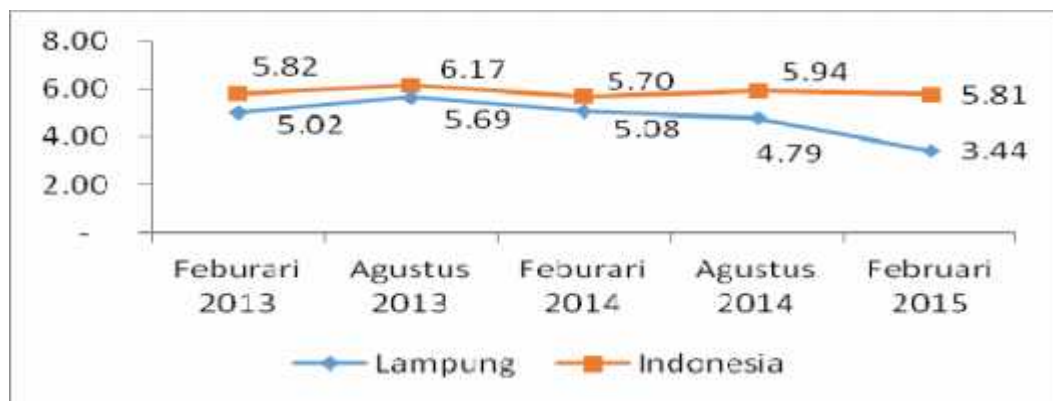
Gambar 7 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung, 2013-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah jumlah setengah pengangguran yakni mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu mengungkap dibalik status bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran yaitu yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela).

Gambar 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional, 2013-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Dilihat pada tabel 6 perbandingan kota-desa, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan (urban area). Sebanyak 7,17 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 81,8 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (rural area) tingkat pengangguran “hanya” 3,51 persen atau 101,7 ribu orang. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengangguran di perkotaan bertambah sebanyak 11,8 ribu orang. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran di perdesaan naik 32,2 ribu orang. Fenomena ini diduga berkaitan dengan menurunnya aktivitas sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di desa.

Tabel 6 Pengangguran Terbuka menurut Daerah di Provinsi Lampung, 2015

Daerah Tempat Tinggal	Februari 2015		Agustus 2015	
	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)
Perkotaan	70,0	5,70	82,1	7,82
Perdesaan	69,5	2,45	114,8	4,12
Total	139,5	3,44	196,9	5,14

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Disparitas gender pada data tabel 7 partisipasi angkatan kerja sangat timpang. TPAK laki-laki sebesar 86,16 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 50,17 persen. Kondisi ini berkaitan dengan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Laki-laki berperan sebagai pencari nafkah (*breadwinner*), sedangkan perempuan mengelola rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Dibandingkan keadaan Februari 2015, partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja mengalami kenaikan 0,06 poin sementara partisipasi perempuan turun 2,76 poin. Sementara itu, disparitas gender pada pengangguran direpresentasikan oleh TPT perempuan yang lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yakni 5,25 persen berbanding 4,15 persen. TPT yang tinggi pada perempuan mengindikasikan adanya potensi yang tinggi pada partisipasi kerja perempuan.

Tabel 7 Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung, 2015-2016

Uraian	Februari 2015		Agustus 2015	
	Absolut (000)	(%)	Absolut (000)	(%)
<b>Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>3 921,2</b>	<b>69,95</b>	<b>3 832,1</b>	<b>65,60</b>
Laki-laki	2 495,9	86,10	2 563,9	85,56
Perempuan	1 425,3	52,93	1 268,2	44,57
<b>Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>139,5</b>	<b>3,44</b>	<b>196,9</b>	<b>5,14</b>
Laki-laki	69,0	2,69	112,1	4,37
Perempuan	70,5	4,71	84,8	6,68

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

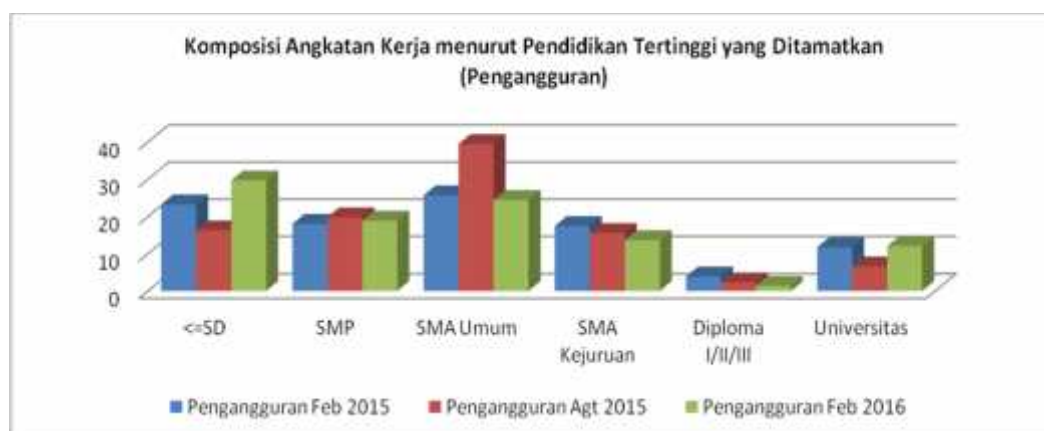
Berdasarkan pergeseran komposisi angkatan kerja menurut latar belakang pendidikan, persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma/sarjana) turun dari 2,28 persen menjadi 1,35 persen, dan sebaliknya pengangguran yang mengenyam pendidikan rendah (SMP ke bawah) naik turun dari 19,80 persen menjadi 18,88 persen. Sementara pada penduduk yang bekerja terlihat adanya sedikit penurunan pada pekerja yang berpendidikan rendah. Kondisi yang sama dialami oleh pekerja yang berpendidikan tinggi. Sementara pekerja yang berpendidikan Universitas (umum/kejuruan) mengalami peningkatan yakni dari 6,56 persen naik menjadi 12,02 persen sangat drastis peningkatannya sebesar 50 persen.

Tabel 8 Komposisi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja (%)		Pengangguran (%)	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD	46,07	46,37	23,26	16,30
SMP	22,29	23,42	18,00	19,80
SMA Umum	14,29	16,61	25,67	39,49
SMA Kejuruan	9,44	7,14	17,46	15,57
Diploma I/II/III	2,34	1,89	3,86	2,28
Universitas	5,57	4,57	11,74	6,56
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 9 Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016



Komposisi jumlah penduduk bekerja menurut jam kerja seluruhnya secara umum tidak mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk yang bekerja penuh (*full time worker*) atau penduduk yang bekerja 35 jam per minggu atau lebih mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu sebanyak 45,7 ribu orang (8,2 persen). Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu (pekerja tidak penuh) sedikit mengalami peningkatan sebesar 5 persen, demikian juga dengan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu mengalami peningkatan sebesar 8 persen.

Tabel 9 Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu di Provinsi Lampung, 2014-2015 (Ribu)

Jumlah jam kerja per minggu	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
1-7	59.2	54.9	83.7	48.8
8-14	213.3	185.4	201.5	219.3
15 – 24	611.8	603.1	562.5	554.3
25 – 34	571.9	528.4	563.5	557.2
1-34	1456.2	1371.8	1411.2	1379.6
0 dan ≥ 35	2368	2301.4	2510	2255.7
Jumlah	3824.2	3673.2	3921.2	3635.3

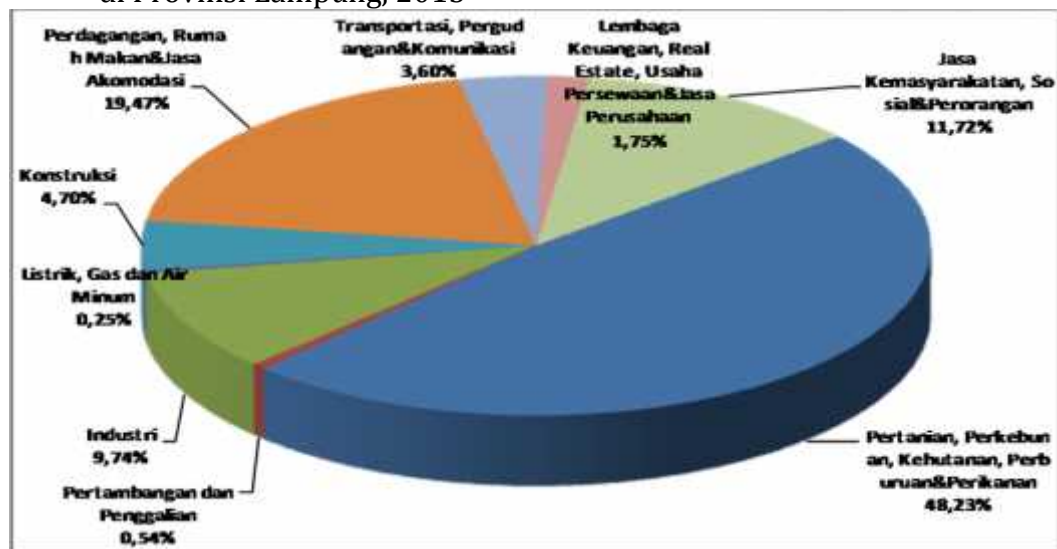
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Komposisi penduduk Lampung yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan utama sedikit mengalami perubahan dibanding keadaan Februari 2015. Sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 48,23 persen. Disusul dua lapangan pekerjaan lain yakni berturut-turut perdagangan/rumah makan dan jasa akomodasi (19,47 persen) serta jasa kemasyarakatan/sosial dan perumahan (11,72 persen). Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari 75 persen tenaga kerja di Lampung. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang dari 10 persen.

Dilihat tren sektoral, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun dibanding setahun yang lalu. Secara absolut, lapangan pekerjaan perdagangan, rumah makan & jasa akomodasi selama setahun yang lalu menyerap tenaga kerja paling banyak yakni 26,2 ribu

pekerja. Diikuti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan sebanyak 11,5 ribu pekerja. Sektor yang paling banyak mengalami drop out tenaga kerja adalah jasa kemasyarakatan, sosial & perorangan sebanyak 70,1 ribu pekerja.

Gambar 10 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Tabel 10 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, 2014-2015 (Ribu)

Lapangan Pekerjaan	Feb 2014	Agt 2014	Feb 2015	Agt 2015
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	1855.3	1795.2	1847.9	1773.1
Pertambangan & Penggalian	42.7	15.2	36.4	28.9
Industri	313.8	292.2	372.6	331.4
Listrik, Gas & Air Minum	3.2	4.5	4.3	5.8
Konstruksi	136.6	182.9	206.6	222.9
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	756.1	662.8	724.3	685.6
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	134.4	142.6	148	123.4
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	63.5	52.8	59.3	55.1
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	518.5	525	521.7	409
Total	3824.1	3673.2	3921.1	3635.2

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 11 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, 2014-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan Tabel 11 daerah perkotaan di Lampung didominasi tenaga kerja di sektor Perdagangan/Rumah Makan/Jasa Akomodasi serta sektor Jasa Kemasyarakatan/Sosial/Perorangan yakni 36,31 persen dan 20,61 persen, sedangkan daerah perdesaan lebih dari separuh tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian (60,59 persen). Sektor Pertambangan dan Penggalian di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan perkotaan, merepresentasikan sektor tersebut hanya berupa unit-unit usaha kecil seperti Galian C. Begitu juga dengan sektor industri yang jumlahnya jauh lebih banyak di perdesaan dibandingkan perkotaan menandakan banyaknya industri-industri kecil/industri rumah tangga.

Tabel 11 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Kota-Desa di Provinsi Lampung, 2015

Lapangan Pekerjaan	Absolut (ribu)		%	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	164.9	1694.4	15.58	60.59
Pertambangan & Penggalian	7.7	13.2	0.73	0.47
Industri	111.9	263.5	10.57	9.42
Listrik, Gas & Air Minum	6.8	2.9	0.64	0.1
Konstruksi	73.2	108	6.91	3.86
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	384.3	366.3	36.31	13.1
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	64.9	74	6.13	2.65
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	26.6	40.8	2.51	1.46
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	218.2	233.4	20.61	8.35
Total	1058.5	2796.5	99.99	100

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Dari seluruh penduduk bekerja pada Februari 2015 (Tabel 12), status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan (28,04 persen) dan diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap (20,32 persen) dan pekerja keluarga (18,46 persen). Dalam periode setahun terakhir bertambahnya jumlah tenaga kerja dialami oleh status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Penambahan tersebut didominasi pada pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yakni sebanyak 34,7 ribu pekerja.

Tabel 12 Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, 2015

Status Pekerjaan	2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha sendiri	629,0	680,2	742,6	606,2
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	835,3	765,5	777,7	762,9
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	135,6	114,1	124,0	136,2
Buruh/karyawan/pegawai	962,8	963,2	1046,2	924,3
Pekerja Bebas	428,0	208,1	480,2	497,2
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	833,5	942,1	750,6	708,5
<b>Total</b>	<b>3 824,2</b>	<b>3 673,2</b>	<b>3 921,2</b>	<b>3 635,3</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari enam kategori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya sebagian besar termasuk pekerja informal.

Ketimpangan kegiatan ekonomi formal dan informal terlihat signifikan di perdesaan dibanding perkotaan. Pada Februari 2015, jumlah pekerja informal di perdesaan mencapai 2.125,6 atau lebih dari tiga kali jumlah pekerja formal. Pekerja di sektor informal umumnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai ketrampilan khusus.

Kondisi ini terkait erat dengan rendahnya produktivitas di perdesaan. Sementara itu, jumlah pekerja formal dan informal di perkotaan relatif berimbang yakni sebanyak 532,8 ribu dan 625,5 ribu. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya peran sektor informal dalam kegiatan ekonomi di perkotaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi di Sumatera relatif bervariasi. Enam provinsi memiliki tingkat pengangguran di atas angka nasional, sementara empat provinsi lainnya termasuk Lampung memiliki tingkat pengangguran di bawah angka nasional (5,5 persen).

Angka TPT tertinggi dialami Kepulauan Riau yakni sekitar 9,03 persen, sedangkan terendah sekitar 3,84 persen terdapat di Bengkulu. TPT Lampung merupakan TPT terendah ketiga di Pulau Sumatera.

Tabel 13 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	TPT	TPAK
Bandar Lampung	8,51	61,77
Lampung Utara	7,62	65,29
Pesawaran	7,27	61,16
Tanggamus	5,72	68,48
Lampung Selatan	5,38	60,12
Tulang Bawang	5,29	63,13
Metro	5,12	60,36
Mesuji	5,06	62,91
Lampung Timur	4,49	67,4
Pringsewu	3,85	64,1
Lampung Barat	3,55	74,06
Way Kanan	3,53	68,45
Lampung Tengah	2,94	70,08
Tulang Bawang Barat	2,61	67,95
Pesisir Barat	0	0
Provinsi Lampung	5,14	65,6

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung mencakup kondisi umum ketenagakerjaan dan karakteristik penduduk bekerja. Hasil analisis diharapkan dapat bermanfaat untuk (1) Pengembangan ilmu, khususnya ilmu ekonomi pembangunan yang lebih aplikatif yang berkaitan dengan tenaga kerja; (2) Pengambil kebijakan, agar dapat memberikan bantuan untuk perumusan kebijakan guna mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung. Mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bekerja pada sektor pertanian dan pada status usaha sektor informal, dengan pendidikan umumnya SMP ke bawah dan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung adalah sebesar 65,6 persen pertahun dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,14 persen pertahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau perbandingan jumlah angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Pada tabel 13 dapat dilihat secara keseluruhan tingkat partisipasi angkatan kerja pada masing-masing Kabupaten/Kota berbeda-beda, dengan rata-rata TPAK sebesar 61,02%. Hal ini karena penduduk usia kerja di seluruh kabupaten/kota banyak yang tergolong angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Pekerja yang berada di daerah Provinsi Lampung banyak yang bekerja di sektor informal serta berpendidikan rendah, hal tersebut mengakibatkan upah yang didapat kecil dan berdampak pada masyarakat menjadi miskin.

## **2.2.2 Dimensi Pendidikan**

### **Rata-Rata Lama Sekolah**

Tingkat pendidikan merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam penurunan kemiskinan. Rata-rata lama sekolah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar. Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil sedangkan pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh paling besar.

Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan. Berdasarkan tabel 14 rata-rata lama sekolah di Indonesia meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dikarenakan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar dan komitmen pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan jangka panjang SDM yang berkualitas.

Tabel 14 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung, 2011-2015

Nama Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	7,46	7,47	7,47	7,25	7,56
Tanggamus	7,4	7,43	7,43	6,63	7,27
Lampung Selatan	7,49	7,5	7,57	7,01	6,86
Lampung Timur	7,58	7,6	7,76	7,16	7,20
Lampung Tengah	7,41	7,6	7,6	7,06	7,14
Lampung Utara	8,1	8,1	8,1	7,69	7,70
Way Kanan	7,32	7,33	7,36	6,76	7,32
Tulang Bawang	7,2	7,39	7,39	7,1	7,11
Pesawaran	7,51	7,53	7,57	7,21	7,23
Pringsewu	8,6	8,62	8,64	7,53	7,83
Mesuji	6,37	6,39	6,39	5,8	6,12
Tulang Bawang Barat	7,47	7,49	7,49	6,81	6,82
Pesisir Barat	*	*	7,71	7,36	7,47
Bandar Lampung	10,18	10,3	10,3	10,85	10,87
Metro	10,12	10,15	10,15	10,54	10,55
Lampung	7,82	7,87	7,89	7,48	7,56

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan tabel diatas rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 7,70 tahun, hal tersebut hampir sama dalam target dalam RPJMD Provinsi Lampung menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah hanya 7,70 tahun berarti tingkat pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP, program pendidikan 9 tahun belum optimal sehingga harus dioptimalkan melalui program pembangunan Provinsi Lampung.

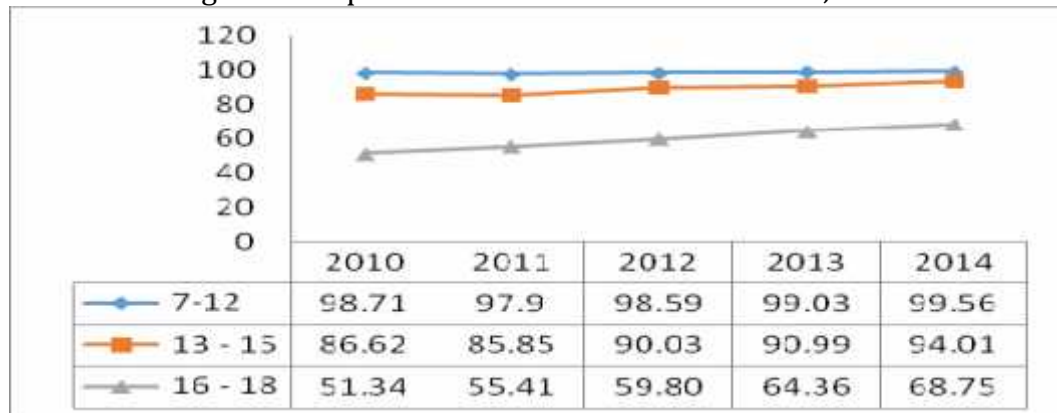
#### **Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang masih sekolah, terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur usia yang sama. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dan kelompok umur pada jenjang pendidikan



menengah 16-18 tahun. Pada gambar berikut disajikan APS menurut usia sekolah.

Gambar 12 Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah, 2010-2014

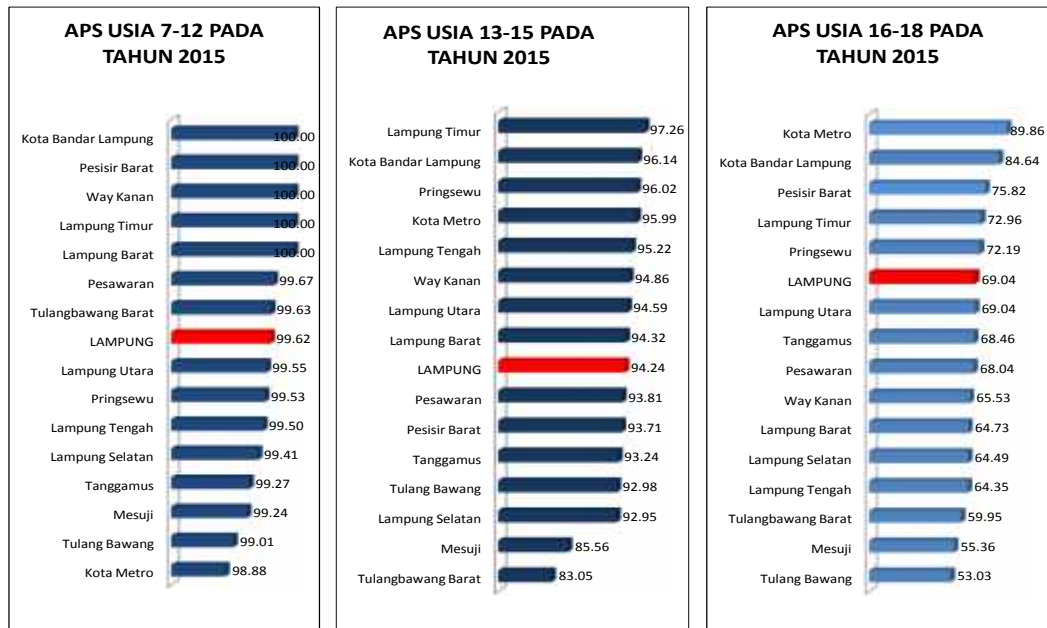


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun sudah menunjukkan persentase yang menggembirakan, yaitu sebesar 99,56 persen di tahun 2014 dengan tren yang fluktuatif sejak tahun 2010. Pada usia 13-15 tahun APS sebesar 94,01 persen, sedangkan APS usia 16-18 tahun hanya sebesar 68,75 persen. Angka partisipasi sekolah yang menurun seiring dengan kenaikan usia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan angka IPM. Penurunan ini mungkin dipengaruhi minimnya ketersediaan sarana pendidikan atau karena kondisi ekonomi rumah tangga yang masih kekurangan sehingga masih cukup banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada periode 2010-2014, APS Provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya pada setiap kelompok usia sekolah. Perkembangan APS untuk usia sekolah 7-12 tahun tidak mengalami peningkatan yang berarti karena tidak mencapai 100 persen. Namun kelompok usia ini bukanlah target utama untuk ditingkatkan angka partisipasi sekolahnya karena sudah hampir 100 persen anak sudah bersekolah. Perkembangan APS yang paling tinggi ada pada kelompok usia 16-18 tahun yang bertambah sekitar 4 persen tiap tahunnya. Akan tetapi, masih perlu ditingkatkan lagi karena APS pada kelompok usia ini baru mencapai 68,75 persen pada tahun 2014.

Gambar 13 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

Angka putus sekolah usia 7–12 tahun di Provinsi Lampung terendah pada Kota Metro sebesar 1,12%. Angka ini tergolong baik karena berada di bawah angka putus sekolah usia 7–12 tahun di tingkat Provinsi. Angka putus sekolah usia 13–15 tahun terendah pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 16,95 jauh di bawah provinsi sebesar 5,76, dan untuk angka putus sekolah usia 16-18 tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih banyak yang di bawah angka rata-rata yaitu ada 10 kabupaten/kota yang harus mendapat perhatian lebih dalam rangka mengurangi angka putus sekolah di Provinsi Lampung.

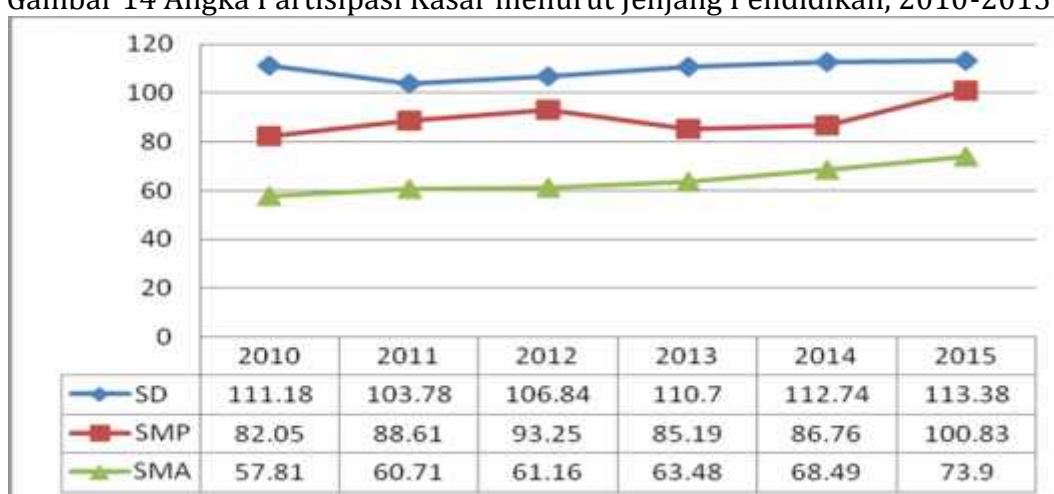
### **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut. Nilai APK mencerminkan partisipasi dan akses penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sebagai contoh terdapat anak-anak di bawah usia 6 tahun tetapi sudah bersekolah di tingkat SD atau anak usia 13 tahun masih bersekolah di SD.

Gambar 14 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2010-2015



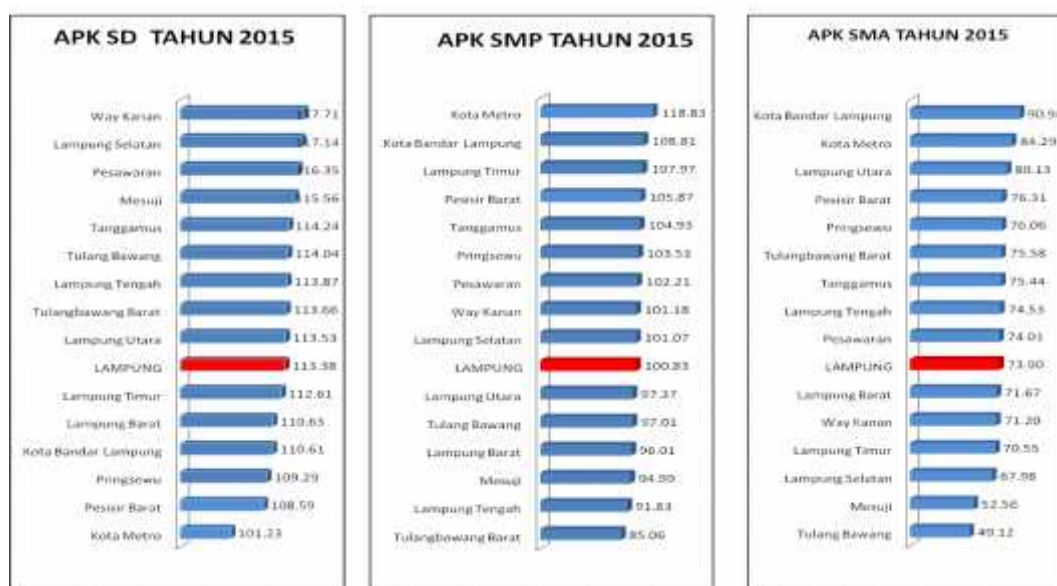
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan perkembangan capaian kinerja yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Capaian kinerja APK SD/MI/Paket A sempat mengalami fluktuasi nilai, dimana dengan tahun dasar 2013 yaitu 110,7%; tahun 2014 naik menjadi 112,74% dan pada akhir tahun 2015 turun menjadi sebesar 113,38%. Artinya selama 3 tahun tersebut APK jenjang SD/MI masih menunjukkan perkembangan kinerja yang baik walau sempat mengalami penurunan.

Perkembangan kenaikan capaian APK secara kontinyu terjadi pada jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun dasar 2013 sebesar 85,19% menjadi 86,76% pada tahun 2014. Capaian kinerja APK ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencapai tingkatan tuntas madya apabila dibandingkan dengan target

Provinsi Lampung sebesar 100,83%. Demikian pula untuk capaian APK jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA/MA/SMK dan Sederajat menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dari tahun dasar 2013 sebesar 63,48% meningkat menjadi 68,49% pada tahun 2014, dan tahun 2015 sebesar 73,90%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan pendidikan menengah juga semakin baik.

Gambar 15 APK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2015



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

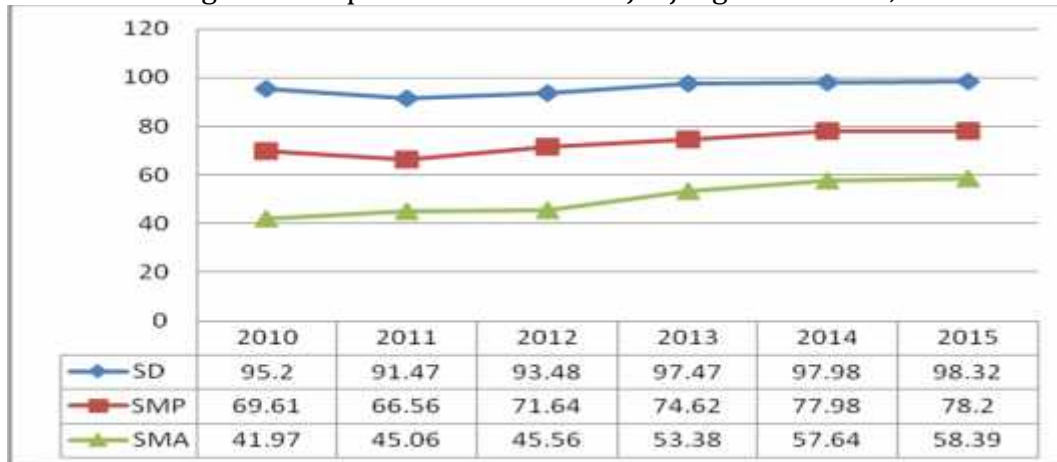
Kondisi APK SMA/MA di Provinsi Lampung pada tahun 2015 serupa dengan kondisi APM SMA/MA. APK SMA/MA di Kabupaten Tulang Bawang masih berada di bawah Provinsi. APK SMA/MA Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 73,90%, sedangkan APK SMA/MA di Tulang Bawang sebesar 49,12%. Gambar 15 menunjukkan APK SD, SMP, SMA di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2015.

### **Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM untuk mengukur anak yang bersekolah

tepat pada waktu dengan kata lain APM dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 16 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

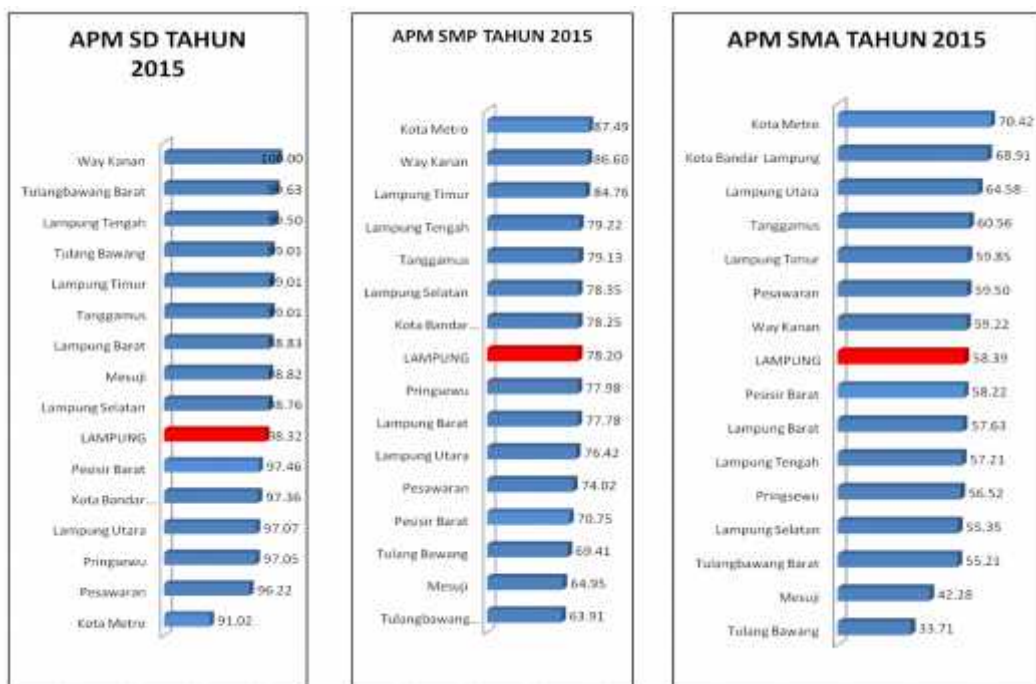
Demikian pula capaian kinerja pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan bahwa perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya nilai APM pada semua jenjang pendidikan tersebut karena komitmen pemerintah terhadap pendidikan dasar dan menengah sangat baik. Indikator terakhir yang digunakan adalah tingkat kelulusan dan dalam waktu 3 tahun terakhir, bahwa hampir seluruh jenjang pendidikan telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga mampu mencapai tingkat kelulusan sebesar 100%.

Nilai APM selalu lebih rendah dibanding nilai APK, hal ini disebabkan oleh murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, lulus lebih awal (kelas akselerasi), menunda/mempercepat saat mulai sekolah. Keterbatasan APM adalah tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun, lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat, selain itu referensi tanggal masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan dengan tanggal lahir dari semua kelompok yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni juga mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD penduduk usia 7-12 tahun mencapai 98,32%, APM pada jenjang pendidikan SMP 78,20% dan APM pada jenjang pendidikan SMA 58,39%.

APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. Dilihat dari angka putus sekolahnya di Provinsi Lampung yang diolah BPS 2015, menunjukkan potensi angka putus sekolah lebih besar pada wanita di jenjang pendidikan rendah yaitu SD dan sebaliknya potensi putus sekolah lebih besar pria pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi potensi putus sekolahnya. Angka putus sekolah pada jenjang SMP cukup tinggi yaitu 1,97% pria dan 1,01% wanita.

Gambar 17 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota, 2015



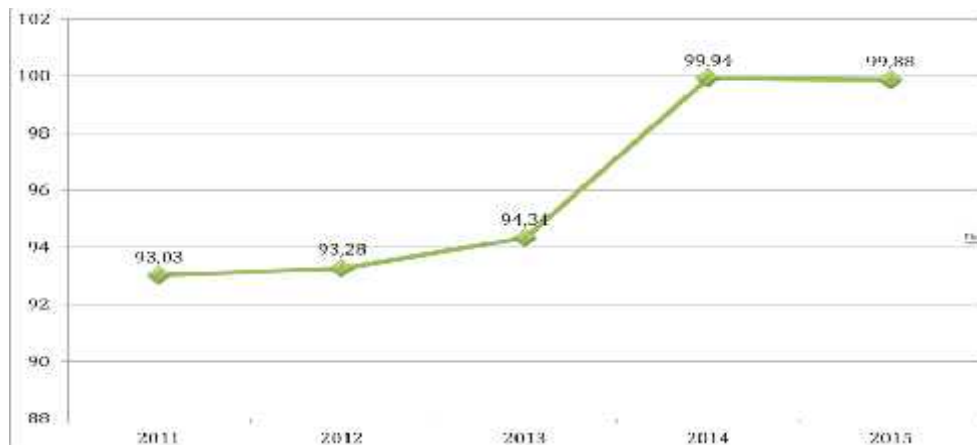
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

### Angka Buta Huruf 15+

Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Gambar grafik

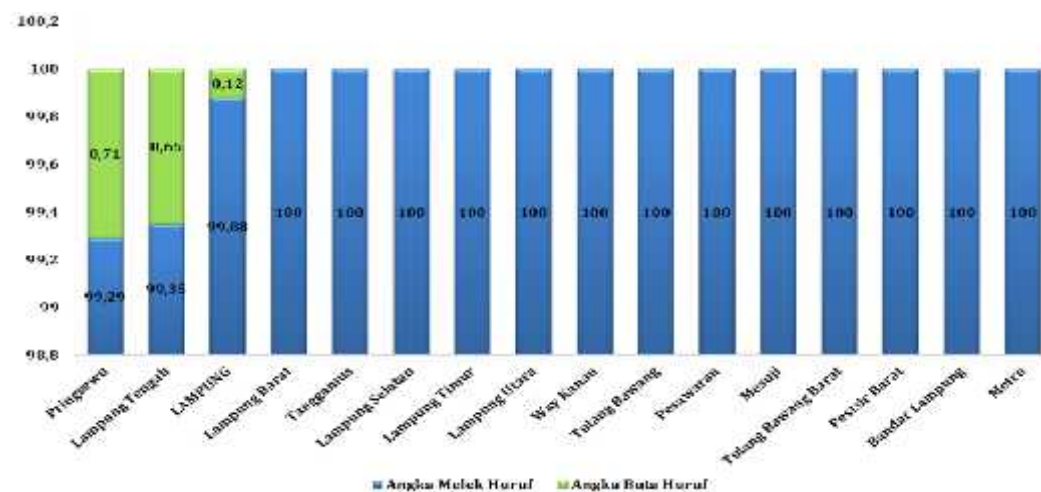
menunjukkan bahwa posisi AMH penduduk berusia 15–24 tahun dari tahun 2011 ke tahun 2015 bergerak dengan trend fluktuatif, dan terus membaik dari 93,03 persen di tahun 2011 menjadi 99,88 persen pada tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia 15-24 tahun (99,88 persen) sudah sangat dekat dengan target MDGs (100 persen). Bahkan AMH penduduk laki-laki berusia 15-24 tahun sudah mencapai 100 persen, adapun perempuan sebesar 99,94 persen.

Gambar 18 Angka Buta Huruf 15+, 2011–2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 19 Angka Buta Huruf 15+ Kabupaten Kota, 2015

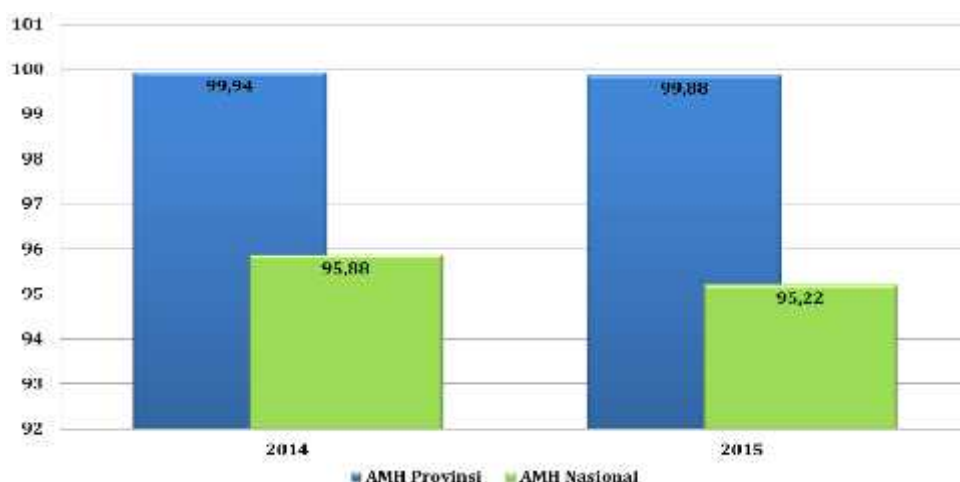


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 19 menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten dan kota, terdapat 2 (dua) kabupaten yang posisi AMH di bawah 100 persen yaitu

Pringsewu (99,29 persen) dan Lampung Tengah (99,35 persen), sedangkan capaian 13 kabupaten dan kota yang lain sesuai target (100 persen), termasuk kabupaten Pesisir Barat yang pada tahun 2014 belum memiliki data sendiri. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana terdapat 3 (tiga) kabupaten yang dibawah target capaian 100%. Membandingkan persentase AMH Provinsi dengan Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir (periode 2014-2015) juga mengindikasikan AMH Provinsi masih lebih baik (lihat Gambar 17) namun kondisi-kondisi ini tetap mengindikasikan bahwa target MDGs untuk AMH di Provinsi Lampung tidak tercapai.

Gambar 20 Angka Melek Huruf Umur 15-24 Tahun Provinsi dan Nasional, 2014-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Untuk indikator proporsi murid SD yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) Sekolah Dasar tidak ada data.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Provinsi Lampung untuk



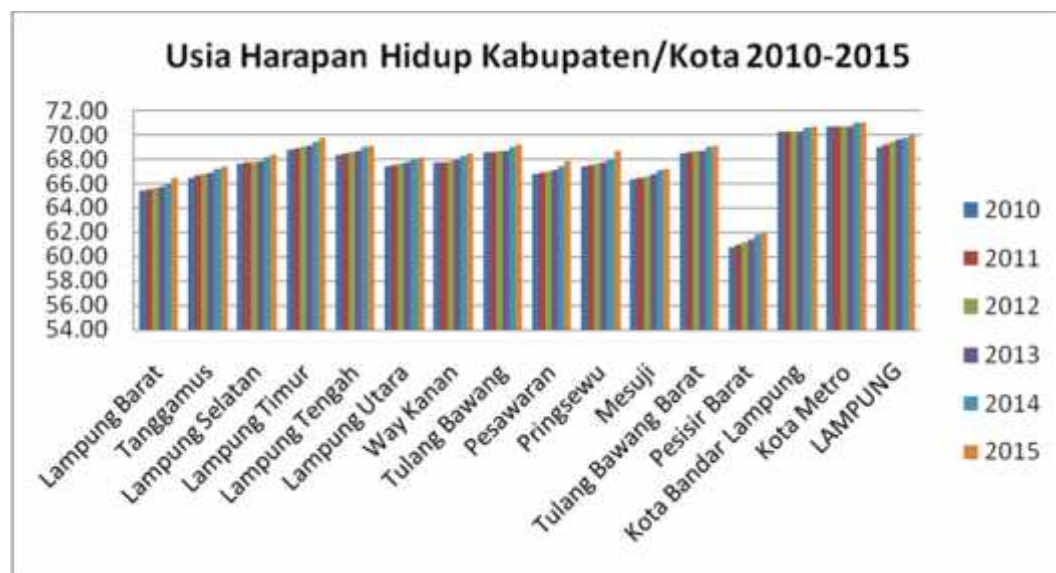
dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glogal serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masalah utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Lampung adalah biaya/ekonomi masyarakat yang rendah, akses antara lokasi rumah dan sekolah terlalu jauh, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal masih rendah.

### 2.2.3 Dimensi Kesehatan

#### *Usia Harapan Hidup*

Gambar 21 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota, 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

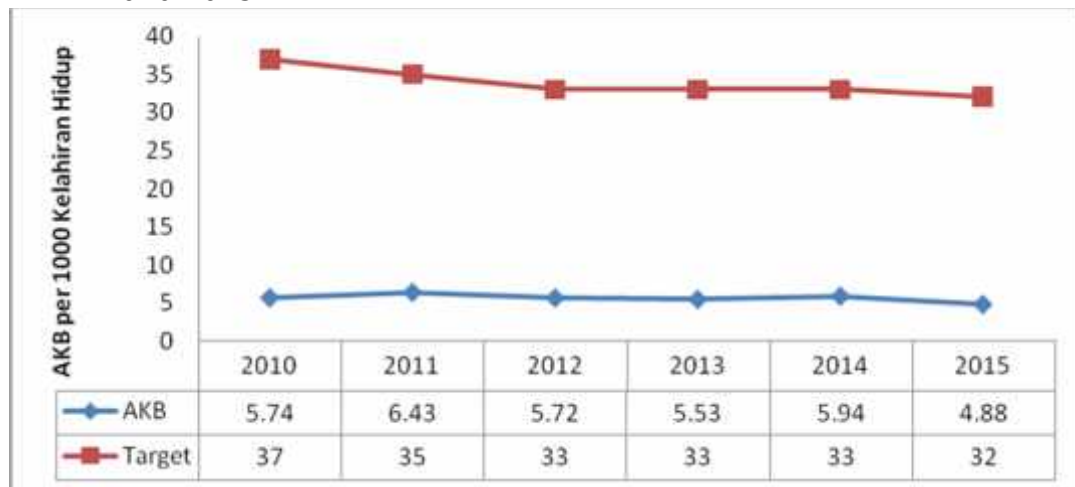
Angka Harapan Hidup terendah pada Kabupaten Pesisir Barat 62.04 tahun, dan tertinggi pada Kota Metro sebesar 70.98 tahun ini artinya sangat jauh sekali ketimpangan anantara Kabupaten terendah dan tertinggi, dimana untuk rata-rata angka harapan hidup provinsi 69,90 artinya Pesisir Barat masih jauh terendah dibawah provinsi. AHH Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai 69,90 dan hal ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir hidup di Provinsi Lampung mempunyai harapan untuk bertahan hidup sampai usia 70 tahun.

Target dalam RPJMD sampai dengan tahun 2019 adalah 72 tahun, untuk itu pemerintah harus mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

### **Angka Kematian Bayi**

Gambar 22 Perbandingan Angka Kematian Bayi Lampung dan Indonesia, 2010-2015



Sumber: Riskesdas, 2015

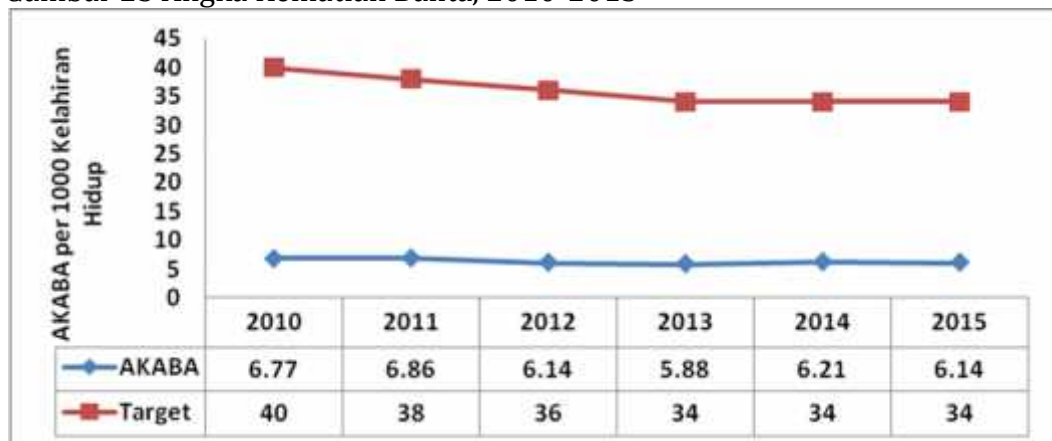
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan matematik tidak dapat menggambarkan AKB yang sesungguhnya ada di populasi karena AKB ini dihitung berdasarkan kasus kematian bayi yang dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan saja (tidak mencakup semua kematian yang ada di populasi). Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa AKB berdasarkan perhitungan matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah tercapai, namun Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup tahun 2015 di Provinsi Lampung sebesar 4,88 per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan AKB di populasi atau dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012.

Data AKB hasil perhitungan dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan

tidak menggambarkan kematian yang ada di populasi. Bila data AKB hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKB hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup maka AKB hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKB sesungguhnya dipopulasi AKB yang dihitung berdasarkan laporan data rutin tidak menggambarkan AKB yang sesungguhnya di populasi dan tidak dapat dibandingkan dengan AKB hasil Survey (SDKI). AKB berdasarkan hasil perhitungan hanya menggambarkan seperenam dari AKB yang dihasilkan dari Survey (SDKI). Hal ini terjadi karena data rutin

### **Angka Kematian Balita**

Gambar 23 Angka Kematian Balita, 2010-2015



Sumber: Riskesdas, 2015

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa AKABA berdasarkan perhitungan matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah mencapai target namun data Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 lahir hidup tahun 2015 di Provinsi Lampung sebesar 6,14 per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan atau dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012. Data AKABA hasil perhitungan dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian balita (usia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun) yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak menggambarkan kematian yang ada di populasi.

Bila data AKABA hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKABA hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 38 per 1000 kelahiran hidup maka AKABA hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKABA sesungguhnya dipopulasi. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan matematik tidak dapat menggambarkan AKB yang sesungguhnya ada di populasi karena AKB ini dihitung berdasarkan kasus kematian bayi yang dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan saja (tidak mencakup semua kematian yang ada di populasi). Pemantauan yang dilakukan dalam masa anak balita atau usia 1 - <5 tahun adalah dengan melihat capaian kunjungan anak balita. Selama masa ini anak balita dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, dimana setiap tahunnya anak balita minimal mendapatkan 8 jenis pelayanan.

### ***Angka Kematian Ibu***

Angka Kematian Ibu per 100.000 penduduk Nasional berdasarkan SDKI 2012 sebesar 359 per 100.000 (AKI untuk provinsi Lampung tidak tersedia datanya dari SDKI karena keterbatasan sampel SDKI). Bila dilihat berdasarkan kasus kematian ibu selama empat tahun dari 2011 – 2015 terlihat berfluktuasi, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

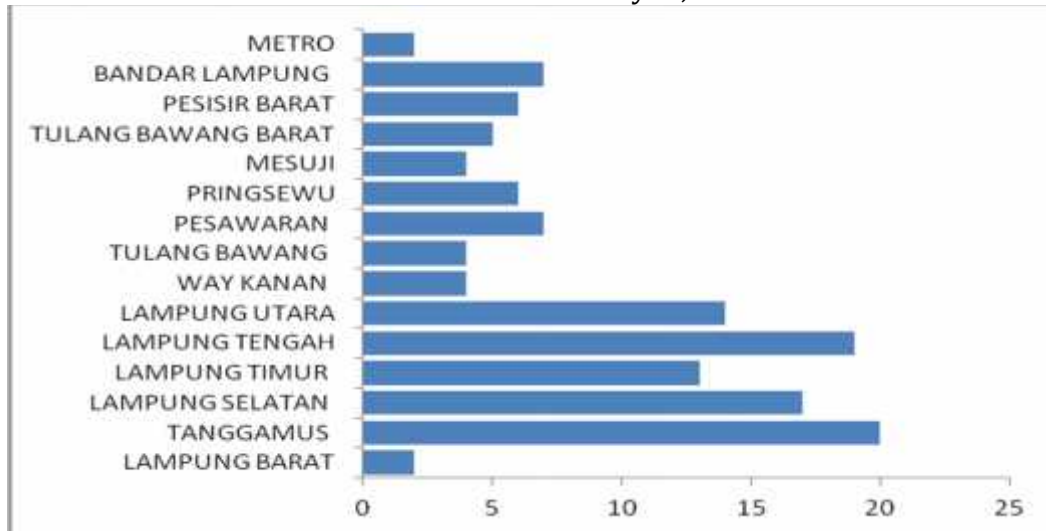
Gambar 24 Tren Kasus Kematian Ibu, 2011 – 2015



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas terlihat kasus kematian ibu sempat meningkat pada tahun 2012 namun kemudian turun pada tahun 2014 menjadi 130 kasus tetapi meningkat kembali pada tahun 2015 yaitu 149 kasus kematian ibu.

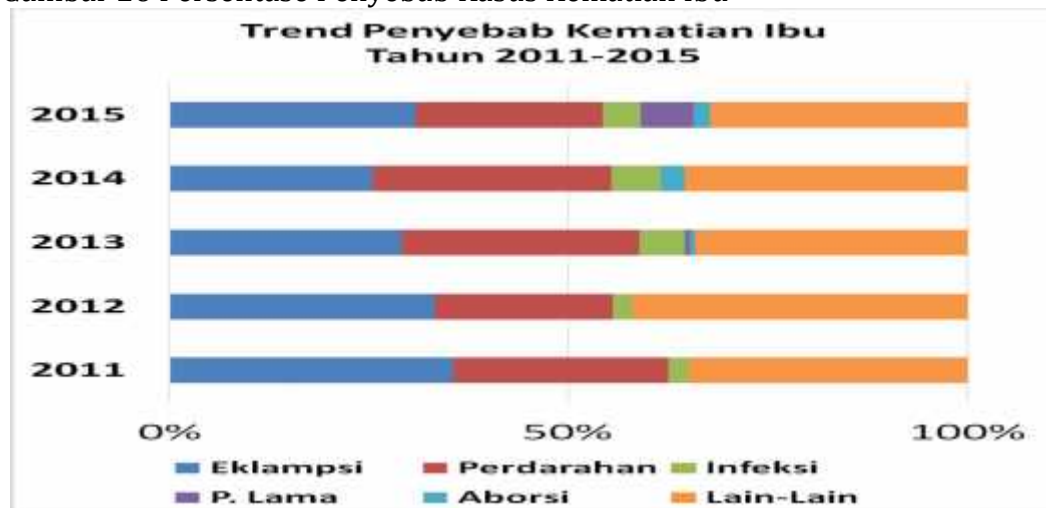
Gambar 25 Kasus Kematian Ibu menurut Wilayah, 2015



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kasus kematian ibu ada di semua kabupaten dan kota dan yang tertinggi ada di Tanggamus sebanyak 20 kasus dan terendah ada di Metro dan Lampung Barat sebanyak 2 kasus.

Gambar 26 Persentase Penyebab Kasus Kematian Ibu



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015

Penyebab kasus kematian ibu di Provinsi Lampung pada tahun 2015 didominasi oleh eklamsia dan perdarahan. Rendahnya kesadaran

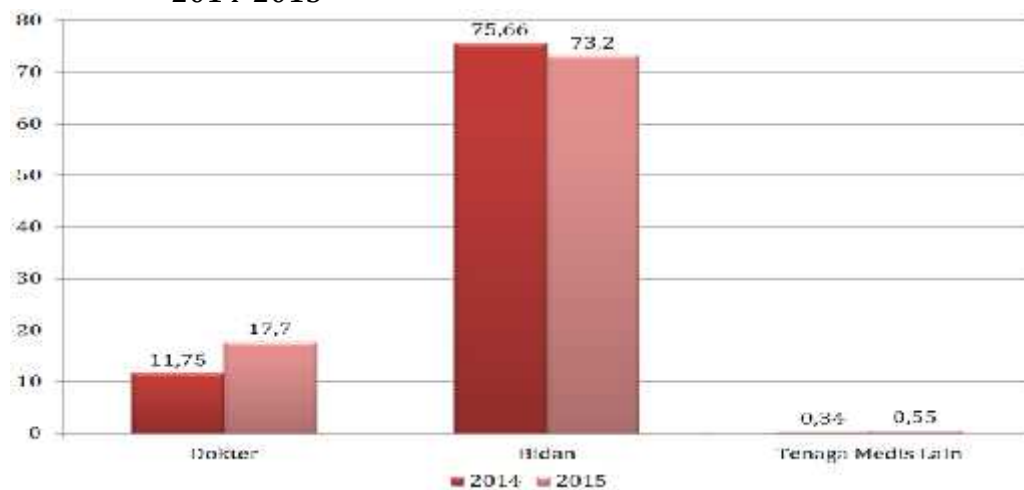
masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul. Yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting. Misalnya, pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Kaum lelaki juga dituntut harus berupaya ikut aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.

Grafik diatas menunjukkan distribusi persentase penyebab kematian ibu melahirkan, berdasarkan data tersebut bahwa tiga faktor utama penyebab kematian ibumelahirkan yakni pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre eklamsia dan infeksi. Persentase tertinggi penyebab kematian ibu yang adalah eklamsia, kejang bisa terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) yang tidak terkontrol saat persalinan. Hipertensi dapat terjadi karena kehamilan, dan akan kembali normal bila kehamilan sudah berakhir. Namun ada juga yang tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil, sedangkan Pendarahan menempati persentase kedua penyebab kematian ibu, anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu.

Di Provinsi Lampung paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10

persen sampai hampir 60 persen. Walaupun seorang perempuan bertahan hidup setelah mengalami pendarahan pasca persalinan, namun ia akan menderita akibat kekurangan darah yang berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan.

Gambar 27 Persentase Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung, 2014-2015

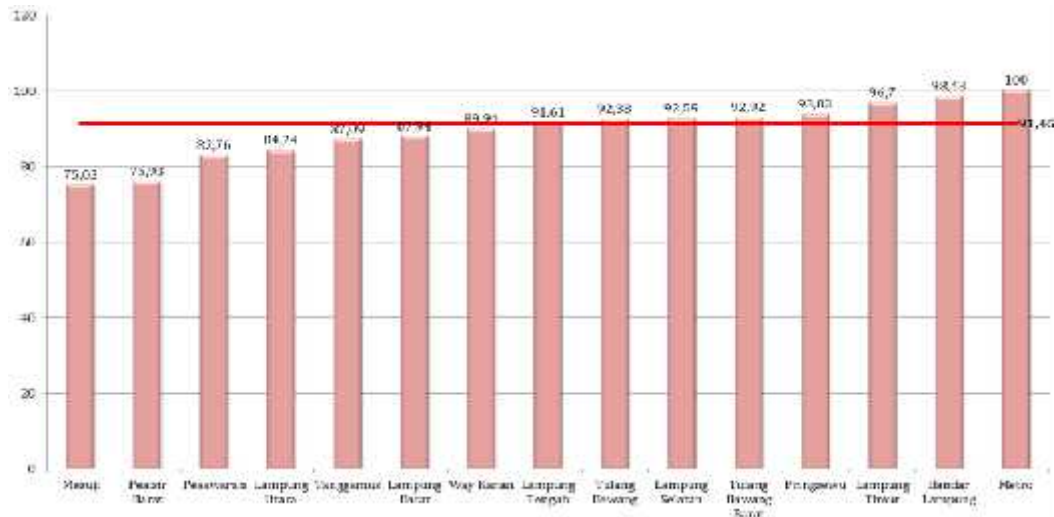


Sumber: BPS Provinsi Lampung Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2015

Gambar 23 menunjukkan bahwa dalam periode 2 (dua) tahun terakhir (2014 dan 2015) tenaga kesehatan Bidang/Perawat merupakan Penolong Kelahiran Terakhir tertinggi di Provinsi Lampung dengan kisaran sekitar 73-75 persen, disusul oleh Dokter Kandungan dan Dokter Umum (11-17 persen), dan tenaga medis lainnya (<1 persen). Adapun terkait dengan disparitas antar-kabupaten/kota, data tahun 2015 memberikan gambaran bahwa disparitas antar-kabupaten/kota masih cukup lebar, yaitu antara 75,03 persen di kabupaten Mesuji dan 100 persen di kota Metro yang terkait dengan perbedaan akses kepada tenaga medis seperti bidan. Di daerah-daerah dengan densitas penduduk rendah dengan hambatan geografis yang tinggi seperti kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Utara dan Lampung Barat persalinan oleh nakes relatif rendah dikisaran 67-75 persen, sementara di daerah dengan densitas penduduk tinggi dengan akses transportasi mudah seperti di kota Bandar Lampung dan Metro, persalinan terhadap nakes cukup tinggi 98 persen hingga 100 persen (Gambar 24).

Untuk kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat, persentase tertinggi Penolong Proses Kelahiran Non Tenaga Kesehatan adalah Dukun Beranak atau Perajin dengan masing-masing persentase 23,85 persen dan 23,32 persen.

Gambar 28 Persentase Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih per Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2015

Peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan dampak dari dukungan program baik Pusat ataupun Daerah seperti menempatkan bidan di setiap desa, program Desa Siaga, dan lain-lain. Untuk mewujudkan “akses kesehatan reproduksi bagi semua” atau *universal access of reproductive health* maka pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi harus tersedia, terjangkau, dan memenuhi kebutuhan semua orang, yaitu: (1) mudah dan aman serta terjangkau oleh semua orang, (2) tersedia bagi masyarakat miskin dengan biaya murah; dan (3) peka terhadap nilai sosial, kultural, agama dan nilai-nilai lokal lainnya. Terkait, di tingkat Provinsi, salah satu program unggulan di bidang kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan Keliling atau *Mobile Clinic*.



### ***Gizi Buruk dan Gizi Kurang***

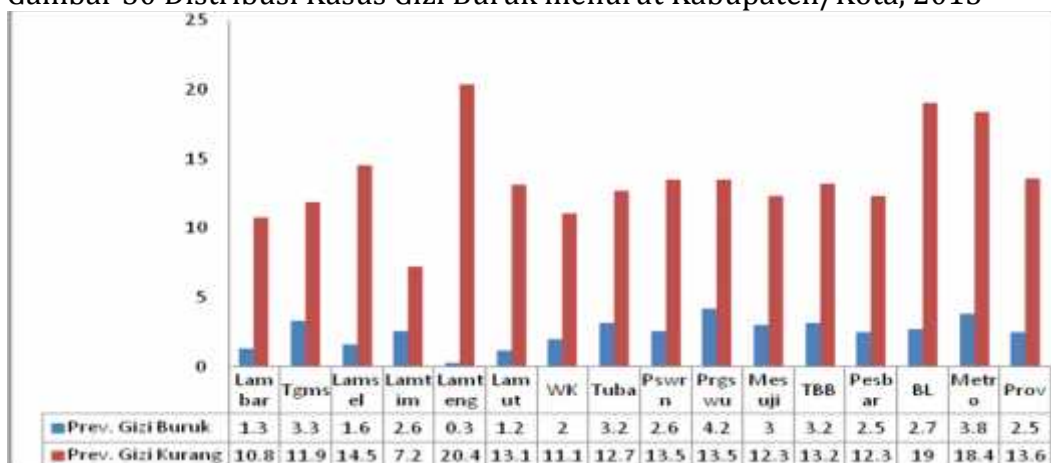
Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang selama tahun 2011 – 2015 cenderung menurun yaitu dari 225 tahun 2011 menurun menjadi 186 pada tahun 2012, dimana angka ini belum merupakan target yang tidak diharapkan. Bila dilihat secara detil untuk gizi kurang selama 4 tahun terakhir kasus gizi buruk terus menurun dari tahun 2011-2014 yaitu dengan rata-rata turun menjadi 0.25%. Pada tahun 2015 jumlah kasus gizi buruk meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor, meningkatnya jumlah kasus sebanyak 8 kasus ini sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung karena ditakutkan terus meningkat dari tahun ketahun. Lebih lengkap lihat gambar berikut:

Gambar 29 Tren Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk, 2011 – 2015



Sumber: *Riskedas 2015*

Gambar 30 Distribusi Kasus Gizi Buruk menurut Kabupaten/Kota, 2015



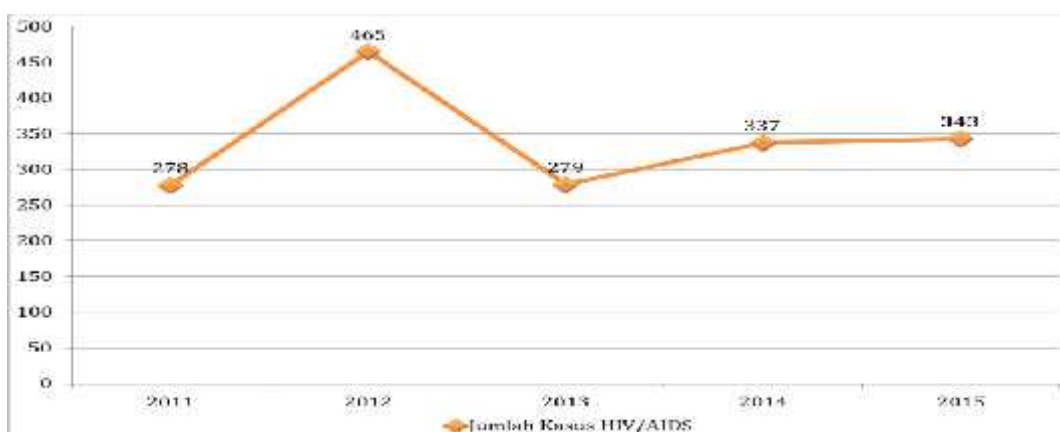
Sumber: *Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015*

Berdasarkan grafik (gambar 30) di atas terlihat distribusi kasus gizi buruk di kabupaten/kota se-Lampung. Tabel di atas menggambarkan bahwa prevelensi gizi buruk yang tertinggi di Kabupaten Pringsewu sebesar 4,2 dan terendah pada Kabupaten Lampung Tengah 0,3. Sedangkan prevelensi Gizi Kurang tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah 20,4 dan terendah di Kabupaten Lampung Timur sebesar 7,2.

### ***Kasus HIV/AIDS***

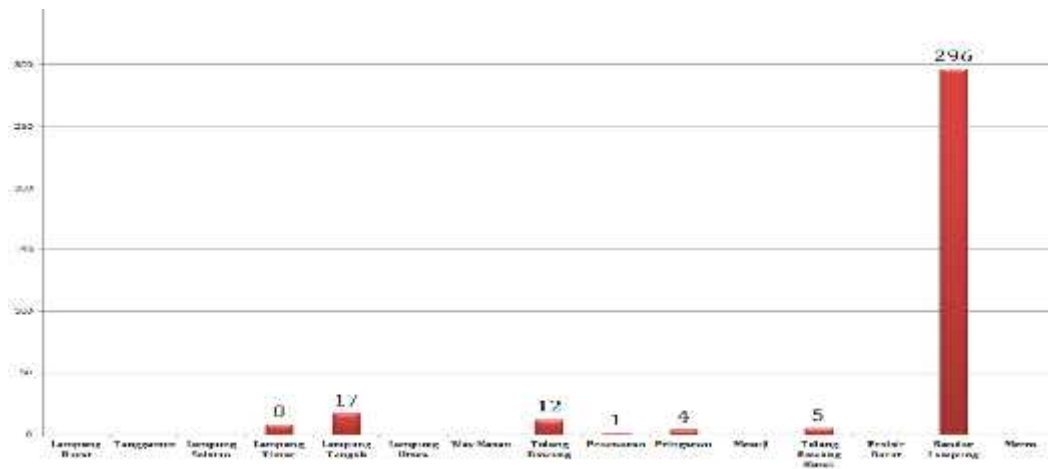
Prevalensi HIV dan AIDS di provinsi Lampung sebesar 0,04 persen pada tahun 2015, dengan jumlah kasus yang dilaporkan di tahun 2015 berjumlah 343 kasus. Besaran prevalensi HIV dan AIDS di Provinsi Lampung Tahun 2015 sudah sesuai target MDGs, yaitu dibawah 0.5 persen. Gambar 6.1 menunjukkan perkembangan kasus HIV dan AIDS di Provinsi Lampung dalam periode 5 (lima) tahun 2011 - 2015. Peningkatan kasus HIV tertinggi terjadi di tahun 2012, dari 278 kasus menjadi 465 kasus di tahun 2012, menurun di tahun 2013 (279 kasus) namun meningkat kembali di tahun 2014 dan 2015 dengan 337 kasus dan 343 kasus. Untuk sebaran jumlah kasus di tahun 2015 tertinggi tercatat di Kota Bandar Lampung dengan 296, dengan 8 (delapan) kabupaten dan kota tidak ada kasus yang dilaporkan (Gambar 31).

Gambar 31 Jumlah Kumulatif Kasus HIV dan AIDS di Provinsi Lampung, 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 32 Distribusi Kasus HIV/AIDS per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

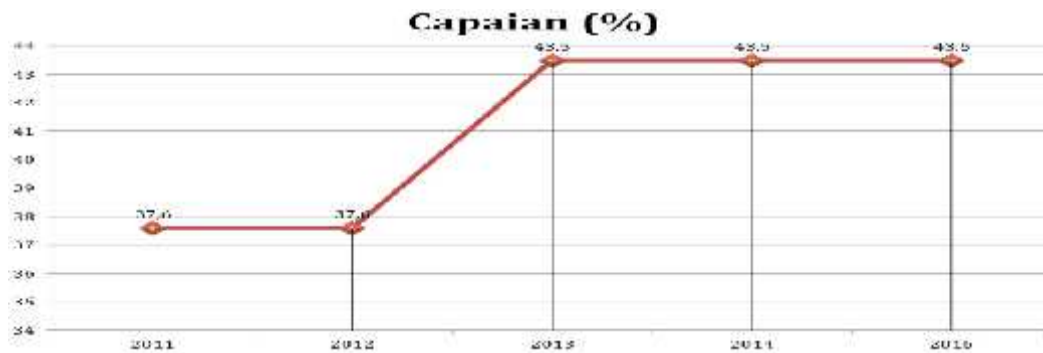


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Untuk mengendalikan laju penularan kasus HIV dan AIDS, dilakukan berbagai upaya *preventive* diantaranya adalah penggunaan kondom pada hubungan seksual berisiko tinggi menularkan HIV dan AIDS, akan tetapi upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil dari Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2013 menunjukkan penggunaan kondom pada populasi berisiko mencapai angka 43,52 persen (Gambar 32).

Upaya lain yang juga dilakukan untuk menekan laju penularan penyakit HIV dan AIDS adalah dengan meningkatkan pengetahuan penduduk melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Berdasarkan *rapid survey* pada tahun 2014 triwulan ke-3, dan diperkuat data Dinas Kesehatan tahun 2015, tingkat pengetahuan masyarakat pada usia 15-24 tahun yang memiliki tingkat pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS masih sangat rendah yaitu 21 persen dan jauh dari target MDGs 95 persen (Gambar 30).

Gambar 33 Penggunaan Kondom pada Populasi Beresiko, 2011-2015



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

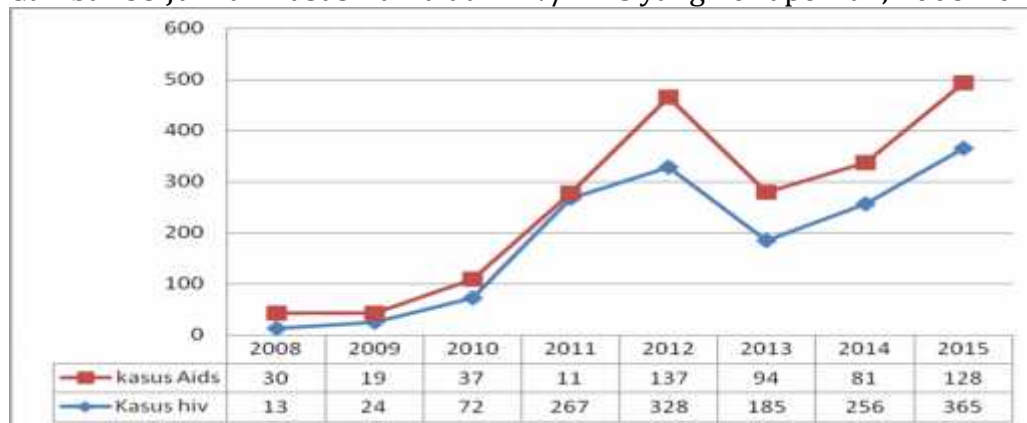
Gambar 34 Persentase Penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS, 2011-2015



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

Jumlah kasus HIV AIDS yang dilaporkan dari seluruh kabupaten/kota tahun 2008 sampai dengan 2015 sejumlah 2047 kasus, dimana kasus AIDS dilaporkan sejumlah 1510 kasus dan HIV sejumlah 537 kasus.

Gambar 35 Jumlah Kasus Kumulatif HIV/AIDS yang Terlaporkan, 2008-2015



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

### ***Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)***

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk selama tahun 2004-2015 terlihat berfluktuasi dan angka kesakitan ini masih tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan yaitu 55 per 100.000 penduduk.

Tabel 15 Angka Kesakitan dan Jumlah Kasus DBD, 2004-2015

<b>Tahun</b>	<b>Kasus DBD</b>	<b>Meninggal</b>	<b>IR DBD Per 100.000 Penduduk</b>	<b>CFR (%)</b>	<b>ABJ</b>
2004	912	14	13,19	1,54	64,93
2005	696	10	9,97	1,46	67,61
2006	1.402	14	18,94	1,02	83,77
2007	4.470	24	61,32	0,50	91,21
2008	4.869	39	65,28	0,80	61,40
2009	1.862	20	24,85	1,05	74,93
2010	1.714	29	22,88	1,69	NA
2011	1.328	17	20,03	1,3	68,51
2012	5.207	38	68,44	0,72	81
2013	4.510	49	58,08	0,98	69,8
2014	1.350	22	16,82	1,63	48
2015	2.996	31	16,80*	1,03	48*

\*2014

Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan jenis penyakit menular yang mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga dipandang perlu menempatkan DBD sebagai salah satu indikator dari Tujuan 6 RAD MDGS meskipun pada dasarnya DBD tidak termasuk dalam salah satu indikator pada Tujuan 6 RAN MDGs. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk selama tahun 2011 - 2015 terlihat berfluktuasi dan angka kesakitan ini masih tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan yaitu 55 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD tahun 2015 adalah sebesar 38,51 per 100.000 penduduk, dengan angka kematian 1,21 persen. Angka kesakitan di tahun 2015 (38,51) merupakan hasil peningkatan yang signifikan dibandingkan angka di tahun 2014 yang sebesar 16,82 persen, namun jika melihat data tahun 2010 (22,88 persen) maka angka ditahun 2015 menunjukkan peningkatan (tabel 15).

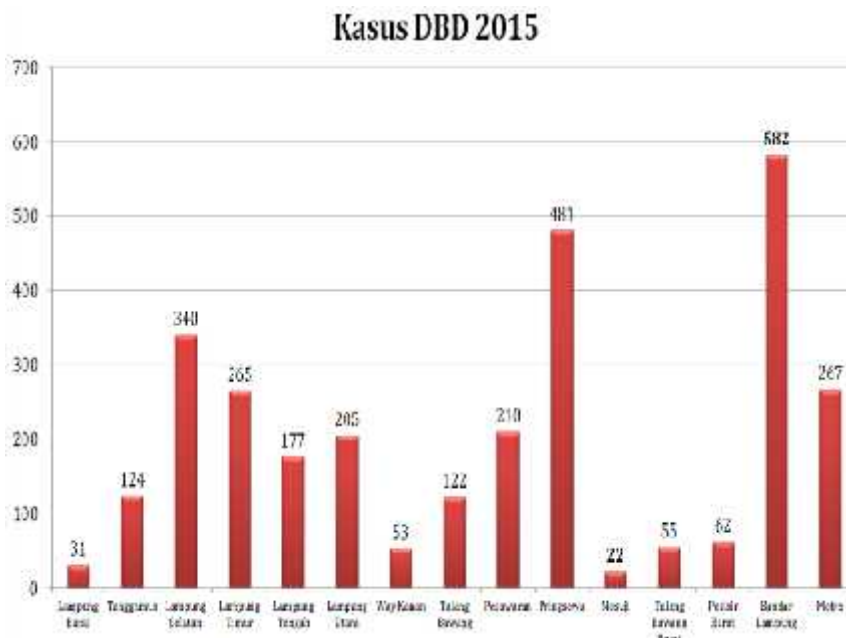
Gambar 36 Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung, 2009-2015



Sumber: Laporan Rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

Dilihat berdasarkan sebaran kasus di kabupaten/kota, maka seluruh (15) kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki catatan kasus DBD, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan angka kasus DBD tertinggi dan yang terendah ada di kabupaten Mesuji (Gambar 37).

Gambar 37 Kasus DBD per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2016

Jaminan kesehatan di Indonesia saat ini memang tak selalu diidentikkan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan

Ketenagakerjaan. Program penjamin kesehatan masyarakat yang berasal dari pemerintah ini memang dinilai memberikan alternatif atau solusi lain untuk masyarakat supaya bisa hidup sehat selalu. Dengan adanya BPJS Kesehatan biaya pengobatan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung menjadi tertangani. Meskipun sistem dan mekanisme BPJS Kesehatan di beberapa sisi masih nampak sulit dan rumit, namun pemerintah beserta segenap pihak yang terkait terus berusaha membenahi dan memperbaiki sistem agar tercipta layanan yang baik dan kepuasan bagi para peserta BPJS.

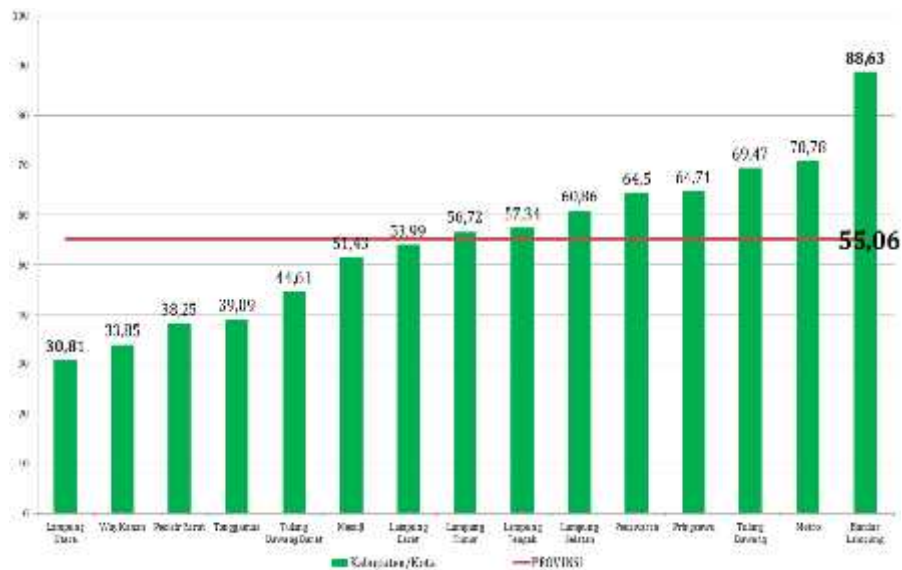
Masalah yang terjadi di Provinsi Lampung adalah persoalan gizi buruk dan kurang, cakupan pelayanan dan kualitas SDM yang belum memenuhi standar nasional kesehatan, cakupan pelayanan puskesmas yang masih terbatas, serta trend pergeseran penyakit. Usaha-usaha preventif dan promotif seperti gizi, sanitasi, konseling genetika, asuransi, dan estetika termasuk di dalamnya telah diatasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

#### **2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar**

##### ***Ketersediaan Air Minum Layak***

Gambar 38 memperlihatkan persentase rumah tangga dengan ketersediaan air minum layak di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2015, dimana persentase di tingkat Provinsi sebesar 55,06 persen. Dengan sebaran persentase terendah 30,81 persen (kabupaten Lampung Utara) dan tertinggi di kota Bandar Lampung sebesar 88,63 persen. Dua daerah dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak adalah kota Bandar Lampung dan kota Metro. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di daerah perkotaan dimungkinkan karena fasilitas di perkotaan lebih tersedia, khususnya untuk air minum ledeng.

Gambar 38 Akses Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015, BPS Lampung, p.197

### ***Ketersediaan Sanitasi Layak***

Gambar 39 memperlihatkan proporsi rumah tangga berkelanjutan terhadap sanitasi layak di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2015, dimana persentase di tingkat Provinsi sebesar 44,83 persen. Dengan sebaran persentase terendah 22,18 persen (kabupaten Lampung Barat) dan tertinggi di kota Bandar Lampung sebesar 89,88 persen. Dua daerah dengan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah kota Bandar Lampung dan kota Metro.

Mempertegas data diatas, jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, proporsi rumah tangga berkelanjutan terhadap sanitasi layak lebih besar di perkotaan dimana rata-rata persentase akses sanitasi layak di perkotaan adalah 73,55 persen, sedangkan di perdesaan hanya 36,90 persen. Adapun sebaran akses sanitasi layak menurut daerah tinggal, perkotaan dan perdesaan, menurut kabupaten/kota tahun 2015 menunjukkan bahwa akses sanitasi layak di perkotaan tertinggi adalah di kota Bandar Lampung sebesar 92,91 persen dan terendah kabupaten Lampung Barat (19 persen), capaian



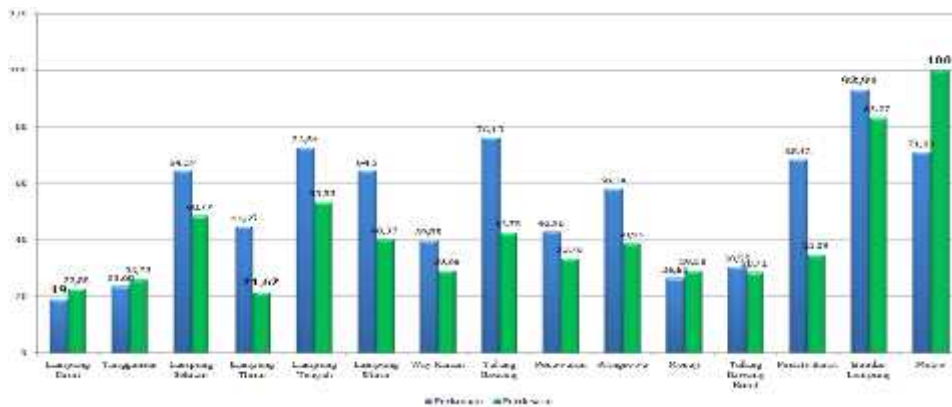
100 persen atau tertinggi untuk akses sanitasi layak di wilayah perdesaan adalah kota Metro dan yang terendah adalah kabupaten Lampung Timur dengan persentase akses sanitasi layak 21,62 persen (Gambar 36).

Gambar 39 Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015, BPS Lampung, p.197

Gambar 40 Akses Sanitasi Layak menurut Daerah Tinggal per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015, BPS Lampung, p.180-81(data diolah)

### **Ketersediaan Listrik bagi Rumah Tangga**

Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya yang dihasilkan dari listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya, seperti petromak, pelita, sentir ataupun obor. Berdasarkan data Susenas, penerangan listrik yang dimaksud adalah penerangan listrik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN, untuk

penerangan yang bersumber dari PLN termasuk juga rumah tangga yang menggunakan listrik tanpa meteran ataupun menyambung dari rumah tangga lain.

Tabel 16 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Ketersediaan Listrik PLN dan Non-PLN, 2015

Kabupaten/Kota	JUMLAH RUMAH TANGGA	PELANGGAN RUMAH TANGGA PLN	RUMAH BERLISTRIK NON PLN	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
Lampung Barat	71.007	44.914	23.274	63.25	96.03
Tanggamus	140.696	94.625	9.929	67.25	74.31
Lampung Selatan	242.402	220.827	-	91.10	91.10
Lampung Timur	265.221	209.481	-	78.98	78.98
Lampung Tengah	329.793	252.340	-	76.51	76.51
Lampung Utara	152.404	136.770	-	89.74	89.74
Way Kanan	111.050	79.259	15.229	71.37	85.09
Tulang Bawang	111.030	79.672	14.640	71.76	84.94
Pesawaran	110.821	79.844	800	72.05	72.77
Pringsewu	99.569	83.831	-	84.19	84.19
Mesuji	53.713	30.041	19.204	55.93	91.68
Tulang Bawang Barat	69.968	37.895	10.606	54.16	69.32
Pesisir Barat	42.982	15.783	-	36.72	36.72
Bandar Lampung	224.198	243.535	-	108.62	108.62
Metro	38.964	45.813	-	117.58	117.58
<b>Total</b>	<b>2.063.818</b>	<b>1.654.630</b>	<b>93.682</b>	<b>80.17</b>	<b>84.71</b>

Sumber: Distamben provinsi Lampung 2016

Perpindahan penduduk yang tinggal di desa ke wilayah perkotaan merupakan yang fenomena yang sering terjadi dalam proses pembangunan. Ada ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya arus urbanisasi, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Faktor pendorong terjadi karena (1) tidak tersedianya pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan sebagai mata pencaharian; (2) akses terhadap listrik di pedesaan tidak luas sehingga mereka memiliki keterbatasan aktifitas di malam hari. Sedangkan faktor penariknya adalah (1) pembangunan ekonomi lebih banyak terjadi di perkotaan sehingga ada banyak pilihan pekerjaan sebagai mata pencaharian; (2) akses terhadap listrik sudah lebih luas. Menelaah lebih lanjut mengenai faktor urbanisasi tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan akses terhadap listrik di pedesaan akan mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga penduduk pedesaan akan memiliki banyak pilihan pekerjaan di pedesaan dan tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di perkotaan karena tingkat kelistrikan di desapun telah masuk secara perlahan.

Dengan adanya program gerbang desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, maka sedikit demi sedikit desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung ini mulai dibantu, hal ini telah dibuktikan tahun 2015 dengan adanya 30 desa yang telah mendapatkan bantuan 100 juta/desa. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 100 desa dengan bantuan masing-masing sebesar 300juta/desa.

### 2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan

Tabel 17 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Subsektor dan Perubahannya Maret 2015 s.d. April 2015

Kelompok dan Sub kelompok	Bulan		Persentase
	Maret 2015	April 2015	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan			
a. Indeks Diterima Petani			

	116,95	114,49	(2,10)
- Padi	119,75	113,64	(5,11)
- Palawija	114,71	115,17	0,41
b. Indeks Dibayar Petani	116,40	116,67	0,23
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	117,53	117,73	0,17
- Indeks BPPBM	112,16	112,71	0,49
2. Hortikultura			
a. Indeks Diterima Petani	116,44	115,66	(0,67)
- Sayur-sayuran	119,91	117,51	(2,00)
- Buah-buahan	112,36	113,49	1,00
- Tanaman Obat	118,37	116,56	(1,53)
b. Indeks Dibayar Petani	115,60	115,72	0,11
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	117,87	117,77	(0,09)
- Indeks BPPBM	108,69	109,52	0,76
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Indeks Diterima Petani	115,61	114,70	(0,79)
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	115,61	114,70	(0,79)
b. Indeks Dibayar Petani	116,89	116,85	(0,03)
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	118,51	118,34	(0,15)
- Indeks BPPBM	110,44	110,96	0,47
4. Peternakan			
a. Indeks Diterima Petani	124,89	125,99	0,88
- Ternak Besar	127,68	128,76	0,85
- Ternak Kecil	130,29	131,82	1,18
- Unggas	117,82	119,22	1,19
- Hasil Ternak	113,77	114,11	0,30
b. Indeks Dibayar Petani	111,98	112,24	0,23
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	117,45	117,63	0,16
- Indeks BPPBM	107,93	108,25	0,29
5. Perikanan Tangkap			
a. Indeks Diterima Petani	125,66	126,44	0,62
- Penangkapan Perairan Umum	136,94	138,63	1,23
- Penangkapan Laut	125,29	126,04	0,60
b. Indeks Dibayar Petani	116,58	117,61	0,88
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,50	119,41	(0,08)
- Indeks BPPBM	112,69	115,22	2,24
6. Perikanan Budidaya			
a. Indeks Diterima Petani	111,61	112,55	0,84
- Budidaya Air Tawar	119,90	121,60	1,42

- Budidaya Laut	100,00	100,00	0,00
- Budidaya Air Payau	115,29	114,97	(0,28)
b. Indeks Dibayar Petani	114,86	114,97	0,10
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	118,52	118,47	(0,04)
- Indeks BPPBM	109,82	110,17	0,31

Sumber BPS Provinsi Lampung, 2016

NTP Provinsi Lampung April 2015 untuk masing-masing subsektor tercatat sebesar 98,13 untuk Subsektor Padi & Palawija (NTP-P), 99,95 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 98,16 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr), 112,25 untuk Subsektor Peternakan (NTP-Pt), 107,51 untuk Subsektor Perikanan Tangkap, dan 97,90 untuk Subsektor Perikanan Budidaya. Sedangkan NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 101,43. Pada April 2015, berbagai komoditas mengalami penurunan harga sebagai akibat dari mulai memasuki masa panen. Adapun harga-harga yang mengalami penurunan antara lain padi pada subsektor tanaman pangan, cabai merah, cabe rawit, kol, dan sawi, pada subsektor tanaman hortikultura, kakao, lada, dan kelapa sawit pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan pada beberapa ikan pada subsektor perikanan tangkap. Sedangkan pada beberapa komoditas di subsektor peternakan dan subsektor perikanan budidaya mengalami kenaikan harga.

April 2015 di daerah pedesaan di Provinsi Lampung mengalami inflasi sebesar 0,02 persen. Inflasi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, sandang, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi dan olahraga dan transportasi dan komunikasi, sedangkan indeks harga pada kelompok bahan makanan mengalami dan perumahan mengalami penurunan. Berdasarkan target RPJMD, Provinsi Lampung pada tahun 2015 menargetkan NTP sebesar 103,53. Jika Nilai Tukar Petani kecil maka semakin besar kemiskinan terjadi pada petani tersebut.

## Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 18 Rasio ketersediaan pangan terhadap konsumsi normatif serealida dan umbian Provinsi Lampung Tahun 2015

Kecamatan	Produk si Bersih Beras (Ton)	Produk si Bersih Jagung (Ton)	Produk si Bersih Ubi (Ton)	Produksi Bersih Total (Ton)	Populasi 2012 (Jiwa)	Produksi Bersih (Gram / Kapita/hari)	Rasio Ketersediaan (r)	Skor_ Pertanian
Lambar	68.324	882	3.190	72.396	47.243	4.198	13,99	1
Tanggamus	136.064	8.736	5.801	150.601	650.625	634	2,11	1
Lamsel	274.681	556.920	49.229	880.830	961.897	2.509	8,36	1
Lamtim	307.894	460.566	430.215	1.198.675	1.114.838	2.946	9,82	1
Lamteng	420.815	258.805	950.905	1.630.525	1.411.922	3.164	10,55	1
Lamut	102.480	110.434	499.293	712.208	780.937	2.499	8,33	1
Way Kanan	99.799	56.847	143.770	300.416	472.918	1.740	5,80	1
Tuba	110.999	6.593	182.710	300.303	539.002	1.526	5,09	1
Pesawaran	93.573	66.420	28.036	188.029	569.729	904	3,01	1
Pringsewu	76.368	17.873	3.098	97.339	408.581	653	2,18	1
Mesuji	76.054	812	38.812	115.678	320.333	989	3,30	1
Tuba Barat	44.536	6.510	314.226	365.271	268.435	3.728	12,43	1
B.Lampung	5.444	335	1.434	7.213	1.251.642	16	0,05	3
Metro	15.839	1.986	803	18.628	160.962	317	1,06	2

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2016

Dari sisi Gap Konsumsi Energi per kelompok pangan terlihat bahwa hanya kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, dan kacang-kacangan yang bernilai positif atau melebihi standard konsumsi energi per kelompok pangan, sedangkan kelompok pangan lainnya seperti umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah, dan lain-lain, dimana gap konsumsi energinya bernilai negatif atau masih terjadi

defisit untuk konsumsi energi per kelompok pangan tersebut.

Produksi padi di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya tidak cukup signifikan. Tahun 2015 produksi padi mencapai 3.641.895ton naik sekitar 3, 2 persen dibandingkan tahun 2014, dan sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah produksi 420.815 ton atau 11,55 persen dari total produksi padi di Provinsi Lampung. Kenaikan ini patut kita syukui karena luas lahan untuk pertanian semakin berkurang seiring dengan bertambahnya penduduk.

Produksi pangan berdampak pada kecukupan pangan penduduk pertahun. Kecukupan pangan ini dilihat melalui rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealiper kapita per hari yang merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif ( $C_{norm}$ ) harus dikonsumsi oleh seseorang perhari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealiala dengan asumsi bahwa pola konsumsi pangan hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealiala. Standar kebutuhan kalori per hari perkapita adalah 2,000Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari serealiala dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300gr serealiala perhari.

Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung ternak nasional dan masuk ketiga terbesar dalam penyuplai sapi potong tingkat nasional. Sebagai gambaran produksi ternak Provinsi Lampung tahun 2015, sebagai berikut :

Table 19 Data Produksi Ternak Provinsi Lampung Tahun. 2014-2015

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	
	2014	2015
1. Populasi Ternak :		
a. Sapi Potong (ekor)	587.827	598.740
b. Sapi Perah (ekor)	285	280
c. Kambing (ekor)	1.250.823	1.252.402
d. Ayam pedaging (ribu)	29.344	32.771

ekor)		
e. Ayam Petelur (ribu ekor)	5.061	6.085
2. Produksi daging sapi (ribu kg)	13.073	13.446
3. Produksi telur (ribu kg)	62.952	73.255
4. Produksi susu (kg)	223.369	219.450
5. Jumlah RPH	-	6
6. Jumlah Puskesmas	-	54
7. Konsumsi	<b>Nasional</b>	
• Daging (kg/kap/thn)	2,2	5,27
• Telur (kg/kap/thn)	87 butir	5,36
• Susu (kg/kap/thn)	11 liter	0,07

Sumber : Disnak Keswan Prov Lampung Tahun 2015

Secara nasional Provinsi Lampung merupakan penghasil ternak nomor 2 (dua) di Sumatera dan nomor 7 (tujuh) secara nasional dan sebagai pemasok kebutuhan daging Jabodetabek, Banten dan sebagian Sumatera. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai ternak kambing khas Lampung yaitu Kambing Saburai.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan memegang peranan yang sangat penting di Provinsi Lampung, mengingat luas perairan laut (12 mil) mencapai 24.820,0 Km<sup>2</sup> (41,2%), luas wilayah Pesisir sebesar 440.010 Hektar, panjang garis pantai 1.105 Kilometer, 2 buah teluk besar (teluk Semangka dan teluk Lampung) dan terdapat jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 132 buah. Data produksi perikanan sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

Table 20 Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten / Kota

No	Kabupaten / kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Lampung Timur	20,427.04	16,367.71	14,146.79	14,315.46	13,685.26
2	Lampung Tengah	28,094.50	29,907.00	29,944.80	33,632.15	17,138.12
3	Lampung Selatan	9,158.90	11,046.01	22,688.89	21,699.44	25,691.40



4	Kota Bandar Lampung	701.12	1,101.91	1,554.69	2,246.45	3,116.55
5	Lampung Barat	1,580.15	1,887.15	2,328.37	3,274.58	3,342.98
6	Tulang Bawang	29,495.10	22,421.28	37,113.59	29,434.99	15,995.75
7	Tanggamus	3,881.50	3,551.00	11,232.50	9,018.39	5,004.00
8	Lampung Utara	3,067.49	4,158.57	3,467.15	3,811.88	3,181.56
9	Kota Metro	1,708.92	1,829.79	1,841.27	1,853.92	1,816.85
10	Way Kanan	2,358.95	2,696.98	2,931.47	3,603.45	3,024.74
11	Pesawaran	14,355.50	19,314.61	16,652.81	15,928.05	10,997.89
12	Pringsewu	5,020.60	5,496.68	6,325.19	7,395.22	8,311.02
13	Mesuji	325.19	666.26	1,780.47	1,416.70	1,782.43
14	Tulang Bawang Barat	27.44	311.27	531.41	597.91	842.28
15	Pesisir Barat	-	-	-	4,081.01	2,843.56
<b>TOTAL</b>		<b>120,202.40</b>	<b>120,756.22</b>	<b>240,958.62</b>	<b>152,309.60</b>	<b>116,774.39</b>

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung,2016

Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten / Kota Provinsi Lampung tahun 2011 sebesar 120.202,40 ton, terus mengalami kenaikan sampai tahun 2013 sebesar 240.958,62 ton. Namun pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 152.309,60 ton dan tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 116,774.39. Dari table 1. di atas terlihat bahwa Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015 terendah terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sebesar 842.28 ton dan produksi perikanan budidaya tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 25,691.40 ton. Produksi perikanan tangkap Provinsi Lampung selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7.06 % (di atas target sebesar 3.19 % per tahun).

Hasil produksi ikan Provinsi Lampung berlimpah tapi ternyata tingkat konsumsi ikan penduduk Lampung masih berada di bawah tingkat konsumsi ikan nasional, meskipun tiap tahunnya menunjukkan trend naik. Melihat kondisi konsumsi ikan penduduk yang masih rendah, kiranya Gerakan Masyarakat Makan Ikan

(GEMARIKAN) perlu di lanjutkan untuk memacu peningkatan konsumsi ikan dimasyarakat.

Gambaran secara umum ketersediaan pangan Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21 Kinerja Produksi Tanaman Pangan Provinsi Lampung dari Tahun 2011 – 2015

<b>KINERJA PRODUKSI</b>						
<b>No</b>	<b>Komoditi</b>	<b>Produksi (Ton)</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>Padi</b>	<b>2.940795</b>	<b>3.101.455</b>	<b>3.207.002</b>	<b>3.320.064</b>	<b>3.641.895</b>
<b>2</b>	<b>Jagung</b>	<b>1.817.904</b>	<b>1.760.275</b>	<b>1.760.278</b>	<b>1.719.386</b>	<b>1.502.800</b>
<b>3</b>	<b>Kedelai</b>	<b>10.984</b>	<b>7.993</b>	<b>6.156</b>	<b>13.777</b>	<b>9.815</b>
<b>4</b>	<b>Kacang Tanah</b>	<b>12.911</b>	<b>10.694</b>	<b>10.676</b>	<b>9.951</b>	<b>4.963</b>
<b>5</b>	<b>Kacang Hijau</b>	<b>3.644</b>	<b>3.212</b>	<b>2.643</b>	<b>2.352</b>	<b>1.451</b>
<b>6</b>	<b>Ubi Kayu</b>	<b>9.193.676</b>	<b>8.387.351</b>	<b>8.329.201</b>	<b>8.034.016</b>	<b>7.384.099</b>
<b>7</b>	<b>Ubi Jalar</b>	<b>47.242</b>	<b>47.408</b>	<b>45.141</b>	<b>42.000</b>	<b>28.484</b>

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Lampung,2016

Berdasarkan angka tetap Badan Dinas Pertanian tahun 2015 produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 3.641.895 ton, setara dengan 2,5 juta ton beras, sedangkan kebutuhan konsumsi di Provinsi Lampung sebesar plus minus 1,5 juta ton sehingga Lampung masih surplus beras sebesar 1.000.000 ton. Dengan adanya surplus beras seharusnya petani di Lampung sudah menikmati kemakmuran tetapi kenyataan di lapangan tidaklah demikian, hal ini karena petani tidak menguasai sistem pemasaran. Sistem pemasaran ini masih dikuasai oleh pedagang/pedagang pengumpul sehingga keuntungan masih dikuasai oleh pedagang pengumpul.

Sentra produksi padi di Provinsi Lampung ada di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Tanggamus. Alur pola distribusi atau alur pemasaran komoditi padi umumnya dari daerah sentra produksi di 5 (Lima) Kabupaten tersebut di

atas mensuplay kabupaten/kota yang bukan daerah sentra antara lain: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Way Kanan. Dan selain mensuplay wilayah Lampung, para produsen beras dari 5 (Lima) Kabupaten sentra tersebut juga memasarkan keluar Provinsi seperti Pekanbaru, Batam, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Daerah Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang dan Bekasi).

Produksi jagung di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 1.502.800 juta ton, yang dikonsumsi oleh masyarakat sebesar lebih kurang 325 ribu ton, sehingga Provinsi Lampung masih mengalami surplus jagung sebesar 1.3 juta ton. Surplus jagung tersebut dapat menutupi kebutuhan jagung bagi bahan baku industri jagung/pakan ternak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, kebutuhan bahan baku industri pakan ternak melebihi total produksi jagung yang tersedia setiap tahunnya. Kebutuhan bahan baku setiap tahun berkisar  $\pm$  1,3 juta ton, sedang produksi mencapai 1,725 juta ton dan masih terdapat surplus sebesar lebih kurang 400 ton.

Provinsi Lampung merupakan daerah produsen ubikayu dengan produksi ubikayu nomor 1 (satu) di Indonesia, yaitu berdasarkan Data Dinas Pertanian Tahun 2015 produksi ubikayu sebesar 7,38 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi mencapai 120 ribu ton, sehingga Provinsi Lampung masih surplus ubikayu sebesar 7,26 Juta ton lebih. Dari total surplus produksi ubikayu sebesar 95% ditampung oleh industri tepung tapioka dan pakan ternak dan sisanya sebesar 5% yang dimanfaatkan untuk industri makanan.

Alur Distribusi ubikayu yang keluar dari Provinsi Lampung baik untuk provinsi lain maupun keluar negeri sudah dalam bentuk tepung tapioka maupun pakan ternak/pellet, dan hasil olahan industri makanan seperti keripik singkong. Tepung tapioka dari Lampung banyak diekspor ke Negara China. Dari data BPS tahun 2005 (Buku Hasil Survei Industri Pengolahan Hasil) untuk industri tepung tapioka dari 45 perusahaan yang industrinya stabil membutuhkan bahan baku industri sebanyak 2.347.500 ton umbi basah kulit, dengan total produksi tepung tapioka sebesar 551.389 ton

tapioka per tahun. Tujuan pemasaran hasil/produksi tepung tapioka sebagian besar atau sekitar 84,08 % dari hasil produksi tapioka (463.583 ton) dipasarkan di dalam Provinsi Lampung dan hanya 87.806 ton (sekitar 15,92 %) yang dipasarkan ke luar Provinsi Lampung (Provinsi Lain = 7,38 % dan luar Negeri = 8,54 %).

Produksi jagung Provinsi Lampung masih menjadi penyumbang nomor 3 (tiga) untuk produksi nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Produksi ubi kayu Provinsi Lampung merupakan penyumbang nomor 1 untuk produksi nasional.

Secara konseptual, **ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Potensi kerawanan pangan ditinjau dari analisis ketersediaan pangan menunjukkan bahwa terdapat 1(satu) Kabupaten/kota yang **sangat kurang tersedia pangan** yaitu kota Metro, 1 (satu) kabupaten/kota **agak kurang tersedia pangan** yaitu kota Bandar Lampung, dan 13 (tiga belas) kabupaten **sangat tersedia pangan** yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Barat , Lampung Timur, Pesisir Barat dan Lampung Tengah. Berdasarkan komposit konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan sereal, hampir semua Kabupaten di Provinsi Lampung mengalami surplus sereal kecuali di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Penyebab defisit antar kecamatan bervariasi, antara lain: (1) perluasan areal perdagangan dan jasa, (2) pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan produksi padi, ubi kayu, ubi jalar dan jagung, dan (3) kurangnya ketersediaan lahan untuk bercocok tanam dibandingkan dengan kepadatan penduduk.

Gambar 41. Ketersediaan Pangan di Kab/Kota



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Lampung

1. **Akses pangan** merupakan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara keenamnya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Potensi kerawanan pangan ditinjau dari analisis terhadap akses pangan, terdapat pada 14 kabupaten/kota yang berpotensi **rawan** terhadap akses pangan yaitu di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Metro, Pringsewu, Lampung Tengah, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, dan Kabupaten Pesisir Barat, 1 (satu) Kabupaten yang **agak rawan** terhadap akses pangan yaitu kota Bandar Lampung.

Gambar 42 Akses Pangan di Kab/Kota



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Lampung

2. **Pemanfaatan Pangan** merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll) dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga. Potensi kerawanan menurut analisis penyerapan dan pemanfaatan pangan menunjukkan bahwa di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Aman terhadap pemanfaatan pangan.

Gambar 43 Pemanfaatan Pangan di Kab/Kota

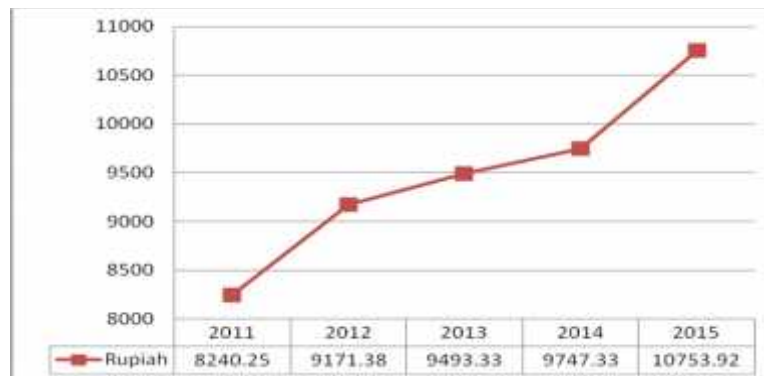


Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Lampung

Target dalam RPJMD Provinsi Lampung untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan sebesar 2,14persen, sedangkan laku pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk tahun 2015 adalah 3,69%.

### **Rata-rata Harga Beras**

Gambar 44 Rata-rata Harga Beras, 2011 – 2015

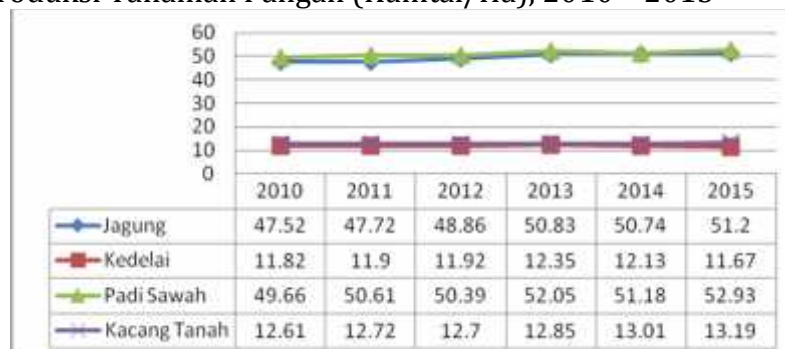


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Harga rata-rata beras di Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. BPS Provinsi Lampung mencatat kenaikan beras setiap tahunnya. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, bukan berarti terjadi kelangkaan beras di pasaran. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Lampung dalam swasembada beras, bahkan mengekspor ke beberapa daerah lain seperti DKI Jakarta.

### **Produksi Tanaman Pangan**

Gambar 45 Produksi Tanaman Pangan (Kuintal/Ha), 2010 – 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Kesejahteraan dapat dilihat dari tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan pangan. Apabila tidak tercukupinya ketersediaan pangan maka akan berdampak krisis pangan. Tanaman pangan yang banyak diusahakan di Provinsi Lampung berupa jagung, kedelai, padi sawah, kacang tanah dan lainnya. Sebagian wilayah Provinsi Lampung sangat cocok untuk ditanami

tanaman pangan dan tanaman hortikultura akan tetapi sebagian tidak cocok untuk ditanami tanaman hortikultura tetapi cocok untuk tanaman pangan. Hal ini tergantung jenis tanah yang di daerah masing-masing pertanian sehingga tanaman yang akan ditanam pun berbeda. Seluruh komoditas tanaman pangan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding 2014 yang tidak begitu signifikan, kecuali kedelai. Meski demikian, peningkatan dan penurunan ini tidak begitu berpengaruh pada produksi tanaman kedelai. sehingga dapat dipastikan pada stok tanaman pangan secara keseluruhan aman.

Luas Areal Provinsi Lampung sangat mendukung produktivitas produksi Padi, Kedelai, Jagung, Daging Sapi, dan ikan sehingga terjadilah swasembada tanaman pangan. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua produksi Lampung dikonsumsi oleh masyarakat Lampung sehingga Lampung masih mengimpor barang tanaman pangan yang menimbulkan ketidakstabilan harga terjadi. Pada era globalisasi seperti ini, banyak alih fungsi lahan menjadi perumahan-perumahan tempat tinggal sehingga alih fungsi lahan pertanian yg cukup tinggi, dapat mengancam ketahanan pangan baik produktivitas tanaman pangan maupun perikanan yang ada di Provinsi Lampung.



# **BAB 3**

## **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **3.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki regulasi daerah tentang penanggulangan kemiskinan. Tetapi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung tertuang dalam:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Perintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 tanggal 15 Agustus 2014.
- c. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
- d. Berita Acara Rakor TKPK se-Provinsi Lampung tahun 2015 dalam rangka evaluasi dan sinkronisasi upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung tanggal 19 Mei 2015.

### **3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan**

Sebagai upaya penurunan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Pada dasarnya isu tentang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah menjadi persoalan mendasar bagi bangsa Indonesia. Berbagai program dalam pembangunan telah dilaksanakan baik di tingkat Pusat, Regional, maupun Daerah, akan tetapi hasil dari penurunan tingkat kemiskinan masih jauh dari harapan.

Esensi dari sebuah program pengentasan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin agar memiliki kemampuan berusaha dan mandiri dari segi ekonomi, sehingga program kemiskinan Evaluasi Kinerja Program Anti Kemiskinan, seharusnya bersifat komprehensif dan ditujukan langsung ke akar permasalahan dari kemiskinan.

Penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan berupaya menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dari tahun ketahun. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perhatian khusus dan upaya terus menerus dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu program prioritas penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mendukung kegiatan melalui alokasi dana pendamping (*cost sharing*) Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*). Konsep dasar adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin. Kelompok Masyarakat (Pokmas) mendapat bantuan sarana dan prasarana Produksi dari Pemerintah.

Tabel 22 Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga, dan Rumah Tangga (Klaster I), 2015

	Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
<b>NASIONAL</b>	PKH (2015)	APBN	Keluarga Sangat Miskin	147.464	640.668.677.250	Dinas Sosial
	Kartu Keluarga Sejahtera	APBN	Keluarga Miskin	564.864	341.769.700.000	
	BOS	APBN	Siswa Miskin		1.003.532.350.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BSM	APBN	Siswa Miskin			Dinas P&K Kabupaten/ Kota
	BPJS Kesehatan (2015)	APBN	Masyarakat Miskin	3.086.041		BPJS Kesehatan Prov.Lampung
	RASKIN (2015)	Beras	Keluarga Miskin	573.954 RTS-PM	192.848.544.000	Biro Perekonomian/BULOG

DAERAH	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	APBD	Masyarakat Miskin		17.635.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	APBD	Masyarakat Miskin		8.251.511.000	Dinas Kesehatan
	Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	APBD	Ibu dan anak		1.000.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan Dan Penanganan Trafficking, Kdrts Dan Korban Pelecehan Seksual	APBD	Masyarakat Wanita		590.000.000	Badan PP PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	APBD	Masyarakat Wanita		151.360.000	Badan PP PA
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	APBD	Infrastruktur Masyarakat		257.957.000.000	Bina Marga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APBD	Anak-Anak		5.306.802.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APBD	Masyarakat Miskin		22.535.307.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Menengah	APBD	Masyarakat Miskin		9.981.730.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Luar Biasa	APBD	Masyarakat Miskin		1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APBD			446.157.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APBD			6.074.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Kegiatan Belajar Mengajar	APBD			78.918.653.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 23 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas, (Klaster 2)

	Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
<b>NASIONAL</b>	PIE	APBN	Kecamatan	4	7.600.000.000	Bappeda dan BPMPD Provinsi dan Kabupaten
<b>DAERAH</b>	Gerbang Desa Saburai	APBD	Desa	30	3.000.000.000	Bappeda
	PIE	APBD	Kecamatan	4	80.000.000	Bappeda
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	APBD	Kecamatan		129.550.000	Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	APBD	Kecamatan		988.348.000	Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesejahteraan Perempuan	APBD	Kecamatan		301.291.000	Badan PP PA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	APBD	Desa		612.742	BPMPD

	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD	Desa		46.472.263	BMPMD
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	APBD			2.480.175.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	APBD			280.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan	APBD			1.679.000.000	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	APBD			11.575.000.000	Badan Ketahanan Pangan Daerah
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	APBD			456.000.000	Badan Ketahanan Pangan Daerah
<b>PNPM PERDSAAN</b>	PNPM 2015					

Tabel 24 Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

	Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
<b>NASIONAL</b>	Kredit Usaha Rakyat (2014)	APBN	UMKM			Bank Indonesia
	Kelompok Usaha Bersama	APBN	Desa dan Kota	140 desa, 50kota (190 kube)	3.800.000.000	Dinas Sosial
<b>DAERAH</b>	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	APBD	UMKM		486.205.000	Dinas Koperasi dan UMKM

	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	APBD	UMKM		80.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
	Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	APBD	UMKM		375.486.000	Dinas Perdagangan
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	APBD	Desa		83.262.000.00	BPMPD
	Program Pengembangan Kewirausahaan	APBD			289.998.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	APBD	UMKM		830.800.000	Dinas Perindustrian
	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	APBD			246.700.000	Dinas Perindustrian
	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	APBD			150.000.000	Dinas Perindustrian

### **3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan**

#### **3.3.1 Analisis Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan

darah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah

Perkembangan realisasi pendanaan pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2013 – 2015 dari berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 APBD Lampung menurut Pendapatan

Komponen	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Pendapatan Asli Daerah	45,5 persen	50,6 persen	49,9 persen
Dana Perimbangan	35,4 persen	32,3 persen	33,7persen
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19,1 persen	17,1 persen	16,5persen

Sumber: RKPD Provinsi Lampung, 2015

Selama kurun waktu tahun 2013 – 2015 sumber dana pembangunan APBD Provinsi Lampung secara persentase cenderung berimbang proporsinya baik dari sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah maupun dari kemampuan pendapatan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan PAD masih relatif kecil dibandingkan dana perimbangan. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;

- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Operasionalisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Perhatian kepada sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah mempunyai arti penting karena dengan semakin besarnya penerimaan daerah dari sumber-sumber tersebut dapat dijadikan ukuran yang menunjukkan kemandirian daerah untuk membangun wilayahnya atas kekuatan sendiri. Penerimaan daerah tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan berpengaruh secara langsung terhadap sisi permintaan agregat yang kemudian dapat mendorong peningkatan sisi penawaran agregat dalam perekonomian daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah di satu sisi menunjukkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan kemandirian daerah, namun di sisi yang lain jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada pelaku usaha di daerah dan dalam kondisi lain dapat menyebabkan terjadinya capital flight pada tataran regional.

Sejalan dengan hal tersebut dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional. Hingga saat ini rasio penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan regional masih berada pada kisaran lebih dari lima persen sehingga potensi pajak dan retribusi yang tersedia masih cukup besar.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah akan diterapkan pada pos-pos pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan



pemerintah provinsi. Kelompok objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Tabel 26 Komponen Pendapatan Asli Daerah Lampung

Komponen	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)	Proporsi dalam APBD (%)
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Pajak Daerah	86,8 persen	84,3 persen	90.6 persen
Hasil Retribusi Daerah	0,6 persen	0,4 persen	0.3 persen
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,4 persen	1,1 persen	1.1 persen
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,2 persen	14,1 persen	7.9 persen

Sumber: RKPD Provinsi Lampung, 2015

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2013 sampai 2015 terjadi peningkatan pada komponen pajak daerah sebesar 90,6 persen, namun mengalami penurunan pada realisasi pendapatan tahun 2015 pada komponen hasil retribusi daerah dan komponen lain-lain pendapan asli daerah yang sah tetapi angka 1,1 persen tetap berada pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2014 dan 2015. Kinerja positif Pemerintah Provinsi Lampung dalam merealisasikan APBD tahun 2013 sampai tahun 2015 berdampak positif dalam menurunkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Provinsi Lampung yang menjadi persoalan klasik dalam manajemen pembangunan di Provinsi Lampung selama ini.

### 3.3.2 Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung

Tabel 27 Kapasitas Fiskal APBD Provinsi Lampung, 2015

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Belanja	
1	Provinsi Lampung	Rp	4,723,190,697,837.00
2	Bandar Lampung	Rp	2,139,324,468,865.86

3	Lampung Tengah	Rp	2,025,185,587,595.00
4	Lampung Timur	Rp	1,765,837,179,813.00
5	Lampung Selatan	Rp	1,661,326,799,700.00
6	Lampung Utara	Rp	1,413,122,978,021.00
7	Tanggamus	Rp	1,178,661,833,958.42
8	Way Kanan	Rp	1,020,004,811,547.00
9	Pesawaran	Rp	984,177,422,768.00
10	Pringsewu	Rp	956,162,929,320.00
11	Tulang Bawang	Rp	918,975,512,204.00
12	Lampung Barat	Rp	847,945,066,564.00
13	Metro	Rp	752,785,498,525.00
14	Tulang Bawang Barat	Rp	739,469,845,974.00
15	Mesuji	Rp	708,971,438,122.13
16	Pesisir Barat	Rp	571,147,307,725.00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>Rp</b>	<b>22,406,289,378,539.40</b>

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2016

Tabel.28 Kapasitas Fiskal APBN Provinsi Lampung, 2015

Kewenangan	Pagu
Dekonsentrasi	290.680.834.100
Tugas Pembantuan	1.345.049.760.000
Urusan Bersama	9.457.500.000
Total	1.645.188.094.100

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka kapasitas Fiskal APBD dan APBN Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar Rp. 24,051 Trilyun terdiri dari 16Kabupaten/Kota dan diluar Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Lampung.

### 3.3.3 Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Belanja daerah masih menjadi modal penting yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung, terutama bagi 15 kabupaten/kota dalam menjalankan pemerintahannya, karena daerah

Provinsi Lampung belum memiliki pendapatan lain yang besar dan hanya mengaharapkan pada belanja daerah. Oleh karena itu, semua daerah di Provinsi Lampung sangat tergantung pada belanja daerah khususnya adalah belanja modal yang menjadi bagian dari asset daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dalam membangun daerah masing-masing.

Prioritas utama dalam perekonomian adalah pembangunan yang dilakukan di semua sektor karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Optimalisasi dan prioritas belanja akan menumbuhkan perekonomian yang berdampak secara langsung terhadap pengurangan pengangguran dan mengatasi permasalahan kemiskinan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila perekonomian meningkat maka daya serap angkatan kerja juga akan meningkat sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang dan kemungkinan besar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Namun yang terjadi sekarang adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat tetapi tidak di dukung oleh pertumbuhan lapangan kerja sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran semakin serius. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan terus menunjukkan perbaikan selama beberapa tahun terakhir tidak berarti pekerjaan pemerintah telah selesai, kegiatan di sejumlah sektor khususnya di sektor riil masih di bawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum mampu menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan konkuren yang merupakan urusan wajib dan urusan pilihan. Berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk implikasi terhadap penganggaran belanja pemerintah daerah. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, bahwa pada Maret 2016 Pemerintah Provinsi Lampung selesai melaksanakan inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen

(P3D) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Sementara itu, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dilaksanakan sebelum Oktober 2016. Di sisi belanja, penyelesaian P3D perlu ditindaklanjuti dengan penambahan alokasi anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, struktur belanja dalam APBD Provinsi Lampung terdiri atas kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 29 Belanja menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Komponen	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)	%
<b>Belanja Langsung</b>	2.072.655,73	53,36	2.309.626,50	51,85	2.085.922,10	44,16
Pegawai	100.476,76	4,85	109.214,90	4,73	117.219,16	5,62
Barang dan Jasa	1.168.089,65	56,36	1.274.956,92	55,20	1.248.404,81	59,85
Modal	804.089,33	38,80	925.454,68	40,07	720.298,12	34,53
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.811.879,22	46,64	2.144.560,81	48,15	2.637.268,60	55,84
Pegawai	497.662,95	27,47	544.114,85	25,37	771.913,78	29,27
Hibah	761.045,63	42,00	847.424,32	39,52	807.523,43	30,62
Bantuan Sosial	5.448,51	0,30	4.521,80	0,21	9.700,00	0,37
Dana Bagi Hasil	357.471,26	19,73	723.095,81	33,72	100.000,00	37,92
Bantuan Keuangan	170.214,41	9,39	20.173,87	0,94	25.642,60	0,97
Belanja Tidak Terduga	20.036,46	1,11	5.230,16	0,24	22.488,79	0,85

Sumber: RKPD Provinsi Lampung, 2015

Program Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Lampung. APBD Provinsi Lampung dipergunakan untuk fasilitasi paket bantuan/sarana produksi bagi Kelompok Masyarakat Keluarga Miskin (Pokmas Gakin), dana pembiayaan/pinjaman bagi Mitra Usaha, operasional Tim Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi. *Cost*

*Sharing* APBD Provinsi Lampung dipergunakan untuk membiayai operasional Tim Koordinasi/Tim Teknis Kabupaten serta pembinaan untuk pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Alokasi pendanaan yang telah diberikan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebesar 0,85 persen sebagaimana Tabel diatas atau sebesar Rp. 22.488.790.000,-. Berkaitan dengan jumlah alokasi pendanaan, dapat disampaikan bahwa anggaran yang ada masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan jumlah masyarakat miskin yang tertangani dan jumlah alokasi dana bantuan untuk masing-masing keluarga miskin masih sangat terbatas sehingga hasilnya kurang maksimal.

Pertumbuhan ekonomi Anggaran Belanja Provinsi Lampung yang akan menunjang perbaikan selama beberapa tahun ini tidak berarti bahwa pekerjaan telah selesai. Tetapi perekonomian belum sepenuhnya pulih, kegiatan sejumlah sektor khususnya di sektor rill masih dibawah kapasitas yang seharusnya. Pertumbuhan ekonomi APBD Provinsi Lampung juga belum cukup untuk menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Tujuan akhir pertumbuhan ekonomi APBD Provinsi Lampung adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran serta berbagai permasalahan lain yang melanda Provinsi ini.

Pengaruh belanja dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran pada APBD Provinsi Lampung. Dan hasil penelitian itu menunjukkan pembelanjaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif pada kemiskinan. Dan belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) merupakan kekayaan provinsi yang dikelola langsung oleh pemerintah. Pengurusan APBD termasuk dalam pengurusan umum/administratif meliputi hak penguasaan serta perintah menagih dan perintah membayar. APBD Provinsi Lampung sebagai inti pengurusan umum merupakan anggaran negara yang terdiri atas rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja Negara untuk suatu periode tertentu.

Salah satu dasar pertimbangan yang melandasi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun 2015 adalah mobilisasi kapasitas fiskal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung tahun 2015 menegaskan bahwa total belanja modal sejumlah Rp. 15.500.000.000.000,-, Anggaran Pendidikan sebesar Rp. 192,433,933,460,-, Anggaran Kesehatan sebesar Rp. 102,572,994,100,- .

# **BAB IV**

## **KELEMBAGAAN**

### **PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **4.1 Kelembagaan TKPK**

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Definisi penanggulangan kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 lebih lanjut mengamanatkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Sementara itu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi Lampung yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

Dalam kelembagaan TKPK Provinsi Lampung, Ketua TKPK Provinsi Lampung adalah Wakil Gubernur Lampung dan dalam pelaksanaannya dibentuk sebuah tim kesekretariatan (*clearance house*) yang diketuai oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Kesekretariatan TKPK Provinsi Lampung membentuk Sekretariat TKPK yang

berlokasi di kompleks Kantor Bappeda Provinsi Lampung. Pembentukan Sekretariat TKPK Provinsi Lampung menyerap dana sebesar Rp 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dianggarkan oleh APBD Provinsi Lampung melalui DPA Bappeda Provinsi Lampung.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung tersebut, TKPK Provinsi Lampung memiliki tugas:

- a. Mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. Mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebutkan bahwa fungsi dari TKPK Provinsi Lampung adalah:

- a. Pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi TKPK Provinsi Lampung, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas Pokja Pendataan dan Informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan, dan Pokja Pengaduan Masyarakat. Agar program-program yang disusun dapat lebih tersegmentasi dan terpetakan, maka dibentuk kelompok program yang mendukung kluster-



klaster penanggulangan kemiskinan yaitu kelompok program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, dan Program-Program Lainnya. Dalam pelaksanaan di lapangan TKPK Provinsi Lampung bukan hanya beranggotakan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, namun juga melibatkan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Lampung, swasta, akademisi, dan konsultan bidang pemberdayaan masyarakat.

Persoalan kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan multidimensi dalam program lintas pembangunan dengan mensinergikan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, dan multidimensi, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung diarahkan kepada pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia. Hak dasar manusia merupakan hak dasar yang wajib untuk dipenuhi untuk mewujudkan tingkat kehidupan manusia yang sejahtera dan bermartabat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung yang diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut;

- a. Pemenuhan hak atas pangan;
- b. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Pemenuhan hak atas pekerjaan;
- e. Pemenuhan hak atas rumah;
- f. Pemenuhan hak atas tanah;
- g. Pemenuhan hak atas air bersih;
- h. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi;
- i. Pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- j. Pemenuhan hak rasa aman.

Dalam perjalanannya, TKPK Provinsi Lampung menghadapi berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antara SKPD, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- b. Kurangnya penyampaian informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena adanya mutasi pejabat;
- c. Kurangnya tenaga sumber daya manusia baik di tim kesekretariatan maupun personil yang akan ditempatkan di Sekretariat TKPK Provinsi Lampung;
- d. Operasional Sekretariat TKPK Provinsi Lampung baru berjalan pada tahun ini, sehingga perlu penyesuaian dan sosialisasi terhadap anggota TKPK Provinsi Lampung; dan
- e. Belum adanya sistem informasi terpadu mengenai laporan kinerja dan progres pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

#### **4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

TKPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena tugas TKPK terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPK Provinsi umumnya berupa rapat-rapat koordinasi. Namun demikian, di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Provinsi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non rapat, antara lain memfasilitasi data mengenai kemiskinan Provinsi Lampung dengan dibentuknya Sekretariat TKPK Provinsi Lampung di lingkungan kantor BAPPEDA Provinsi Lampung.

## Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi TKPK se-Provinsi Lampung juga diadakan beberapa pertemuan yang bersifat sektoral dan mendukung program penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2015 pada tanggal 08 Januari 2015.
  - a. Permasalahan yang berkembang dalam diskusi tersebut adalah:
    - Terjadinya peningkatan jumlah desa tertinggal, masyarakat yang rawan gizi, serta pengguna narkoba di Provinsi Lampung;
    - Pemetaan lokasi agar pelaksanaan program penanganan tepat sasaran, melalui kegiatan fisik dan non fisik (*capacity building*);
    - Kebijakan/strategi/program unggulan rencana aksi Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung agar terpadu untuk dilaksanakan secara lintas sektor
  - b. Sesuai dengan agenda diatas maka rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah:
    - Akan dilakukan pemetaan Desa Tertinggal oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan BPMPD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung serta BPS Provinsi Lampung;
    - Akan disusun program/kegiatan secara terpadu untuk penanganan lokus-lokus desa tertinggal maupun kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Lampung
    - Perlu disusun dan diterapkan Kebijakan/Strategi/Program Unggulan dan Rencana Aksi Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung agar terpadu untuk dilaksanakan secara lintas sektor;
    - Direncanakan akhir bulan Januari akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

2. Rapat Penyusunan Formulasi Pembangunan Desa Induk di Provinsi Lampung Tahun 2015 pada tanggal 22 Januari 2015

Pembahasan yang berkembang adalah:

- Percepatan Pembangunan Desa Induk (PPDI) diproyeksikan sebagai Program Unggulan Bapak Gubernur Lampung, yang bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan dan potensi konflik serta mensinergikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan titik berat sektor ekonomi;
- Pelaksanaan PPDI direncanakan berlangsung sepanjang periode jabatan Gubernur Lampung (hingga 2019) Di TA 2015, penyusunan teknis kegiatan PPDI harus selesai di akhir Maret 2015 mengingat pembahasan APBD-P TA 2015 dan Musrenbang Provinsi akan dilaksanakan lebih lanjut;
- Di tahun 2015, PPDI direncanakan akan dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota (1 Desa/Kampung sebagai pilot project di TA 2015 yang ditentukan berdasarkan masukan dari 15 Kab/Kota yang dikomparasi dengan Data Desa dari Badan PMPD Provinsi Lampung);
- Skema pelaksanaan PPDI adalah gabungan antara model Swakelola (adopsi program PNPM) dan sinergi SKPD.

Dalam rangka evaluasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengadakan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Lampung pada tanggal 22 Januari 2016 yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Lampung, Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Kepala BPJS, dan swasta. Agenda rapat dalam rakor tersebut adalah:

- a. Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2015;

- b. Rencana Pelaksanaan Program Gerbang Desa Tahun 2016;
- c. Hasil Pemetaan Intervensi Terhadap Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di 30 Desa Sasaran Tahun 2015.

3. Rapat Tim TKPKD tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tanggal 19 Mei 2015

Pembahasan yang berkembang adalah:

- BPS secara nasional akan melaksanakan PBDT 2015 yang merupakan penyempurnaan dari kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS 2011. PBDT dilaksanakan melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan, serta melakukan pendataan lapangan oleh petugas lapangan;
- Hasil PBDT tersebut akan digunakan sebagai basis data rumah tangga sasaran program penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah mulai tahun 2016, termasuk diantaranya pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung;
- Menjadi perhatian bahwa di bulan Maret 2014 persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 14,21% atau tertinggi ke-3 di wilayah Sumatera, dan di tahun 2016, kita targetkan persentase penduduk miskin tersebut akan diturun menjadi 11,86% dan ini harus menjadi target kita bersama;
- Secara khusus, TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota diharapkan dapat berperan optimal dalam mendukung pelaksanaan PBDT 2015 di wilayah masing-masing, termasuk memfasilitasi di aspek pemantauan dan keamanan, bersama-sama dengan lembaga dan instansi terkait;
- Hal penting yang harus digaribawahi dalam pelaksanaan PBDT, dan untuk menjadi perhatian baik oleh BPS Provinsi selaku pelaksanaan pendataan ataupun TKPK Provinsi dan Kabupaten

sebagai fasilitator dan pendukung kegiatan, bahwa kegiatan PBDT 2015 tidak menjadikan penduduk di kawasan register sebagai sasaran pendataan PBDT mengingat mereka secara administrasi berada di kawasan illegal.

Rencana Tindak Lanjut dalam pembahasan ini adalah:

- Dibutuhkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PBDT untuk:
  - a. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah, terlebih lagi TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, yang secara khusus diamatkan untuk menjadi pelaku utama dalam pemantauan proses pelaksanaan PBDT 2015 diwilayah masing-masing, terutama dalam mengawal dan memfasilitasi proses kegiatan Forum Konsultasi Publik PBDT oleh BPS;
  - b. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan BPS serta aparat keamanan diwilayah masing-masing guna memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan PBDT 2015.
- Pada forum rakor TKPK ini telah di rumuskan kesepakatan dan dituangkan dalam Naskah Nota Kesepakatan sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan PBDT Tahun 2015.

#### 4. Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 12-13 Oktober 2015

Pelatihan yang didiskusikan adalah:

- SIMPADU Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari rangkaian sistem pendukung penanggulangan kemiskinan selain penyusunan basis data dan informasi kemiskinan, pemetaan kemiskinan, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
- Aplikasi SIMPADU ini telah bermetamorfosis sebanyak 4 kali sejak diluncurkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, yang

dilaksanakan di 20 provinsi dan saat ini sudah diluncurkan dalam versi *mobile* (termasuk di dalamnya Simpadu Provinsi dan Simpadu PNPM Mandiri);

- Lampung merupakan salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan Aplikasi SIMPADU Penanggulangan Kemiskinan dengan alamat <http://simpadu.lampungprov.go.id/>, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal dan efektif dikarenakan kendala sumber daya manusia maupun sosialisasi terhadap SKPD terkait;
- Manfaat dari aplikasi SIMPADU akan lebih maksimal apabila masing-masing SKPD terus melakukan updating data sebagai data base pengambilan kebijakan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung
- Tantangan dalam pemanfaatan aplikasi SIMPADU Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung antara lain:
  - a. Pemutakhiran data SIMPADU Provinsi tergantung dari input data masing-masing SKPD;
  - b. Perlunya kesiapan sarana dan prasarana serta pengelola/operator yang melakukan pemutakhiran data dan pemeliharaan *hardware/software* SIMPADU;
  - c. Kemampuan operator/pengguna system untuk melakukan analisis data berbasis grafik, pivot, dan tematik.

Rencana Tindak Lanjut:

- Peserta pelatihan segera mengimplementasikan hasil pelatihan dengan mengupdate data-data terkait program penanggulangan kemiskinan yang tersedia di SKPD masing-masing melalui aplikasi SIMPADU dan berkoordinasi dengan Tim Konsultan Bappenas terkait teknis update data;
- Untuk kesinambungan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Provinsi Lampung

maupun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Lampung;

- Pada tahun 2016 melalui Bappenas akan dialokasikan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan pelatihan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga terjalin sinergitas berbagai program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBN tahun 2016.

5. Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015

- a. Identifikasi dan inventarisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD, baik yang dibiayai APBN dan atau APBD.
- b. Sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan dokumen perencanaan daerah, antara lain RPJMD Provinsi Lampung maupun Strategi Penanggulnagan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Lampung
- c. Sosialisai terkait updatating data program/kegiatan penanggulngan kemiskinan melalui aplikasi Sistem Informasi Managemen Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (SIMPADU-PK)

Rencana tindak lanjut dari pertemuan diatas adalah:

- a. SKPD diminta melakukan pemilahan program/kegiatan dari sumber pembiayaan (program pusat/APBN dan program daerah/APBD). Hal ini dibutuhkan untuk menghindari sasaran program yang tumpang tindih;
- b. Secara khusus diminta kepada SKPD Provinsi untuk menjadikan sasaran Program Gerbang Desa sebagai *locus* pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai merupakan program unggulan Pemerintah provinsi Lampung dengan pendekatan pembangunan berbasis pedesaan yang diarahkan untuk penguatan pembangunan



dan penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan, khususnya di desa tertinggal. Sasaran Gerbang Desa 2015-2019 adalah 380 Desa Tertinggal yang lokasi sasaran yang ditetapkan per tahun oleh Gubernur Lampung berdasarkan usulan TKPK Provinsi;

- c. Terkait sinergitas program penanggulangan kemiskinan di daerah, diharapkan program-program dimaksud dapat menjadi basis data dan informasi SIMPADU-PK.

6. Rapat Koordinasi tentang Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemsikinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tanggal 21 Desember 2015

Pembahasan yang berkembang adalah:

- a. Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung untuk tahun 2014 telah dilaksanakan oleh 17 SPKD dengan jumlah program sebanyak 45 program dan total anggaran sebesar 457 milyar.
- b. Dukungan dari pemerintah Kabupaten/kota telah dilakukan melalui penyediaan dana PAP, namun belum memiliki dokumen perencanaan yang baik, seperti Road Map dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/SPKD. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh kepentingan pimpinan/kepala daerah;
- c. Pemerintah provinsi menyusun program/kegiatan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan tahun 2016-2017 di Kabupaten/kota, seperti usulan perbaikan jalan provinsi di Kabupaten/Kota, pelatihan, dan lain-lain.

Rencana Tindak Lanjut:

- a. Pemerintah provinsi, melalui TKPK Provinsi, menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan, yaitu SKPD Provinsi, yang dapat dijadikan acuan bagi SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Untuk optimalisasi kelmbagaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/kota, akan dilakukan:

- Penyesuaian struktur kelambagaan TKPK dengan mengacu kepada Perpres Nomor 15/2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Permendagri 42/2010, serta dengan memperhatikan keterlibatan stakeholder lainnya (swasta, instansi pendidikan, dan masyarakat);
- Penyiapan Sekretariat TKPK di Kabupaten/Kota sebagai wadah sinergitas program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal penyiapan dukungan sarana prasarana ataupun pendanaan.

Berdasarkan hasil audit BPK terhadap program penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2010-2015, TKPK Provinsi Lampung perlu melakukan:

- a. Pembinaan kelembagaan TKPK Provinsi Lampung;
- b. Penyediaan dokumen perencanaan dan penetapan anggaran program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi;
- c. Penyediaan data penduduk miskin sebagai dasar penetapan sasaran program;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, akurat, dan memadai.

Dalam rapat koordinasi TKPK se-Provinsi Lampung juga mendapatkan kesimpulan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang berisi:

- a. Operasionalisasi Sekretariat TKPK Provinsi Lampung yang bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Lampung sebagai media fasilitasi data dan informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- b. Realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN Tahun 2015 antara lain adalah :
  - Bantuan Operasional Sekolah bagi SD dan SMP sebesar Rp. 1.003 Trilyun dengan realisasi 98,97%;
  - Program RASKIN sebanyak 120,5 ton yang dialokasikan untuk 573.954 rumah tangga sasaran, telah terealisasi 100%;

- Bantuan (iuran) BPJS Kesehatan sebesar Rp. 64,6 milyar untuk 3,3 juta peserta; serta
  - Program Keluarga Harapan sebesar 162,7 milyar yang dialokasikan untuk 395.621 keluarga sangat miskin.
- c. Program penanggulangan kemiskinan Tahun 2015 yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung sebanyak 35 program yang dikelola oleh 16 SKPD se-Provinsi Lampung, dengan total anggaran sebesar Rp. 458 milyar dan telah terealisasi 82%.

Untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut diatas, TKPK Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi dengan TNP2K untuk meminta data *by name by address* hasil updateing basis data terpadu program penanggulangan kemiskinan.

Selain melakukan rapat-rapat Koordinasi di tingkat Provinsi, TKPK Provinsi Lampung juga melakukan pembinaan kepada TKPK Kabupaten/Kota melalui Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2015, antara lain:

- a. Rakor Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 18-20 Oktober 2015, berdasarkan SPT Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 090/85/SPT/II.02/Pemkesra/2015.
- b. Konsultasi dan Koordinasi pengembangan Aplikasi SIMPADU Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta pada tanggal 8-10 November 2015, berdasarkan SPT Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 090/80/SPT/II.02/Pemkesra/2015.
- c. Mengikuti Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta tanggal 10 November 2015, berdasarkan SPT Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 090/84/SPT/II.02/Pemkesra/2015.
- d. Studi Pembelajaran Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 24-26 November 2016, berdasarkan SPT Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 090/87/SPT/II.02/Pemkesra/2015.

- e. Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mesuji pada tanggal 3-5 Desember 2015, berdasarkan SPT Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 090/110/SPT/II.02/Pemkesra/2015.
- f. Studi Pembelajaran tentang Pemanfaatan Penerapan Basis Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan di Bappeda Jawa Barat, Bandung pada tanggal 17-19 Desember 2015, berdasarkan SPT Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 090/112/SPT/II.02/Pemkesra/2015.

Sinergi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dimulai dengan Pencanangan Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Saburai yang dimulai pada TA. APBDP 2015, dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Program Gerbang Desa Saburai tahun 2015 – 2019 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Gerbang Desa.

Pelaksanaan Program Gerakan membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) merupakan salah satu program unggulan Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya program Gerbang Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung nomor 37.a Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

- b. Penetapan Desa Sasaran Program Gerbang Desa Saburai

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, jumlah desa miskin dan tertinggal provinsi pada tahun 2015 sebanyak 380 desa. pada tahap awal, jumlah desa yang akan ditetapkan sebagai penerima program Gerbang Desa Penetapan desa sebanyak 30 Desa sebagai *Pilot Project*. Sesuai usulan Kabupaten dan dengan mempertimbangkan Indeks Kemajuan Desa (IKD), maka Jumlah desa

sasaran penerima program Gerbang Desa Saburai tahun 2015 ditetapkan sebanyak **30 (tiga puluh) Desa** di 28 Kecamatan pada 13 Kabupaten se Provinsi Lampung.

Penetapan lokasi desa sasaran Gerbang Desa Saburai dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung nomor : G/293/II.02/HK/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Lampung Tahun 2015.

c. Rekrutmen Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai

Untuk pelaksanaan program Gerbang Desa Saburai Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penerimaan/rekrutmen untuk tenaga fasilitator yang akan ditempatkan pada 30 desa di 13 Kabupaten. Proses penerimaan dilakukan melalui media elektronik yaitu website Bappeda Provinsi Lampung ([www.bappeda.lampungprov.go.id](http://www.bappeda.lampungprov.go.id)) pada tanggal 25 s.d. 29 Agustus 2015.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari Asisten Bidang Kesra, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Bappeda, Kepala BPMPD dan Pejabat fungsional Bappeda Provinsi Lampung pada tanggal 7-8 September 2015.

Dari 94 pelamar telah ditetapkan 30 orang tenaga fasilitator yang terdiri dari 28 orang fasilitator Kecamatan dan 2 orang fasilitator Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : G/451/II.02/HK/2015 tentang Penetapan dan Penempatan Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung Tahun 2015.

d. Pembekalan Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai

Pada tanggal 28 September 2015 telah dilaksanakan sosialisasi Program Gerbang Desa Saburai kepada bupati dan kepala desa penerima program Gerbang Desa Saburai dan sekaligus dilakukan pembekalan terhadap Fasilitator (Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Provinsi) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 September 2015.

Selanjutnya Fasilitator yang telah dilatih diberikan surat tugas untuk melakukan sosialisasi persiapan pelaksanaan program Gerbang Desa Saburai sekaligus melakukan pendampingan dalam penyusunan usulan/proposal dan pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran sesuai dengan penempatan tugasnya.

e. **Launching Program Gerbang Desa Saburai**

Sebagai tanda telah mulainya atau dilaksanakannya Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) maka pada tanggal 17 Desember 2015 telah dilakukan peresmian atau **Launching Program Gerbang Desa** oleh Gubernur Lampung di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

f. **Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai**

Berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional serta mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat maka pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai tahun 2015 difokuskan pada pekerjaan fisik. Berdasarkan usulan/proposal kegiatan yang disampaikan Fasilitator, pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh masing-masing desa adalah ; pembuatan sumur bor, rabat beton, drainase, dan lain-lain. Secara rinci jenis pekerjaan fisik yang dilaksanakan dalam program Gerbang Desa Saburai tahun 2015.

Secara berkelanjutan, Program Gerbang Desa ini akan terus dilaksanakan sampai dengan 2019 dengan target pengentasan 380 desa tertinggal di Provinsi Lampung.

### **4.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan**

#### **4.3.1 Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan**

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dilaksanakan di Provinsi Lampung di antaranya adalah pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan beasiswa bagi siswa miskin. Pengendalian yang dilakukan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi seperti : pemberian bantuan tepat sasaran; pemberian bantuan tepat waktu sesuai jadwal; pemberian bantuan tepat jumlah. Hasil monitoring yang dilaksanakan selama ini menunjukkan bahwa pemberian Raskin masih ada yang belum tepat sasaran dan tepat jumlah karena juga menjangkau masyarakat yang tidak miskin. Hal ini dikarenakan masih adanya tuntutan dari sebagian masyarakat agar Raskin dibagi secara merata ke seluruh masyarakat. Melihat kondisi demikian, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa Raskin diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar miskin. Sementara itu, pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi Lampung diupayakan tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Meskipun demikian, masih ada keluhan dari LSM yang menyoroti bahwa ada sebagian masyarakat miskin yang belum dapat mengakses Jamkesmas karena tidak terdata sebagai penerima Jamkesmas. Untuk itu, TKPKD Provinsi Lampung yang dimotori oleh Bappeda membuka ruang dialog dan pengaduan masyarakat untuk menyampaikan data-data masyarakat miskin yang sekiranya masih tercecer sebagai penerima bantuan sosial.

b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Mikro dan Kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dilaksanakan di Provinsi Lampung di antaranya adalah pemberian bantuan modal untuk usaha kelompok dan pemberian bantuan peralatan usaha.

Melalui UPT. Perkuatan Permodalan pada Dinas Koperasi dan UMKM juga telah dialokasikan bantuan modal bagi UMKM di seluruh Provinsi Lampung berupa dana bergulir yang omsetnya saat ini sudah mencapai Rp.12 milyar lebih, yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

c. Program Penanggulangan Kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Perlindungan Sosial

Program penanggulangan kemiskinan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang dilaksanakan di Provinsi Lampung di antaranya adalah pemberian bekal keterampilan bagi pekerja migran, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.

Sekretariat TKPKD Provinsi Lampung menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagai gambaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang di Provinsi Lampung, mencakup kondisi umum kemiskinan daerah, prioritas target bidang dan intervensi penanggulangan kemiskinan, tinjauan anggaran penanggulangan kemiskinan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah, serta koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.



### **4.3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Provinsi Lampung khususnya dapat melakukan koordinasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan berbagai upaya di bidang penanggulangan kemiskinan pada TKPKD Provinsi Lampung. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun secara tertulis dengan metode penanganan permasalahan dilakukan secara hierarki dan birokrasi, karena TKPKD Provinsi Lampung merupakan salah satu sistem organisasi yang melekat di dalam tata pemerintahan.

# BAB 5

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Angka kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai 13,53 persen dengan indeks kedalaman kemiskinan 2,095 persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,476 persen.
2. Untuk pelaksanaan bantuan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui APBD Provinsi Lampung masih bersifat *top down* karena paket bantuan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD tersebut, sedangkan kegiatan Gerbang Desa dinilai lebih optimal karena bantuan keuangan langsung disalurkan ke lokus desa tertinggal dengan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. Bantuan pemerintah provinsi ini dilakukan melalui *cash transfer* ke masing-masing rekening desa sesuai mekanisme APBD Provinsi Lampung, namun bantuan dana yang diberikan masih sangat kecil dan sedikit dibandingkan dengan jumlah desa tertinggal di wilayah Provinsi Lampung sehingga hasilnya kurang maksimal.
3. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pada pendidikan (APM SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun), kesehatan (kematian ibu dan bayi, gizi buruk dan kurang), ketenagakerjaan (tingkat partisipasi angkatan kerja), dan infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih).

### 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung:

- a. Data rumah tangga dan penduduk miskin hasil PPLS tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BPS hendaknya digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan. Jika masih terdapat

ketidaksesuaian data maupun rumah tangga/penduduk miskin maka dapat dilakukan pemutakhiran data;

- b. Guna terwujudnya pengelolaan data penduduk miskin secara baik, maka perlu dipertimbangkan penyusunan Sistem Informasi Data Penduduk Miskin yang komprehensif yang memuat berbagai informasi penting mengenai status penduduk miskin tersebut beserta intervensi program/kegiatan yang sudah diterimanya.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD-SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya. Selama ini kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD belum secara jelas menunjukkan mana saja rumah tangga/penduduk miskin yang telah memperoleh intervensi program dari SKPD yang bersangkutan.
- d. Untuk meningkatkan keaktifan dari seluruh anggota TKPK Provinsi Lampung, maka Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program TKPKD harus menyusun program kerja pada saat Rakor Perencanaan di awal tahun dan menyampaikan hasil kerjanya pada Rakor Evaluasi di akhir tahun.
- e. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu digalakkan mulai tahun 2015 dan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana target capaian dan outcome dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu disusun sebagai pedoman dan penyamaan persepsi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.



## **BERITA ACARA RAKOR TKPK SE-PROVINSI LAMPUNG Tahun 2015**

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas, telah dilaksanakan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Badan Pusat Statistik se-Provinsi Lampung, maka telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.
2. Menetapkan TKPK Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai pelaku utama dalam pemantauan proses pelaksanaan PBDT 2015 dan bertanggung jawab terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan di wilayah masing-masing guna memastikan kelancaran pelaksanaan PBDT 2015.
4. Tidak menjadikan penduduk di kawasan register sebagai sasaran pendataan PBDT 2015 mengingat secara legal wilayahnya belum diakui oleh pemerintah setempat.

1. Ketua TKPK Provinsi Lampung  
(Wakil Gubernur Lampung)
2. Kepala BPS Provinsi Lampung
3. Ketua TKPK Bandar Lampung  
(Sekda Kota Bandar Lampung)
4. Ketua TKPK Metro  
(Wakil Walikota Metro)
5. Ketua TKPK Lampung Barat  
(Wakil Bupati Lampung Barat)
6. Ketua TKPK Lampung Tengah  
(Wakil Bupati Lampung Tengah)
7. Ketua TKPK Lampung Timur  
(Ka. Bappeda Kab. Lampung Timur)
8. Ketua TKPK Lampung Selatan  
(Wakil Bupati Lampung Selatan)
9. Ketua TKPK Lampung Utara  
(Wakil Bupati Lampung Utara)
10. Ketua TKPK Mesuji  
(Wakil Bupati Mesuji)
11. Ketua TKPK Pesawaran  
(Wakil Bupati Pesawaran)
12. Ketua TKPK Pesisir Barat  
(Ka, Bappeda Kab. Pesisir Barat)
13. Ketua TKPK Pringsewu  
(Wakil Bupati Pringsewu)
14. Ketua TKPK Tanggamus  
(Wakil Bupati Tanggamus)
15. Ketua TKPK Tulang Bawang  
(Wakil Bupati Tulang Bawang)
16. Ketua TKPK Tulang Bawang Barat  
(Wakil Bupati Tulang Bawang Barat)
17. Ketua TKPK Way Kanan  
(Wakil Bupati Way Kanan)

**Bachtiar Basri, SH., MM.**

**Ir. Adhi Wiriana, M.Si.**

**Drs. Badri Tamam**

**Drs. H. R. Saleh Chandra P, MM**

**Drs. Makmur Azhari**

**DR. Ir. Mustafa, MH**

**Guntur S. Napitupulu, SE**

**H. Eki Setyanto, SE**

**Dr. Sri Widodo**

**H. Ismail Ishak**

**Drs. H. Musiran**

**Ir. Achmad Achyuni**

**H. Handitiya Narapati, SH**

**H. Samsul Hadi, M.Pdi**

**Heri Wardoyo, SH**

**Fauzi Hasan, SE, MM**

**DR. H. Raden Nasution**

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over dotted lines. Some signatures include additional marks like '4' or '5'.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	REALISASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH												
2	PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015												
3	NO	SKPD	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	SASARAN KUANTITATIF	ANGGARAN	PERMASALAHAN	SUMBER DAERAH	APBD			
4	1	BPLHD	Program: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan Pola 3R (Reuse, Reduce & Recycle) di Provinsi Lampung Tahun 2015	1 SDN 1 Ulu Belu Kab. Tanggamus.		62.875.200	62.626.000					
5			Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan		2 TK Assalam Pulau Singkep Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung								
6					3 Aula BLH Kab. Lampung Tengah								
7					4 SDN 1 Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.								
8					5 Bumi Perkemahan Jambore Daerah di Kota Bandar Lampung.								
9					6 Aula Bappeda Kab. Lampung Barat.								
10					7 SMK N 1 Kotabumi Kab. Lampung Utara.								
11					8 Aula Bappeda Kab. Lampung Timur.								
12					9 STKIP Muhammadiyah Kab. Pringsewu								
13			Program: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Terlaksananya penilaian program Kalpataru dan Adiwiyata.	a Penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Lampung:		334.136.100	332.077.500					APBD
14			Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup		1 Kelompok wanita tani Desa Setia Mukti Pekon Tribudisukur Kebon Tebu (Penyelamat Lingkungan).								
15					2 Bakrie Land-Krakatoa Nirwana Resosrt Grand Elty Krakatoa, Kalianda Lampung Selatan (kategori Penyelamat Lingkungan).								
16					3 Broto (wiraswasta) Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan (kategori Perintis Lingkungan).								
17					4 Dra Maria Fitri Jayasinga, M.Pd (staf ahli walikota Metro) dengan kategori pengabdian lingkungan.								
18					b Sekolah penerima penghargaan Adiwiyata:								
19					1. SDN 1 Metro Pusat Kota Metro.								
20					2. SDN 1 Metro Timur Kota Metro.								
21					3. SMKN 4 Bandar Lampung.								
22					4. SDN 7 Metro Timur.								
23					5. SDN 2 Metro Utara.								
24					6. SMAN 2 Bandar Lampung.								
25					7. SMAN 4 Metro Kota Metro								
26					8. MIN 1 Metro Kota Metro								
27					9. SMKN 1 Muhammadiyah Metro-Metro								
28					10. SD Al Kautsar Bandar Lampung								
29					11. SMAN 1 Tegineneng-Pesawaran								
30					12. SMPN 2 Tegineneng-Pesawaran								
31					13. SMPN 7 Kotabumi-Lampung Utara								
32					14. SMAN 3 Kotabumi-Lampung Utara								
33					15. SDN 4 Tanjung Aman Lampung Utara								
34					16. SMPN 2 Sidomulyo- Mesuji								
35					17. SMAN 1 Way Serdang-Mesuji								
36					18. SDN 2 Gisting Permai-Tanggamus								
37					19. SMPN 2 Sumberejo-Tanggamus								
38					20. SMAN 1 Sumberejo-Tanggamus								
39					21. SMAN 2 Menggala-Tulang Bawang								
40					22. SMAN 1 Penawar Tama-Tulang Bawang								
41					23. SDN 1 Way Mengaku-Lampung Barat								
42			Program: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam di Sekitar DAS	DAS Way Tulang Bawang (Kab. Tulang Bawang Barat), meliputi:		126.329.700	125.928.550					APBD
43			Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		1 Desa Penunangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah.								
44					2 Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah								
45					3 Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah								
46					JUMLAH		523.341.000	520.632.050					
47	2	BMPMD	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi										
48			1 Pengembangan Kelompok Masyarakat di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	13 Kabupaten di Provinsi Lampung	39 Orang	83.262.000	83.262.000	Tidak ada				APBD









A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	NO	SKPD	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		LOKASI	SASARAN KUANTITATIF			ANGGARAN		PERMASALAHAN	Sumber DATA
168						65. Banjar Sari							
169						66. Karang Rejo							
170													
171						T. Bawang							
172						67. Karya Jitu Mukti							
173						68. Pasiran Jaya							
174						69. Ringin Jaya							
175						70. Bandar Aji Jaya							
176						71. Mekar Sari							
177						72. Sungai Nibung							
178						73. Gedung Meneng							
179						74. Aji Mesir							
180						75. Bumi Ratu							
181													
182						Tanggamus							
183						76. Gunung Kasih							
184						77. Talang Lebar							
185						78. Negri Agung							
186						79. Sukaraja							
187						80. Sudimoro							
188						81. Sri Menganten							
189						82. Sidodadi							
190						83. Agro Mulyo							
191						84. Sinar Betung							
192						85. Banjar Agung Udik							
193						86. Way Liwok							
194													
195						Pesawaran							
196						87. Tresno Maju							
197						88. Sri Wedari							
198													
199						Mesuji							
200						89. Sidang Makmur							
201						90. Panggung Rejo							
202						91. Sungai Buaya							
203						92. Sungai Badak							
204						93. Wiralaga I							
205						94. Sri Tanjung							
206						95. Sungai Cambai							
207						96. Tebing Karya mandiri							
208													
209						Lampung Selatan							
210						97. Pancasila							
211						98. Agom							
212						99. Munjuk Sampurna							
213						100. Ketapang							
214						101. Klaten							
215						102. Purwodadi							
216						103. Way Gelam							
217													
218						Pringsewu							
219						104. Bulu Rejo							
220						105. Gemah Ripah							
221						106. Kresno Mulyo							
222													
223						B. Lampung							
224						107. Way Kandis							
225						108. Pematang Wangi							
226													
227						Lampung Timur							
228						109. Bumi Ayu							
229						110. Sukaraja IV							
230						111. Tambah Luhur							
231						112. Sri Gading							
232						113. Labuhan Ratu Baru							
233						114. Bumi harjo							
234						115. Braja Harjosari							
235						116. Raman Fajar							
236						117. Tanjung Kencono							



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NO	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		LOKASI	SASARAN KUANTITATIF			ANGGARAN		PERMASALAHAN	Sumber Dana
3													
299						Kec. Rawa Pitu Tulang Bawang							
300						1. Kampung Andalas Cermin							
301						2. Doto Yosomulyo							
302						3. Bumi Sari							
303						4. Gedung Jaya							
304						5. Rawa Ragil							
305						Kec. Sungkai Jaya Lampung Utara							
306						1. Cempaka							
307						2. Cempaka Timur							
308						3. Negara Agung							
309						4. Sri Agung							
310						5. Cempaka Barat							
311						Kec. Negeri Batin Way Kanan							
312						1. Sri Menanti							
313						2. Negara Batin							
314						3. Negeri Mulya							
315						4. Sri Mulyo							
316						5. Kota Jawa							
317			2.5 Kajian Kerawanan Pangan	Laporan kajian kerawanan pangan		Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	192,4	192,33		
318			2.6 Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan	Laporan kajian ketersediaan dan akses pangan		Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	70,39	69,4		
319			2.7 Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri Pangan	Laporan Monev Desa Mandiri Pangan		Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	152,63	152,3		
320			<b>3. Kegiatan Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan</b>							<b>3.334,01</b>	<b>3.285,82</b>		APBN/Dekon
321			3.1 Percepatan Pengankaragaman Konsumsi	Jumlah desa/kelompok wanita yang diberdayakan		14 Kab/Kota	114 desa		114 desa	2.367,44	2.332,63		
322						1. Tahap Penumbuhan (2015) Lampung Barat							
323						1. Tribudi syukur							
324						2. Tribudi Makmur							
325						3. Waspada							
326						4. Gunung Terang							
327						5. Bandar Baru							
328						6. Bakhu							
329						7. Sumber Alam							
330						8. Mutar alam							
331						9. Pampangan							
332						10. Sekincau							
333						11. Rigis Jaya							
334						12. Way Petai							
335													
336						Mesuji							
337						1. Gunung Mulya							
338						2. Muara Tenang							
339						3. Muara Tenang Timur							
340						4. Mukti Jaya							
341						5. Harapan Mukti							
342						6. Tanjung Mas Mulya							
343						7. Wonosari							
344						8. Marga Jaya							
345						9. Eka Mulya							
346						10. Adi Karya Boga							
347						11. Wira Bangun							
348													
349						Way Kanan							
350						1. Bumi Agung							
351						2. Pisang Indah							
352						3. Tanjung Raya							
353						4. Lebak Penjangan							
354						5. Sidoarjo							
355													
356						Pringsewu							
357						1. Pringsewu Selatan							
358						2. Tanjung Anom							
359						3. Panjerejo							
360						4. Sri Rahayu							
361						5. Negla sari							
362						6. Puji Harjo							
363													
364													
365						Pesawaran							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	NO	SKPD	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		LOKASI		SASARAN KUANTITATIF		ANGGARAN		PERMASALAHAN	Jumlah DANA
366						1. Bagelen							
367						2. Tanjung Rejo							
368						3. Hanura							
369						4. Sanggi							
370						5. Gayau							
371						6. Ponco Kresno							
372						7. Tresno Maju							
373						8. Pujo Rahayu							
374						9. Kota Jawa							
375						10. Sinar Jati							
376						11. Gerning							
377						12. Gunung Rejo							
378													
379						Lampung Tengah							
380						1. Purnama Tunggal							
381						2. Senang Rejo							
382						3. Sendang Agung							
383						4. Sriwijaya							
384						5. Ratna Katon							
385						6. Adi Jaya							
386													
387						Tulang Bawang Barat							
388						1. Sumber Rejeki							
389						2. Toto Mulyo							
390						3. Setia Bumi							
391						4. Mulyo Jadi							
392						5. Wong Kerto							
393						6. Marga kencana							
394													
395						Tulang Bawang							
396						1. Tri Tunggal Jaya							
397						2. Tri Mulya Jaya							
398						3. Tri Tunggal Jaya							
399						4. Pasar Batang							
400						5. Karya makmur							
401						6. Sungai Nibung							
402													
403						Kota Metro							
404						1. Yosomulyo							
405						2. Sumbersari							
406						3. Rejomulyo							
407						4. Purwoasri							
408						5. Banjarsari							
409						6. Yosodadi							
410						7. Tejosari							
411						8. Ganjar Asri							
412													
413						Lampung Utara							
414						1. Tanjung seneng							
415						2. Ogan Campang							
416						3. Sabuk Empat							
417						4. Bumi Nabung							
418						5. Sindang Agung							
419						6. Semuli Jaya							
420													
421						Bandar Lampung							
422						1. Campang Raya							
423						2. Sukabumi							
424						3. Sumberejo Sejahtera							
425						4. Pinang Jaya							
426													
427						Tahap Pengembangan (2014)							
428						Pringsewu							
429						1. Margosari							
430						2. Margakarya							
431						3. Totokarto							
432						4. Ambarawa barat							
433						5. Pandan Sari							
434						6. Bulok Rejo							





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
3	NO	SKPD	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>LOKASI</b>		<b>SASARAN KUANTITATIF</b>		<b>ANGGARAN</b>		<b>PERMASALAHAN</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>	
527			1 Sub Kegiatan Pengadaan PMT untuk bayi, anak balita dan ibu hamil KEK	Jumlah paket PMT untuk bayi, anak balita dan ibu hamil KEK		15 Kabupaten Kota		15 Kab Kota	15 Kab/Kota	17.129.930.400	17.084.344.500	Tidak dapat ditentukan desa karena didistribusikan ke Kabupaten Kota, kabupaten Kota kemudian mendistribusikan ke Puskesmas. Selain itu nama desa pada program Gerbang Desa Saburai baru ada pada akhir tahun	APBD	
528			2 Sub Kegiatan Pengadaan Food model (Media Penyuluhan Gizi) dan Tripod Posyandu untuk 624 posyandu	Tersedianya Food model (Media Penyuluhan Gizi) dan Tripod Posyandu untuk 624 posyandu		15 Kabupaten Kota		15 Kab Kota	15 Kab/Kota	504.600.000	502.541.100	Tidak dapat ditentukan desa karena didistribusikan ke Kabupaten Kota, kabupaten Kota kemudian mendistribusikan ke Puskesmas	APBD	
529			<b>Program Obat &amp; Perbekalan Kesehatan</b>											
530			1 Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan - Sub Kegiatan Penyediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan untuk 15 Kab Kota		15 Kabupaten Kota		15 Kab Kota	15 Kab Kota	7.251.511.000	6.854.120.449	Tidak dapat ditentukan desa karena didistribusikan ke Kabupaten Kota, kabupaten Kota kemudian mendistribusikan ke Puskesmas. Selain itu nama desa pada program Gerbang Desa Saburai baru ada pada akhir tahun	APBD	
531			<b>Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>											
532			1 Kegiatan Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Sub Kegiatan Pengadaan Alat kontrasepsi (IUD & Implant)	Jumlah alat kontrasepsi Keluarga Berencana untuk 15 Kab Kota		15 Kabupaten Kota		15 Kab Kota	15 Kab Kota	1.000.000.000	971.093.750	Tidak dapat ditentukan desa karena didistribusikan ke Kabupaten Kota, kabupaten Kota kemudian mendistribusikan ke Puskesmas. Selain itu nama desa pada program Gerbang Desa Saburai baru ada pada akhir tahun	APBD	
534			<b>JUMLAH</b>											
535											25.886.041.400	25.412.099.799		
536	7	Dinas Pengairan dan Peremukiman												
537	8	Bina Marga	<b>Program Pembanguna Jalan dan Jembatan</b>											
538			1 Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Way Kanan	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi		Way Kanan		65%	67,02%		49.154,64	44.134,97	Terkendalanya pengadaan barang dan jasa akibat rusaknya server LPSE	APBD
539			2 Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Tulang Bawang	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi		Tulang Bawang		65%	67,02%		56.644,82	50.877,68	Terkendalanya pengadaan barang dan jasa akibat rusaknya server LPSE	APBD
540			3 Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi		Tulang Bawang Barat		65%	67,02%		34.031,82	31.711,47	Terkendalanya pengadaan barang dan jasa akibat rusaknya server LPSE	APBD
541			4 Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi		Lampung Barat		65%	67,02%		10.094,21	9.074,95	Terkendalanya pengadaan barang dan jasa akibat rusaknya server LPSE	APBD
542			5 Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanggamus	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi		Tanggamus		65%	67,02%		30.129,35	27.844,64	Terkendalanya pengadaan barang dan jasa akibat rusaknya server LPSE	APBD
543			6 Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Pesawaran	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi		Pesawaran		65%	67,02%		77.902,68	74.947,70	Terkendalanya pengadaan barang dan jasa akibat rusaknya server LPSE	APBD
544			<b>JUMLAH</b>											
545	9	Dinas Pertanian	Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan											
											257.957,51	238.591,41		





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	NO	SKPD	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		LOKASI		SASARAN KUANTITATIF		ANGGARAN		PERMASALAHAN	SUMBER DANA
592						- Kampung SP 3 Way Terusan							
593						- Sidoarjo, Blambangan Umpu							
594						- Tanjung Agung, Pakuan Ratu							
595						- Pakuan Baru, Pakuan Ratu							
596						- Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar							
597						- Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar							
598						- Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui							
599						- Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui							
600						- Margodadi Tumi Jajar							
601						- Makarti, Tumi Jajar							
602						- Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar							
603						JUMLAH				375.875.000	373.285.000		
604	11	Dinas Peternakan	Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan										
605			Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Teknologi Peternakan Kambing	5 Kelompok		Desa Way Pring, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus		5 Kelompok		200.000.000	197.600.000		APBD
606													
607			Program: Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan										
608			Kegiatan: - Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanam	1 Kelompok		Desa Tiga Jaya, Kec. Sekincau, Kab. Lampung Barat		1 Kelompok		2.040.000.000	2.001.725.120		APBN
609													
610													
611													
612													
613													
614													
615													
616	12	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman penyegar, tanaman semusim, tanaman tahunan dan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perlindungan perkebunan									
617			1 Peremajaan Tanaman Karet			Kabupaten Mesuji		150 Ha	150 Ha	1.038.750	703.450		APBN
618			2 Peremajaan Tanaman Kelapa			Kabupaten Lampung Selatan		200 Ha	200 Ha	3.900	3.600		APBN
619			3 SLPHT Tanaman Kakao			Kabupaten Lampung Selatan		2 KT	2 KT	199.440	199.440		APBN
620			4 Pengendalian OPT Tanaman Kelapa (Hama Oryctes, sp)			Kabupaten Lampung Selatan		200 Ha	200 Ha	187.250	187.000		APBN
621			5 Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta			Kabupaten Tanggamus		1450 Ha	1450 Ha	7.020.900	7.011.475		APBN-P
622			6 Intensifikasi Tanaman Lada			Kabupaten Tanggamus		600 Ha	600 Ha	2.044.500	2.026.200		APBN-P
623			7 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Tanggamus		35 KT	35 KT	770.000	43.750		APBN-P
624			8 Pelatihan Strategis Pengembangan Kelembagaan Petani Kopi			Kabupaten Tanggamus		108 Org	108 Org	131.100	8.700		APBN-P
625			9 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Kopi			Kabupaten Tanggamus		18 Org	18 Org	132.900	128.100		APBN-P
626			10 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Tanggamus		15 KT	15 KT	330.000	330.000		APBN-P
627			11 Pelatihan Strategis Pengembangan Kelembagaan Petani Lada			Kabupaten Tanggamus		54 Org	54 Org	65.550	63.150		APBN-P
628			12 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Lada			Kabupaten Tanggamus		18 Org	18 Org	66.450	64.050		APBN-P
629			13 Peningkatan Mutu Kopi (Peralatan)			Kabupaten Tanggamus		2 Unit	2 Unit	132.600	132.275		APBN-P
630			14 Peningkatan Mutu Lada (Peralatan)			Kabupaten Tanggamus		2 Unit	2 Unit	129.500	118.500		APBN-P
631			15 SLPHT Tanaman Kakao			Kabupaten Tanggamus		4 KT	4 KT	398.880	398.080		APBN
632			16 Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta			Kabupaten Pesisir Barat		500 Ha	500 Ha	2.421.000	2.418.625		APBN-P
633			17 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Pesisir Barat		12 KT	12 KT	264.000	15.000		APBN-P
634			18 Pelatihan Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani Kopi			Kabupaten Pesisir Barat		36 Org	36 Org	43.700	40.700		APBN-P
635			19 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Kopi			Kabupaten Pesisir Barat		18 Org	18 Org	44.300	41.300		APBN-P
636			20 Peningkatan Mutu Kopi (Peralatan)			Kabupaten Pesisir Barat		2 Unit	2 Unit	132.600	132.275		APBN-P
637			21 SLPHT Tanaman Kakao			Kabupaten Pringsewu		2 KT	2 KT	199.440	199.400		APBN-P
638			22 Rehabilitasi Tanaman Lada			Kabupaten Lampung Utara		200 Ha	200 Ha	1.174.500	350.350		APBN
639			23 Intensifikasi Tanaman Lada			Kabupaten Lampung Utara		700 Ha	700 Ha	2.385.250	2.367.750		APBN-P
640			24 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika Kelompok Tani Kopi Lada			Kabupaten Lampung Utara		100 Org	100 Org	82.200	82.200		APBN
641			25 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika Kelompok Tani Kopi Lada			Kabupaten Lampung Utara		17 KT	17 KT	374.000	374.000		APBN-P

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NO	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		LOKASI	SASARAN KUANTITATIF				ANGGARAN		PERMASALAHAN	Sumber Dana
642			26 Pelatihan Strategis Pengembangan Kelembagaan Petani Lada Petani Lada			Kabupaten Lampung Utara	54 Org			54 Org	65.550	65.550		APBN-P
643			27 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Lada			Kabupaten Lampung Utara	54 OH			54 OH	66.450	66.450		APBN-P
644			28 Peningkatan Mutu Lada (Peralatan)			Kabupaten Lampung Utara	2 Unit			2 Unit	129.500	129.500		APBN-P
645			29 Perluasan Tanaman Tebu			Kabupaten Lampung Utara	1000 Ha			1000 Ha	16.040.000	15.795.390		APBN
646			30 Bongkar Ratan			Kabupaten Lampung Utara	50 Ha			50 Ha	616.000			APBN
647			31 Rawat Ratan			Kabupaten Lampung Utara	300 Ha			300 Ha	1.806.000	1.806.000		APBN
648			32 Pembangunan KBD			Kabupaten Lampung Utara	150 Ha			150 Ha	7.837.500	-	musim tanam dan musim panen tidak sesuai (faktor iklim)	APBN-P
649			33 Pengendalian OPT Tanaman Tebu (Penggerek batang/pucuk)			Kabupaten Lampung Utara	100 Ha			100 Ha	233.150	215.050		APBN
650			34 Pengendalian OPT Tanaman Tebu (Penggerek batang/pucuk)			Kabupaten Lampung Utara	25 Ha			25 Ha	83.550	32.800		APBN-P
651			35 Perluasan Tanaman Tebu			Kabupaten Tulang Bawang Barat	100 Ha			100 Ha	1.604.000	1.604.000		APBN
652			36 Rehabilitasi Tanaman Lada			Kabupaten Way Kanan	200 Ha			200 Ha	1.174.500	350.490		APBN
653			37 Intensifikasi Tanaman Lada			Kabupaten Way Kanan	500 Ha			500 Ha	1.703.750	1.702.800		APBN-P
654			38 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Way Kanan	100 Org			100 Org	82.200	82.200		APBN
655			39 Pelatihan Strategis Pengembangan Kelembagaan Petani Lada			Kabupaten Way Kanan	36 Org			36 Org	42.100	30.900		APBN-P
656			40 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Lada			Kabupaten Way Kanan	72 Org			72 Org	45.900	34.100		APBN-P
657			41 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Way Kanan	12 KT			12 KT	264.000	264.000		APBN-P
658			42 Peningkatan Mutu Lada (Peralatan)			Kabupaten Way Kanan	2 Unit			2 Unit	129.500	118.615		APBN-P
659			43 Perluasan Tanaman Tebu			Kabupaten Way Kanan	2350 Ha			2350 Ha	37.694.000	37.687.584		APBN-P
660			44 Rawat Ratan			Kabupaten Way Kanan	550 Ha			550 Ha	3.311.000	3.311.000		APBN
661			45 Perluasan Tanaman Tebu			Kabupaten Lampung Tengah	774 Ha			774 Ha	12.414.960	7.755.340		APBN
662			46 Bongkar Ratan			Kabupaten Lampung Tengah	250 Ha			250 Ha	3.080.000	1.734.163		APBN
663			47 Rawat Ratan			Kabupaten Lampung Tengah	1000 Ha			1000 Ha	6.020.000	6.020.000		APBN
664			48 SL-PHT Tanaman Tebu			Kabupaten Lampung Tengah	2 KT			2 KT	199.440	199.440		APBN
665			49 Intensifikasi Tanaman Lada			Kabupaten Lampung Timur	250 Ha			250 Ha	1.468.125	438.248		APBN
666			50 Intensifikasi Tanaman Lada			Kabupaten Lampung Timur	500 Ha			500 Ha	1.703.750	1.699.500		APBN-P
667			51 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Lampung Timur	100 Org			100 Org	82.200	82.200		APBN
668			52 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/ Dinamika			Kabupaten Lampung Timur	12 KT			12 KT	264.000	264.000		APBN-P
669			53 Pelatihan Strategis Pengembangan Kelembagaan Petani Lada			Kabupaten Lampung Timur	36 Org			36 Org	42.100	30.900		APBN-P
670			54 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Lada			Kabupaten Lampung Timur	72 OH			72 OH	45.900	34.700		APBN-P
671			55 Peningkatan Mutu Lada (Peralatan)			Kabupaten Lampung Timur	2 Unit			2 Unit	129.500	118.615		APBN-P
672			56 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Lada			Kabupaten Lampung Timur	1 KT			1 KT	107.800	63.852		APBN
673			57 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Lada			Kabupaten Lampung Timur	1 KT			1 KT	112.050	69.374		APBN-P
674			58 Pertemuan Teknis Pelatihan Petani Lada			Kabupaten Lampung Timur	40 Org			40 Org	25.500	25.500		APBN
675			59 Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta			Kabupaten Lampung Barat	200 Ha			200 Ha	895.400	892.320		APBN
676			60 Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta			Kabupaten Lampung Barat	1750 Ha			1750 Ha	8.473.500	8.465.275		APBN-P
677			61 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/Dinamika			Kabupaten Lampung Barat	100 Org			100 Org	88.200	4.800		APBN
678			62 Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi (KK) (Pelatihan Lanjutan Tahun 2014)			Kabupaten Lampung Barat	18 Org			18 Org	18.300	1.240		APBN
679			63 Pelatihan Administrasi Pembukuan dan Program Tabungan (APPH)			Kabupaten Lampung Barat	18 Org			18 Org	23.700	1.440		APBN
680			64 Pelatihan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga (PERTI) (Pelatihan Lanjutan Tahun 2014)			Kabupaten Lampung Barat	36 Org			36 Org	31.800	31.800		APBN
681			65 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan/Dinamika			Kabupaten Lampung Barat	42 KT			42 KT	924.000	924.000		APBN-P
682			66 Pelatihan Strategi Pengembangan Kelembagaan			Kabupaten Lampung Barat	126 O			126 O	13.650	10.150		APBN-P
683			67 Pelatihan Management Kemitraan Budidaya Kopi			Kabupaten Lampung Barat	18 Org			18 Org	155.050	12.550		APBN-P
684			68 Peningkatan Mutu Kopi(Peralatan)			Kabupaten Lampung Barat	2 Unit			2 Unit	132.600	132.275		APBN-P
685			69 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Kopi			Kabupaten Lampung Barat	2 KT			2 KT	177.780			APBN
686			70 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Kopi			Kabupaten Lampung Barat	2 KT			2 KT	191.680	11.800		APBN-P
687			71 Pertemuan Teknis Pelatihan Petani Kopi			Kabupaten Lampung Barat	40 Org			40 Org	27.850	7.000		APBN
688			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terlaksananya optimasi lahan dan pembangunan										
689			1 Pengembangan Optimasi lahan pada lahan perkebunan lada			Kabupaten Way Kanan	20 Ha			20 Ha	48.348	48.348		APBD-P
690			2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Komoditas Tembakau (Pembuatan Jalan Usaha Tani Swakelala)			Kabupaten Lampung Selatan	1 Km			1 Km	200.000	198.333		APBD-P
691			3 Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kawasan Perkebunan			Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan	3 Km			3 Km	740.000	711.813		APBD-P
692						JUMLAH					130.538.543	111.518.555		
693	13	Dinas Pertamb	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif											





